



Manajemen **PEMBANGUNAN DAERAH**



Iskandar Kato•Ahmad Faridi•Erika Revida•Darwin Damanik
Robert Tua Siregar•Sukarman Purba•Unang Toto Handiman
Bonaraja Purba•Firdaus•Marto Silalahi•Ari Mulianta Ginting
Hengki Mangiring Parulian Simarmata•Ince Weya



Manajemen **PEMBANGUNAN DAERAH**

UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Manajemen Pembangunan Daerah

Iskandar Kato, Ahmad Faridi, Erika Revida
Darwin Damanik, Robert Tua Siregar, Sukarman Purba
Unang Toto Handiman, Bonaraja Purba, Firdaus
Marto Silalahi, Ari Mulianta Ginting
Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Ince Weya



Penerbit Yayasan Kita Menulis

Manajemen Pembangunan Daerah

Copyright © Yayasan Kita Menulis, 2021

Penulis:

Iskandar Kato, Ahmad Faridi, Erika Revida
Darwin Damanik, Robert Tua Siregar, Sukarman Purba
Unang Toto Handiman, Bonaraja Purba, Firdaus
Marto Silalahi, Ari Mulianta Ginting
Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Ince Weya

Editor: Alex Rikki & Janner Simarmata

Desain Sampul: Devy Dian Pratama, S.Kom.

Penerbit

Yayasan Kita Menulis

Web: kitamenulis.id

e-mail: press@kitamenulis.id

WA: 0821-6453-7176

IKAPI: 044/SUT/2021

Iskandar Kato., dkk.

Manajemen Pembangunan Daerah

Yayasan Kita Menulis, 2021

xiv; 208 hlm; 16 x 23 cm

ISBN: 978-623-342-132-4

Cetakan 1, Juli 2021

- I. Manajemen Pembangunan Daerah
- II. Yayasan Kita Menulis

Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku tanpa
izin tertulis dari penerbit maupun penulis

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan berkahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini yang berjudul Manajemen Pembangunan Daerah. Tujuan penulisan buku untuk memberikan wawasan kepada para pembaca yang dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dan pengetahuan bagi civitas akademik serta menjadi bekal stakeholder dalam bidang pembangunan. Buku ini bisa menjadi referensi bagi para praktisi, akademisi dan para jajaran pemerintah kabupaten/kota.

Buku ini terdiri dari 13 bab yang menjelaskan tentang:

- Bab 1 Pengertian Manajemen Pembangunan
- Bab 2 Siklus Manajemen Pembangunan
- Bab 3 Perencanaan Pembangunan
- Bab 4 Penganggaran Dalam Pembangunan
- Bab 5 Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia
- Bab 6 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
- Bab 7 Indikator Pembangunan
- Bab 8 Pembangunan Antarwilayah Secara Berimbang
- Bab 9 Keterkaitan Desa Kota
- Bab 10 Manajemen Lingkungan Perkotaan
- Bab 11 Strategi Pembangunan Pesisir Mandiri
- Bab 12 Manajemen dan Pelayanan Publik
- Bab 13 RPJM Dalam Sistem Pembangunan Nasional

Buku ini selesai atas kerja sama para penulis dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta yang telah menuangkan ilmu dan wawasannya secara rapi serta pengalaman masing-masing dalam menjalankan amanah Tri Dharma Perguruan Tinggi pada institusi masing-masing. Kekompakan merupakan kunci utama dalam penyelesaian penulisan buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku tentu ada kekurangan namun berharap agar buku memberikan sumbangsih dalam menambah deretan referensi bagi pembangunan daerah di seluruh Indonesia. Akhirnya penulis

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penulisan buku ini. Penulis juga berterimakasih kepada Pimpinan Penerbit Kita Menulis yang telah berkenan menerbitkan buku ini. Semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati segala usaha kita. Amin

Makassar, juni 2021

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xiii

Bab 1 Pengertian Manajemen Pembangunan

1.1 Pendahuluan	1
1.2 Definisi Pembangunan	3
1.3 Manajemen Pembangunan	7
1.4 Keberhasilan Pembangunan Daerah	12

Bab 2 Siklus Manajemen Pembangunan

2.1 Pendahuluan	17
2.2 Siklus Manajemen Pembangunan	19
2.3 Manajemen Pembangunan Daerah	21
2.3.1 Perlunya Perencanaan Pembangunan Daerah	21
2.3.2 Akibat Pembangunan Daerah di Wilayah Miskin	23
2.4 Pendekatan Manajemen Pembangunan	25
2.5 Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah	27
2.6 Informasi Yang Dibutuhkan Dalam Manajemen Pembanguna Daerah .	28

Bab 3 Perencanaan Pembangunan

3.1 Pendahuluan	31
3.2 Pengertian Perencanaan	32
3.3 Pengertian Pembangunan	33
3.4 Perencanaan Pembangunan	36
3.5 Jenis-jenis Perencanaan Pembangunan	38
3.6 Tahapan Dalam Perencanaan Pembangunan	40

Bab 4 Penganggaran Dalam Pembangunan

4.1 Pendahuluan	43
4.2 Penganggaran	44
4.2.1 Pengertian dan Fungsi Penganggaran	44
4.2.2 Sistem dan Siklus Penganggaran	46

4.2.3 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	48
4.2.4 Sistem Penganggaran Pembangunan Nasional	50
4.3 Perencanaan Pembangunan Daerah	51
4.3.1 Pengertian Perencanaan	51
4.3.2 Perencanaan Daerah	53

Bab 5 Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia

5.1 Pengantar	57
5.2 Pengertian Pembangunan	59
5.3 Pola Pembangunan	63
5.4 Implementasi Pembangunan	66

Bab 6 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

6.1 Pendahuluan	71
6.2 Pengertian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	73
6.3 Hubungan Monitoring dan Evaluasi	76
6.4 Tujuan dan Manfaat Monitoring dan Evaluasi	78
6.5 Pendekatan dalam Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	83
6.6 Prinsip-prinsip melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	84
6.7 Hambatan dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	87

Bab 7 Indikator Pembangunan

7.1 Pendahuluan	89
7.2 Indikator Pembangunan	94
7.2.1 Pengertian Indikator	94
7.2.2 Pengertian Pembangunan	94
7.2.3 Pengertian Indikator Pembangunan	95
7.3 Indikator Ekonomi	97
7.3.1 Pendapatan Nasional	98
7.4 Indikator Non Ekonomi	100
7.4.1 Indeks Kualitas Hidup	101
7.4.2 Indeks Pembangunan Manusia	102
7.4.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	105

Bab 8 Pembangunan Antarwilayah Secara Berimbang

8.1 Pendahuluan.....	109
8.2 Pembangunan Antarwilayah.....	111
8.3 Pembangunan Wilayah	114
8.3.1 Ketimpangan Pembangunan	115
8.3.2 Ukuran Ketimpangan Antarwilayah.....	116
8.3.3 Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Pembangunan.....	116
8.4 Pertumbuhan Ekonomi	118
8.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	119
8.4.2 Teori Indeks Pemerataan Koefisien Variasi (KV).....	120
8.4.3 Teori Indeks Keseimbangan Pertumbuhan Antarsektor (Sj).....	121
8.4.4 Teori Indeks Williamson (IW)	121

Bab 9 Keterkaitan Desa Kota

9.1 Pendahuluan.....	123
9.2 Ciri-Ciri Daerah Perdesaan dan Perkotaan	124
9.3 Kegiatan Produksi Masyarakat Desa Kota	126
9.4 Konsep Keterkaitan Desa-Kota Di Indonesia	128
9.4.1 Konsep Development From Above (Growth Poles)	129
9.4.2 Konsep Development From Below (Agropolitan)	131

Bab 10 Manajemen Lingkungan Perkotaan

10.1 Pendahuluan.....	137
10.2 Pengertian Manajemen Lingkungan Perkotaan	139
10.3 Keberadaan Manajemen Lingkungan Perkotaan	141
10.4 Tujuan dan Manfaat Manajemen Lingkungan Perkotaan.....	145

Bab 11 Strategi Pembangunan Pesisir Mandiri

11.1 Pendahuluan.....	149
11.2 Kendala Pembangunan di Wilayah Pesisir.....	151
11.3 Strategi Pembangunan di Wilayah Pesisir.....	153

Bab 12 Manajemen dan Pelayanan Publik

12.1 Pendahuluan.....	159
12.2 Pelayanan Publik	160
12.3 Prinsip Pelayanan Publik	162
12.4 Manajemen Pelayanan Publik	164
12.5 Konsep Pelayanan Publik	166
12.6 Indikator Kualitas Pelayanan Publik.....	168

Bab 13 RPJM Dalam Sistem Pembangunan Nasional

13.1 Pendahuluan.....	173
13.2 Konsep Dasar Pembangunan.....	174
13.3 RPJM	176
13.4 RPJM Dalam Sistem Pembangunan Nasional.....	178
13.4.1 Sistem Pembangunan Nasional	178
13.4.2 RPJM Pembangunan Berkelanjutan.....	179
13.4.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dalam Sistem Pembangunan Nasional.....	180
13.4.4 RPJM Memberdayakan SDM Dalam Sistem Pembangunan Nasional.....	182
Daftar Pustaka	183
Biodata Penulis	201

Daftar Gambar

Gambar. 2.1: Koordinasi Perencanaan Pembangunan	26
Gambar 4.1: Alur Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia	50
Gambar 9.1: Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan.....	133
Gambar 11.1: Kerangka Hak Pengusahaan di Wilayah Pesisir	155
Gambar 11.2: Keterpaduan Variabel Penting dalam Pembangunan dan Pengelolaan di Wilayah Pesisir	156
Gambar 13.1: Kerangka Kebijakan Pembangunan 2015-2019	176
Gambar 13.2: Sistem Pembangunan Nasional	178

Daftar Tabel

Tabel 6.1: Perbedaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	77
---	----

Bab 1

Pengertian Manajemen Pembangunan

1.1 Pendahuluan

Kesejahteraan merupakan harapan manusia hidup. Kesejahteraan merupakan langkah awal menuju kebahagiaan. Setiap manusia mempunyai pandangan yang berbeda tentang batasan kesejahteraan, karena setiap individu atau setiap sesuatu kelompok manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda satu sama lain terhadap suatu barang dan/atau jasa. Manusia harus melakukan suatu tindakan untuk mencapai kesejahteraan yang dibutuhkannya itu, sedemikian hingga, setiap individu atau kelompok manusia akan mempunyai tindakan yang berbeda satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan yang dibutuhkan itu. Kesejahteraan manusia ditentukan sampai seberapa jauh manusia dapat memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkan. Negara adalah institusi yang dihasilkan dari suatu perjanjian sosial (social contract) oleh sekelompok manusia yang bersepakat membentuk suatu negara. Peran negara dalam hal ini adalah menyediakan barang dan/atau jasa yang banyak dibutuhkan oleh warga negaranya. Peran negara dalam penyediaan barang dan/atau jasa publik ini kemudian diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk suatu tindakan pembangunan (Randy R. Wrihatnolo and Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2013).

Pembangunan merupakan proses multidimensial meliputi perubahan struktur sosial, sikap hidup masyarakat dan kelembagaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan serta ketimpangan pendapatan (Korua, Rumat and Siwu, 2016). Pembangunan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berazaskan keadilan sosial dan dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan secara terpadu dan berkesinambunga berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sampai saat ini, disparitas dan kemiskinan masih menjadi permasalahan pembangunan. Infrastruktur dan ekonomi inklusif yang berkelanjutan menjadi prioritas kebijakan nasional untuk mengurangi kesenjangan wilayah serta sosial ekonomi dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi kondisi yang diperlukan dan mencukupi pada pembangunan daerah melalui belanja pemerintah dan program infrastruktur serta ekonomi terhadap kemiskinan sebagai indikator disparitas wilayah (Zubaedi, 2013).

Dalam pembangunan, diperlukan modal dasar, yang menjadi faktor masukan (input). Keberhasilan pembangunan, sedikit banyak juga ditentukan oleh modal dasar yang dimiliki suatu negara. Negara yang memiliki modal dasar yang besar baik potensial maupun riil, akan mampu membentuk dirinya menjadi negara yang besar dan kuat. Masalahnya, tinggal bagaimana bangsa itu memiliki kemampuan memproses modal dasar tersebut. Salah satu instrumen dalam pemrosesan modal dasar tersebut adalah manajemen. Dengan manajemen yang tepat, pemrosesan modal dasar akan menghasilkan keluaran (output) yang diinginkan (Ranupandojo, 1986). Sementara itu Saksono (2019) mengatakan bahwa manajemen pembangunan semestinya mampu mengoptimalkan modal pembangunan di suatu wilayah dan mengelolanya untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik. Akan tetapi belum seluruh pemangku kepentingan pembangunan memiliki pemahaman dan berkemampuan mengelola modal pembangunan di wilayahnya. Pada umumnya, pengelolaan perencanaan pembangunan daerah masih bersifat konvensional dan belum menjadikan hasil penelitian, pengembangan, desain, dan inovasi sebagai acuannya.

1.2 Definisi Pembangunan

Pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building) (Siagian, 2005). Selanjutnya dikatakan bahwa pembangunan adalah “suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Pada dasarnya dalam negara berkembang yang lepas landas dari suatu keadaan taraf rendah menuju taraf yang tinggi yaitu modernisasi, di mana variable-variabel dalam pembangunan dapat mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Oleh sebab itu dibutuhkan inisiatif, aktif, dan kritis bagi setiap warga negaranya untuk dapat bertindak dengan arah yang tepat dan dengan mampu menjadikan sumber-sumber dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah dalam pembangunan.

Pembangunan menurut Randy R. Wrihatnolo and Riant Nugroho Dwidjowijoto (2013) secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Perubahan terukur ditentukan oleh dimensi perubahan itu dalam definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Perubahan alami ditentukan oleh siapa yang berperan dalam perubahan itu. Perubahan alami adalah perubahan yang melembaga dalam bangun sosial sekelompok manusia. Hanya perubahan alami yang mampu menjamin adanya perubahan terukur secara konstan. Pembangunan menekankan perubahan alami untuk membedakan dari perubahan tidak alami yang ditimbulkan oleh kekuatan dari luar komunitas suatu kelompok manusia. Jika kekuatan dari luar komunitas berperan dalam fungsi perubahan, maka dikatakan bahwa pembangunan tidak berlangsung alami, dengan kata lain, kelompok manusia dalam komunitas tersebut tergantung pada kekuatan dari luar komunitas. Perubahan yang terjadi bukan karena berjalannya fungsi internal, tetapi karena adanya dorongan dari fungsi external. Dorongan dari fungsi external yang terlalu besar –dalam ukuran tertentu– dengan demikian menciptakan sebuah ketergantungan.

Makna membangun sendiri menurut Mahayanti Fitriandari and Winata (2021) adalah suatu usaha yang dilakukan pada saat ini dalam kerangka perbaikan atas kondisi masa kini dan lampau yang masih belum sesuai dengan cita-cita kehidupan manusia. Proses membangun tersebut dilakukan dalam rangka

perbaikan agar proses membangun tersebut dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya dalam konteks masa depan yang cerah. Sedangkan menurut Menurut Effendi (2002) pembangunan adalah “suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan”. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, di mana pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik.

Menurut Rogers dalam Suyono (2001) pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Adapun pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat seperti yang dimaksud berupa:

- a. Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dan lain-lain.
- b. Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar.
- c. Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan puskesmas.
- d. Prasarana produksi saluran air.

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa pembangunan itu proses perubahan kearah lebih baik tersebut hanya terwujud dengan melibatkan, menggerakkan manusianya baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta mengevaluasi hasilnya. Selain itu pembangunan merupakan suatu proses, ini dimaksudkan bahwa setiap usaha pembangunan pasti memerlukan kesinambungan pelaksanaan, dalam arti tanpa mengenal batas akhir meskipun dalam perencanaannya dapat diatur berdasarkan azas skala prioritas dan suatu tahapan tertentu. Seiring dengan perkembangan mengenai konsep dan pelaksanaan pembangunan di berbagai negara. Indonesia juga mengalami pergeseran paradigma pembangunan, baik dari strategi ekonomi, strategi people centered, hingga pada strategi pemberdayaan masyarakat yang dikatakan suatu alternatif dari model pembangunan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan strategi dalam pembangunan daerah yang termuat dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Beberapa pendapat ahli lainnya tentang pembangunan sebagai berikut:

1. Seers (1977), mendefinisikan pembangunan sebagai suatu istilah teknis, yang berarti membangkitkan masyarakat di Negara-negara berkembang dari kemiskinan, tingkat melek huruf (literacy rate) yang rendah, pengangguran, dan ketidakadilan sosial.
2. Rogers (1995), mendefinisikan pembangunan sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan system sosial, sedangkan modernisasi sebagai proses yang terjadi pada level individu.
3. Inayatullah (1979), mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan menuju polapola masyarakat yang lebih baik dengan nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan dan tujuan politiknya, juga memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri.
4. Dissanayake (1983), mendefinisikan pembangunan sebagai proses perubahan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dari seluruh atau mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan alam dan cultural tempat mereka berada dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini dan menjadikan mereka penentu dari tujuan mereka sendiri.
5. Rogers (1995), mendefinisikan pembangunan sebagai suatu jenis perubahan sosial, di mana ide-ide baru diperkenalkan pada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan per kapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik. Pembangunan adalah modernisasi pada tingkat sistem sosial.

Dalam GBHN 1998 disebutkan bahwa arah dan kebijakan pembangunan daerah adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peranserta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu penting dan sangat krusial untuk mewujudkan tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah sehingga keadilan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan merata di seluruh tanah air. Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Sedangkan dalam hal pembiayaan dan keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah tidak hanya kesiapan aparat pemerintah saja, tetapi juga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah dengan pemanfaatan sumber-sumber daya secara optimal. Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan (Juhanis, 2012).

Menurut Deddy T. Tikson dalam Digdowiseiso (2019) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial- ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan menjadi organisasi modern dan rasional. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (community/group). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan diversifikasi. (progress), pertumbuhan dan diversifikasi.

Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana ke arah yang lebih baik. Sedangkan tujuan dari pembangunan adalah untuk dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera baik materiil maupun spiritual. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka dalam pelaksanaannya sangat ditunjang oleh manajemen dan organisasi yang baik, karena dalam manajemen terkandung unsur perencanaan yang terorganisasi dengan baik. Tanpa adanya rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dalam rangka usaha pencapaian tujuan. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila, di dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu, dalam suasana kehidupan bangsa yang damai, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan hidup dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Jika mengkaji tentang pembangunan, maka teori modernisasi merupakan teori yang paling dominan menentukan wajah pembangunan (Setiawan, 2019).

1.3 Manajemen Pembangunan

Pengertian Manajemen Pembangunan menurut (Siagian, 2005) adalah upaya atau rangkaian pertumbuhan yang direncanakan dan upaya perubahan yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam konteks pembangunan bangsa. Sedangkan pengertian manajemen pembangunan menurut (Tjokroamidjojo, 1995) adalah proses kontrol pemerintah (pemerintah) terhadap bisnis (administrasi) untuk mewujudkan pertumbuhan yang direncanakan menuju situasi yang dianggap lebih baik dan lebih maju dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa.

Manajemen pembangunan adalah aktivitas mengatur masyarakat di bidang ekonomi dan perubahan sosial dengan tujuan untuk membangun ketertiban umum (Meadows, 1987). Pendekatan manajemen menurut Digidowiseiso (2019) dimulai dengan menyusun Visi, disusul Misi, Strategi, dan Aksi pembangunan. Visi adalah arah ke mana kita hendak pergi. Visi pembangunan Indonesia adalah sebuah negara yang berisi rakyat yang makmur, mandiri, berdasarkan Pancasila dan UUD 45, artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, dan

Keadilan. Misi, adalah alasan keberadaan kita sebagai bangsa, atau *raison d'être*. Misi pembangunan Indonesia adalah sebagai sebuah negara-bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, di dalam kerangka kehidupan bersama umat manusia di dunia. Visi dan Misi pembangunan Indonesia harus sama bagi setiap organisasi dan masyarakat, namun aspirasinya dapat berlainan sesuai dengan tempat dan kondisi masing-masing.

Manajemen pembangunan Indonesia berlandaskan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Strateginya yaitu manajemen proses pembangunan yang mengusahakan (strategi) secara serasi dan berkaitan dengan trilogi pembangunan (pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas nasional) yang pada akhirnya akan menunjang ketahanan nasional. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan pelaksana lainnya/turunannya, merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat proses, yang pada akhirnya diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian hasil pembangunan yang tepat guna dan hasil guna, dalam arti pembangunan yang dilaksanakan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat untuk kelangsungan hidupnya (*sustainable community*) dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem.

Pada tahap pelaksanaan rencana, seluruh OPD di pemerintah kabupaten/kota merealisasikan rencana pembangunannya ke dalam kegiatan nyata sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Pelaksanaan rencana tersebut dapat dibagi atas tiga bentuk kegiatan. Pertama, rencana dilaksanakan dalam bentuk kegiatan rutin dan swakelola yang dilakukan oleh setiap OPD. Kedua, rencana dilaksanakan dengan bantuan pihak lain, seperti konsultan, kontraktor, atau penyedia barang. Ketiga, rencana dilaksanakan oleh masyarakat dan swasta, seperti kegiatan kebersihan, membangun rumah, kantor, toko, sekolah swasta, pabrik, hotel, kolam renang umum, pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya (Kaffah and Syaodih, 2018).

Konsep manajemen pembangunan (*management of development*) merupakan sebuah perspektif dan istilah lain dari konsep administrasi pembangunan (*administration of development*), karena melihat peran administrasi dalam mewujudkan pembangunan (Esman, 1991). Karena itu pada dasarnya dapat dikatakan bahwa masalah administrasi pembangunan adalah juga masalah manajemen pembangunan.

Kartasmita (1997) mengatakan bahwa studi mengenai manajemen telah banyak mengalami perkembangan, namun teori dasarnya tidak berubah termasuk kegiatan yang dilakukan oleh manajemen, yaitu:

1. Perencanaan (planning). Perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah usaha yang secara sadar terorganisir, dan terus menerus melakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Penganggaran (budgeting). Penganggaran merupakan salah satu kegiatan utama setiap manajemen. Penganggaran sangat erat kaitannya dengan perencanaan karena pada prinsipnya penganggaran merupakan rencana pembiayaan yang disusun dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
3. Pelaksanaan (implementation). Pelaksanaan pembangunan merupakan kegiatan realisasi dari proses perencanaan yang telah disusun sebelumnya dengan cara yang efektif dan efisien.
4. Monitoring dan evaluasi. Monitoring ditunjukan untuk melihat kemajuan keberhasilan suatu pelaksanaan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan. Kartasmita, menekankan bahwa pemantauan diperlukan agar pelaksanaan pembangunan yang bergeser dari rencana dapat diketahui secara dini dan diambil langkah-langkah yang sesuai. Sedangkan evaluasi atau penilaian merupakan salah satu fungsi manajemen pembangunan yang dipandang penting, karena menyangkut upaya untuk mengetahui apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi. Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada penerapan beberapa nilai terhadap hasil pembangunan.

Menurut Saksono, (2019) manajemen pembangunan semestinya mampu mengoptimalkan modal pembangunan di suatu wilayah dan mengelolanya untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik. Akan tetapi belum seluruh pemangku kepentingan pembangunan memiliki pemahaman dan berkemampuan mengelola modal pembangunan di wilayahnya. Pada umumnya, pengelolaan perencanaan pembangunan daerah masih bersifat konvensional dan belum menjadikan hasil penelitian, pengembangan, desain, dan inovasi sebagai acuannya. Melalui studi ini diharapkan diperoleh model ideal pengelolaan pembangunan daerah. Penting bagi setiap pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengelola perencanaan dan pembangunan di daerahnya berbasis penelitian, pengembangan, desain, dan inovasi (research-based

planning & research-based development). Direkomendasikan agar pemerintah daerah mengedepankan mekanisme perencanaan yang mengacu kepada hasil penelitian, pengembangan, desain, dan inovasi dalam membangun daerahnya. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat semakin merasakan manfaatnya. Dinamika dan problematika kewilayahan merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dialami oleh semua strata pemerintahan daerah diseluruh Indonesia. Pada hakekatnya, seluruh pemda berdasarkan kewenangan yang dimilikinya senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya. Beragam modal pembangunan yang dimiliki senantiasa dihadapkan pada keterbatasan dan kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sayangnya, belum semua agenda pembangunan didasarkan pada hasil kelitbangan yang mencakup penelitian dan pengembangan disertai desain dan inovasi. Keadaan ini sejatinya menjadi peluang bagi pemda dalam menyusun strategi yang tepat berbasis kelitbangan demi pengelolaan pembangunan dimasing- masing daerah.

Kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan umumnya terlihat dalam kekayaan daerah, pendapatan asli daerah, anggaran, jasa, perdagangan, teknologi serta manajemen SDM. Permasalahan ini dapat diperkecil ketika pihak pemerintah menggunakan manajemen yang baik, untuk itu perlu dibuat model manajemen pemerintahan daerah. Identifikasi masalah dari penelitian ini ialah bagaimana strategi, hambatan dan upaya pembaharuan manajemen pemerintahan daerah melalui pendekatan management back to basic. Salah satu penyebabnya adalah Visi dan Misi Kota belum sepenuhnya dijadikan landasan dalam pelaksanaan pembangunan. Fungsi manajemen melalui manajemen SDM, manajemen perencanaan, manajemen keuangan, manajemen sarana dan prasarana, serta manajemen konflik belum terkelola dengan baik. Bentuk organisasi belum berjalan dengan baik banyak penumpukan penugasan dalam sebuah organisasi (Savira and Suharsono, 2013).

Menurut (Redjo, 2009) transformasi manajemen Pemerintah Daerah merupakan suatu keniscayaan sebagai akibat dari perubahan paradigma pemerintahan dari lokus memerintah ke lokus pelayanan; tuntutan good governance; tuntutan demokratisasi serta dinamika pembangunan dan perubahan sosial baik dalam lingkup lokal, nasional maupun global. Tuntutan dan dinamika tersebut, memaksa manajemen pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam menata pemerintahan melalui proses transformasi yang terencana. Namun, transformasi manajemen pemerintahan tersebut masih belum optimal karena

belum berubahnya orientasi kinerja ke arah pencapaian prestasi serta masih adanya ketergantungan bawahan kepada atasan. Akibatnya, kinerja manajemen pemerintahan Daerah dalam memenuhi tuntutan pelayanan publik yang didasari atas kewajaran, keadilan dan efektivitas belum terwujud.

Hal yang serupa dikatakan Savira and Suharsono (2013) kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan umumnya terlihat dalam kekayaan daerah, pendapatan asli daerah, anggaran, jasa, perdagangan, teknologi serta manajemen SDM. Permasalahan ini dapat diperkecil ketika pihak pemerintah menggunakan manajemen yang baik, untuk itu perlu dibuat model manajemen pemerintahan daerah. Visi dan Misi Kota belum sepenuhnya dijadikan landasan dalam pelaksanaan pembangunan. Fungsi manajemen melalui manajemen SDM, manajemen perencanaan, manajemen keuangan, manajemen sarana dan prasarana, serta manajemen konflik belum terkelola dengan baik. Bentuk organisasi belum berjalan dengan baik banyak penumpukan penugasan dalam sebuah organisasi.

Pada era Orde Baru, perkembangan pembangunan Indonesia memperlihatkan peningkatan yang cukup tinggi di beberapa sektor. Sedangkan, di sektor tertentu, justru menunjukkan rentannya kondisi Indonesia terhadap perubahan dan pengaruh globalisasi. Kondisi tersebut tampak nyata ketika permasalahan (krisis) moneter melanda sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia, di mana kemampuan Indonesia untuk keluar dari krisis amat sulit jika dibandingkan negara tetangga, seperti Thailand dan Malaysia. Salah satu faktor yang menjadi penghambat adalah kemampuan Indonesia melakukan recovery secara sinergi terhadap sektor-sektor tertentu itu, sehingga recovery pada satu sektor tidak diikuti dengan recovery di sektor lainnya. Bahkan, di beberapa aspek, sektor tersebut menjadi pemicu lemahnya kemampuan recovery Bangsa Indonesia. Permasalahan moneter tersebut berdampak pada kemampuan Orde Baru untuk bertahan dan meneruskan rezim tersebut. Bergesernya inti masalah dari ekonomi ke politik mengakibatkan terjadinya pergantian orde, yaitu dari orde baru menjadi orde reformasi.

Orde Reformasi, dalam perjalanannya, mengalami perubahan kepemimpinan yang sangat baik, sekaligus memberi tahu dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang mempunyai kemampuan mengelola politik secara benar. Perubahan ke arah reformasi tata pemerintahan yang baik, menunjukkan titik terang dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari proses pembangunan politik yang berkaitan dengan legitimasi pemerintah melalui pemilihan presiden yang telah berjalan baik. Demikian pula dengan pemilihan gubernur dan bupati serta walikota di

beberapa daerah yang juga berjalan baik, walau masih ditemukan berbagai ketidakpuasan yang dilontarkan berbagai elemen, tapi itulah pembelajaran menuju kedewasaan berpolitik bangsa ini (Siradjuddin, 2021).

1.4 Keberhasilan Pembangunan Daerah

Teuku Nazaruddin dalam Abbas (2020), menegaskan bahwa keberhasilan tujuan pembangunan nasional akan tercapai secara optimal sesuai dengan yang telah dicita-citakan, apabila terdapat perencanaan pembangunan yang cukup baik dalam berbagai aspek kehidupan. Pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan daerah, yang pada hakikatnya menjadi tempat terakumulasinya program-program pembangunan. Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan koordinasi perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desentralisasi fiskal memerlukan pergeseran beberapa tanggung jawab terhadap pendapatan (revenue) dan / atau pembelanjaan (expenditure) ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Faktor yang sangat penting dalam menentukan desentralisasi fiskal adalah sejauh mana pemerintah daerah diberi kewenangan (otonomi) untuk menentukan alokasi atas pengeluarannya sendiri. Faktor lain yang juga penting adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan penerimaan mereka (PAD). Tetapi desentralisasi fiskal tidak semata-mata peningkatan PAD saja tetapi lebih dari itu adalah kewenangan dalam mengelola potensi daerah demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Disisi lain keuangan daerah

adalah sebagai alat fiskal pemerintah daerah, merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, pemeratakan hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi selain stabilitas sosial politik (Sofi, 2020).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sampai pada Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), hal tersebut adalah merupakan tata urutan hierarki yang bersifat bottom up-top down. Sebagaimana juga disebutkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pada umumnya perencanaan pembangunan daerah di Indonesia mengenal empat pendekatan, sebagaimana juga disebutkan di dalam PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010 Pasal 6, di antaranya adalah teknokratis, partisipatif, politis dan top down- bottom up. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bangsa ini harus memiliki sistem perencanaan pembangunan yang jelas, baik untuk tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Untuk mewujudkan sistem tersebut pemerintah telah membentuk musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Melalui Musrenbang inilah dicari apa sebenarnya yang menjadi keinginan dan kebutuhan rakyat. Walau akhirnya lebih banyak keinginan dan kebutuhan yang tidak dapat direalisasikan ke dalam program-program nyata di lapangan, namun sebagai alat adanya mekanisme penjarangan aspirasi rakyat, musrenbang dinilai sebagai mediasi yang masih pantas untuk terus di jalankan. Munculnya isu Good Governance dalam pembangunan di Indonesia didorong oleh adanya dinamika yang menuntut perubahan-perubahan di sisi pemerintah atau pun di sisi warga (Oktaviana Putri, Sirojuzilam and Kadir, 2018).

Perencanaan pembangunan daerah menurut Setianingsih (2015) merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan serta menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. Salah satu aspek penting bagi keberhasilan perencanaan pembangunan daerah adalah terdapatnya badan atau satuan kerja yang baik serta adanya sistem informasi yang mendukung. Aplikasi berbasis sistem informasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah Simrenda. Keberadaan Simrenda diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, sehingga realisasi pembangunan dapat tercapai secara optimal. Otonomi daerah memberikan kewenangan besar kepada pemerintah

daerah untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Hal ini menandakan bahwa terjadi transaksi atau perpindahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adanya pelimpahan wewenang tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilihat bahwa otonomi daerah telah memberikan cara baru dalam proses pemerintahan daerah dengan meletakkan kewenangan dan tanggung jawab yang besar kepada pemerintah daerah. Kewenangan dan tanggung jawab yang besar ini diharapkan mampu memberikan motivasi yang tinggi dalam meningkatkan potensi daerah masing-masing. Otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai semangat mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih mandiri, baik mandiri secara politik maupun finansial. Pemberian kewenangan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan di daerahnya serta memiliki semangat kompetitif yang tinggi dengan daerah lain dalam konteks pembangunan daerah.

Keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan tingkat ketimpangan pendapatan, jika tidak memperhatikan pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat (Sukirno, 2006).

Muhammad Hudori Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri saat membuka secara resmi Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah serta Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Rabu, (17/7/2019) di Hotel Bidakara Grand Pancoran Jakarta, mengatakan bahwa uji publik memiliki arti penting bagi kita semua selain sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan Permendagri. “Acara ini merupakan momentum yang sangat strategis bagi kita semua, mengingat bahwa pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat; kesempatan kerja; lapangan berusaha; akses dan kualitas pelayanan publik; daya saing daerah; serta juga merupakan satu kesatuan dan bagian integral pembangunan nasional.” Lebih lanjut, Hudori mengatakan keberhasilan tujuan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari proses pembangunan daerah yang dimulai dari perencanaan hingga proses penganggaran. Untuk itu, Hudori menilai diperlukan konsistensi perencanaan dan penganggaran

khususnya memaknai arti pembangunan daerah saat ini yaitu daerah sendiri yang membangun daerahnya bukan hanya pusat membangun daerah. “Untuk mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran, dibutuhkan suatu instrumen yang digunakan sebagai jembatan dalam menghubungkan proses tersebut. Kodefikasi dan nomenklatur pembangunan dan keuangan daerah diharapkan dapat menjadi instrumen yang dimaksud,” imbuh Hudori. Akan tetapi, kata Hudori, selain menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, saat ini juga perlu diperhatikan juga berkaitan dengan perkembangan era industri 4.0 di mana pemerintah dituntut untuk bersikap responsif, cepat, serta adaptif terhadap perkembangan zaman (Prameswara, 2020).

Bab 2

Siklus Manajemen Pembangunan

2.1 Pendahuluan

White, (1987), melihat pembangunan sebagai sebuah konsep normatif dan merupakan eufemisme untuk perubahan, modernisasi, dan pertumbuhan. Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi sebuah jargon dan kata kunci untuk segala aspek kehidupan. Pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat dibidang ekonomi.

Mengenai konsep pembangunan banyak diwarnai dari pemikiran dan literatur ekonomi pembangunan, disamping didasarkan pada sumbangan pemikiran dari perspektif sosial. Todaro and Smith (2020), mengatakan bahwa pembangunan adalah proses multidimensional yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Dalam pandangan ekonomi, pembangunan juga sering didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dari

peningkatan pendapatan riil kapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumberdaya (Kartasmita, 1997).

Manajemen pembangunan merupakan proses menuju perbaikan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh dan bersifat dinamis. Dalam perkembangan pembangunan, konsep pembangunan mengandung empat makna (Esman, 1991), yaitu : (1) pembangunan merupakan suatu proses, dalam arti suatu kegiatan yang terus menerus dilaksanakan dan berkesinambungan, (2) pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan, karena dipandang sebagai suatu kebutuhan, (3) pembangunan dilaksanakan secara berencana yang berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan, dan (4) pembangunan terkait dengan dimensi modernisasi, dalam arti sebagai cara hidup yang lebih baik dari sebelumnya.

Pembangunan sebagai sebuah perubahan yang membawa ke arah yang lebih baik butuh perencanaan agar tujuan yang diinginkan tepat sasaran. Perencanaan pembangunan sebagaimana tercantum dalam tujuan bernegara adalah ingin memajukan kesejahteraan umum yang direalisasikan melalui proses pembangunan. Dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 2 menjelaskan perencanaan dalam pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh Kementerian/Lembaga sedangkan dalam perencanaan pembangunan daerah disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Dengan melihat 2 kebijakan tersebut perencanaan pembangunan nasional di dalamnya mengenai esensi dari perencanaan pembangunan yang menentukan arah kebijakan dengan melihat kebutuhan masyarakat melalui alur kegiatan yang sistematis serta melihat sumber daya yang ada.

Dalam hal manajemen pembangunan daerah, permasalahan mendasar yang masih belum teratasi sampai saat ini misalnya keterbatasan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Masih ada ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kucuran dana dari pemerintah pusat. Ketidaksiapan aparatur pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah menjadikan banyak daerah masih kesulitan untuk mencari sumber pembiayaan yang otonom. Kondisi tersebut diperparah dengan fakta bahwa alokasi dana pembangunan daerah dinilai belum tepat sasaran. Di daerah-daerah saat ini, banyak proyek-proyek pembangunan tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan pengembangan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal ini berakibat pada inefisiensi pembiayaan pembangunan. Ini akan memberikan

kontribusi negatif pada keberhasilan pembangunan atau tidak terdapat hubungan signifikan antara peningkatan biaya pembangunan dengan keberhasilan pembangunan yang ditandai dengan pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat (Safi'i, 2009).

2.2 Siklus Manajemen Pembangunan

Siklus manajemen pembangunan merupakan suatu istilah yang digunakan pada proses perencanaan dan pengelolaan proyek atau program dari suatu lembaga atau perusahaan. Siklus manajemen pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses rangkaian dari semua fungsi manajemen yang saling berkesinambungan satu sama lain. Meskipun tiap fungsi manajemen dapat diidentifikasi dari segi aktivitas dan tujuan secara terpisah, akan tetapi dalam pelaksanaannya tiap fungsi manajemen tersebut tidak dapat dipisahkan. Setiap tahap dari siklus tersebut menuntun ke tahap berikutnya. Di bawah ini merupakan bentuk siklus manajemen pembangunan.

Adapun tahap yang berkesinambungan dalam siklus manajemen adalah sebagai berikut :

1. Planning

Tahap awal yang harus dilakukan adalah merencanakan suatu program yang ingin dicapai oleh suatu lembaga atau perusahaan. Planning dilakukan untuk mencapai tujuan atau misi yang diinginkan. Membuat sebuah planning sangat dibutuhkan agar dapat dalam prosesnya sesuai yang diinginkan oleh kita. Menurut (Tripathi, 2006) Definisi planning adalah : “Planning means that managers think of their actions in advance. Their actions are usually based on some method, plan, or logic, rather than on a hunch.” Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa, seorang manajer dalam merencanakan suatu program didasarkan pada beberapa metode, rencana, atau logika, bukan pada dugaan. Jadi, dalam melakukan Planning tidak dilakukan dengan asal-asalan namun, ada landasan yang mendasari planning tersebut. Sebelum melakukan Planning perlu adanya riset lebih lanjut dan mempertimbangkan risiko yang akan ditimbulkan dari Planning tersebut.

2. Organizing

Tahap kedua merupakan pengorganisasian. Pada tahap ini seorang manajer lebih banyak berperan karena pada tahap ini dibutuhkan sosok manajer sebagai seorang leader yang mengorganisir anak buahnya. Menurut Tripathi, (2006) Definisi organizing adalah :“Organizing means that managers coordinate the human and material resources of the organisation.” Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa, seorang manager bertugas untuk mengkoordinasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan menyesuaikannya dengan material yang tersedia. Jadi, dalam melakukan organizing perlu adanya pembagian tugas kepada SDM yang ada dan menyesuaikannya dengan material yang tersedia. Hal tersebut perlu dilakukan agar ketercapaian planning dapat efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan.

3. Actuating

Tahap ketiga merupakan aplikasi atau pelaksanaan dari berbagai planning yang sudah di organizing. Pada tahap ini tiap individu melaksanakan tugas sesuai dengan posisinya. Tanggung jawab dari setiap individu diperlukan dalam tahap ini. Menurut Tripathi, (2006) Definisi actuating adalah : “Actuating means that managers motivate and direct subordinates.” Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa, seorang manajer perlu memotivasi anak buah (staff) yang sedang bekerja sesuai dengan posisinya. Hal tersebut perlu dilakukan agar anak buah merasa diperhatikan sehingga setiap anak buah dapat bekerja maksimal. Jika pekerjaan dapat dilakukan dengan baik dan maksimal maka, planning yang dibuat dapat mendekati keberhasilan.

4. Controlling

Menurut Tripathi, (2006) Definisi controlling adalah : “Controlling means that managers attempt to ensure that there is no deviation from the norm and plan.” Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa, Control disini dimaksudkan untuk membandingkan rencana (plan) dengan hasil (result). Hal tersebut dimaksudkan agar hasil yang diperoleh tidak jauh menyimpang dari apa yang telah direncanakan. Jika rencana yang diperoleh sudah sesuai atau tidak terdapat penyimpangan maka, siklus dapat dilanjutkan dengan membentuk planning yang baru. Apabila rencana (plan) tidak sesuai dengan hasil atau dapat dikatakan terjadi penyimpangan maka, pada tahap inilah dilakukan sebuah control untuk mengevaluasi penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Control disini diharapkan pula dapat dipakai

sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan Planning-planning berikutnya. Agar kesalahan atau penyimpangan yang sama tidak sampai terjadi dua kali.

2.3 Manajemen Pembangunan Daerah

Manajemen perencanaan pembangunan daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya-sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdayasumberdaya swasta secara bertanggungjawab. Pembangunan daerah yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya publik dan sektor swasta-petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi-organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan. Melalui perencanaan pembangunan daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi (economic entity) yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain (Pasaribu, 2009).

2.3.1 Perlunya Perencanaan Pembangunan Daerah

Setelah para ahli, terutama para ekonom, menyadari bahwa mekanisme pasar tak akan mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat terutama di NSB, mereka mulai sadar bahwa campur tangan pemerintah tetap diperlukan, apabila ingin mencapai proses pembangunan yang lebih cepat. Pentingnya campur tangan pemerintah, terutama dalam pembangunan daerah, dimaksudkan untuk mencegah akibat-akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pemakmuran daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati berbagai daerah yang ada. Tentu timbul pertanyaan: sampai sejauh mana campur tangan tersebut?

Keadaan sosial ekonomi yang berbeda dari setiap daerah akan membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah untuk tiap daerah berbeda pula. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah, dan kalau hal ini dibiarkan dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi suatu negara. Gagasan

ini timbul setelah melihat kenyataan bahwa, kalau perkembangan ekonomi diserahkan pada kekuatan mekanisme pasar, biasanya cenderung untuk memperbesar dan bukannya memperkecil ketidakmerataan antardaerah, karena kegiatan ekonomi akan menumpuk di tempat-tempat dan daerah tertentu, sedangkan tempat-tempat atau daerah lainnya akan semakin ketinggalan. Memusatnya ekspansi ekonomi di suatu daerah disebabkan berbagai hal, misalnya kondisi dan situasi alamiah yang ada, letak geografis, dan sebagainya. Ekspansi ekonomi daerah akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan akan pindah ke daerah yang melakukan ekspansi tersebut khususnya migrasi tenaga kerja, biasanya bersifat selektif, akibatnya migrasi itu sendiri pun cenderung untuk menguntungkan daerah-daerah yang sedang mengalami ekspansi ekonomi tersebut dan merugikan daerah-daerah lain (Pasaribu, 2009)

Perpindahan modal cenderung menambah ketidakmerataan. Di daerah-daerah yang sedang berkembang, permintaan barang/jasa akan mendorong naiknya investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerah-daerah yang kurang berkembang, permintaan akan investasi rendah karena pendapatan masyarakat yang rendah. Sernua perubahan untuk daerah-daerah yang dirugikan yang timbul karena adanya ekspansi ekonomi di suatu daerah disebut *backwash effect* (Myrdal, 1957).

Di samping adanya pengaruh yang kurang menguntungkan bagi daerah lain sebagai akibat dari adanya ekspansi ekonomi pada daerah tertentu, ada juga keuntungan bagi daerah-daerah di sekitar di mana ekspansi ekonomi terjadi; misalnya terjualnya hasil produksi daerah, adanya kesempatan kerja baru, dan sebagainya. Pengaruh yang menguntungkan karena adanya ekspansi ekonomi suatu daerah ke daerah sekitarnya dinamakan *spread effects*. Andaikata *spread effects* ini lebih besar dibandingkan dengan *backwash effects* tentu tidak menjadi masalah. Namun kenyataannya di daerah-daerah miskin, *spread effect* yang terjadi jauh lebih kecil daripada *backwash effects* yang dialami sehingga secara keseluruhan ekspansi ekonomi daerah kaya akan memperlambat pembangunan daerah miskin. Akibatnya tentu dapat diduga bahwa jurang kesejahteraan antara kedua daerah tersebut akan semakin melebar.

Sesuai dengan pendapat Myrdal di atas, Hirschman and Lindblom, (1962) juga mengemukakan bahwa jika suatu daerah mengalami perkembangan, maka perkembangan itu akan membawa pengaruh atau imbas ke daerah lain. Menurut Hirschman, daerah di suatu negara dapat dibedakan menjadi daerah kaya dan miskin. Jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin menyempit berarti

terjadi imbas yang baik (trickling down effects). Sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin jauh berarti terjadi proses pengkutuban (polarization effects)

2.3.2 Akibat Pembangunan Daerah di Wilayah Miskin

Akibat-akibat yang kurang menguntungkan baik bagi daerah-daerah terbelakang maupun daerah-daerah maju dan pada akhirnya justru dapat mengganggu kestabilan ekonomi negara secara keseluruhan.

Akibat-akibat yang kurang menguntungkan bagi daerah-daerah miskin adalah:

1. Daerah-daerah miskin tersebut akan mengalami kesulitan dalam membangun sektor industrinya dan dalam memperluas kesempatan kerja. Penduduk akan berkembang lebih cepat, sehingga pendapatan per kapita penduduk akan semakin rendah dan kemudian akan diikuti dengan semakin banyaknya pengangguran.
2. Daerah-daerah miskin tersebut akan sulit merubah struktur ekonominya yang tradisional, sehingga senantiasa akan bias ke arah pertanian. Sedangkan untuk membangun sektor industri dihadapi banyak kesulitan, seperti kurangnya pengusaha yang kreatif dan kurangnya tenaga terampil.
3. Karena sempitnya kesempatan kerja di daerah miskin tersebut maka akan terjadi perpindahan tenaga kerja ke daerah maju, terutama tenaga kerja yang masih muda, yang berjiwa dinamis, dan yang mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga yang tetap tinggal di daerah miskin hanya tenaga kerja yang produktivitasnya rendah.

Di pihak lain kelompok yang setuju dengan campur tangan pemerintah dalam pembangunan daerah mengemukakan pendapat-pendapat yang mendukung gagasan mereka, yakni:

1. Bila perekonomian dikendalikan oleh mekanisme pasar, akan timbul keadaan yang menghambat perkembangan ekonomi di daerah yang terbelakang dengan akibat, keseluruhan wilayah negara tidak berkembang secara harmonis.
2. Dalam mekanisme pasar keputusan tentang lokasi kegiatan ekonomi lebih banyak didasarkan pada metode coba-coba (trial and error). Pengusaha tidak selalu mengetahui keadaan pasar yang sebenarnya, sehingga tidak semua keputusan yang diambil merupakan keputusan

yang tepat dan efisien. Secara teoritis akhirnya akan dapat diambil keputusan yang tepat akan tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan kata lain mekanisme pasar belum tentu pada akhirnya menciptakan efisiensi yang optimal dalam menentukan kegiatan ekonomi.

3. Campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan oleh daerah-daerah yang baru berkembang, mengingat efisiensi kegiatan ekonomi masih rendah, sehingga kurang sanggup bersaing dengan daerah-daerah yang sudah maju. Namun sifatnya sementara, jika daerah tersebut sudah dapat berkembang dan bekerja secara efisien, diharapkan akan mengembangkan diri dengan baik tanpa bantuan dari pemerintah.
4. Menghemat pengeluaran pemerintah untuk pembangunan daerah di masa yang akan datang. Proses pembangunan yang sedang berjalan di suatu daerah sebagai akibat adanya campur tangan pemerintah, akan mendorong pembangunan daerah sekitar. Dengan demikian mendorong adanya ekspansi kegiatan ekonomi pada berbagai daerah pada waktu yang bersamaan. Tindakan seperti itu di samping membantu pembangunan daerah yang terbelakang, sekaligus dapat menghindari permasalahan yang dihadapi oleh daerah-daerah yang sudah maju.
5. Mengingat tujuan pembangunan bukan hanya semata mata bersifat ekonomi, tetapi juga bersifat sosial politik. Jika kegiatan ekonomi hanya berpusat pada satu daerah, akan membawa masalah yang cukup rumit. Daerah yang bersangkutan akan mengalami kesesakan yang dapat menimbulkan banyak masalah, terutama masalah sosial. Untuk menanggulangi masalah tersebut pemerintah harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Permasalahan di atas akan dapat diatasi jika proses pembangunan tidak terpusat hanya pada satu daerah, melainkan tersebar ke seluruh daerah. Pembangunan daerah yang miskin dapat mengurangi kecepatan perkembangan di daerah-daerah maju, dengan akibat dapat mengurangi masalah-masalah sosial yang akan dihadapi di kemudian hari. Pembangunan daerah di samping dapat mempertahankan dan melestarikan kebudayaan daerah, di pihak lain karena penduduk tidak lari ke daerah-daerah lain, mereka dapat mengembangkan kebudayaan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa campur tangan pemerintah (perencanaan) untuk pembangunan daerah-daerah mempunyai manfaat yang sangat tinggi, di samping mencegah jurang kemakmuran antar

daerah, melestarikan kebudayaan setempat, dapat juga menghindarkan perasaan tidak puas masyarakat. Kalau masyarakat sudah tenteram, dapat membantu terciptanya kestabilan dalam masyarakat terutama kestabilan politik, padahal kestabilan dalam masyarakat merupakan syarat mutlak jika suatu negara hendak mengadakan pembangunan negara secara mantap (Pasaribu, 2009).

2.4 Pendekatan Manajemen Pembangunan

Berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi, perencanaan pembangunan terdiri dari : (a) perencanaan makro; (b) perencanaan sektoral; (c) perencanaan regional, dan (d) perencanaan mikro.

Perencanaan pembangunan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Dalam perencanaan makro ini dikaji berapa pesat pertumbuhan ekonomi dapat dan akan direncanakan, berapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah akan tumbuh, bagaimana proyeksinya, dan hal-hal lainnya secara makro dan menyeluruh. Kajian ini dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu rencana, dengan memperhitungkan berbagai variabel ekonomi mikro. Perencanaan makro ini dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan secara cermat keterkaitannya dengan perencanaan sektoral dan regional (Nursini, 2010).

Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Yang dimaksud dengan sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya. Pembagian menurut klasifikasi fungsional seperti sektor, maksudnya untuk mempermudah perhitungan-perhitungan dalam mencapai sasaran makro. Sektor-sektor ini kecuali mempunyai ciri-ciri yang berbeda satu sama lain, juga mempunyai daya dorong yang berbeda dalam mengantisipasi investasi yang dilakukan pada masing-masing sektor. Meskipun pendekatan ini menentukan kegiatan tertentu, oleh instansi tertentu, di lokasi tertentu, faktor lokasi pada dasarnya dipandang sebagai tempat atau lokasi kegiatan saja. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan perencanaan lainnya yang terutama bertumpu pada lokasi kegiatan (Nursini, 2010).

Perencanaan dengan dimensi pendekatan regional menitikberatkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di suatu daerah. Departemen/lembaga pusat dengan visi atau kepentingan yang bertitik berat sektoral melihat "lokasi untuk kegiatan", sedangkan pemerintah daerah dengan titik berat pendekatan pembangunan regional (wilayah/daerah) melihat "kegiatan untuk lokasi". Kedua pola pikir itu bisa saja menghasilkan hal yang sama, namun sangat mungkin menghasilkan usulan yang berbeda. Pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan daerah mengupayakan pendayagunaan ruang di daerahnya, mengisinya dengan berbagai kegiatan (jadi sektoral) sedemikian rupa sehingga menghasilkan alternatif pembangunan yang terbaik bagi daerah tersebut. Pilihan daerah terhadap alternatif yang tersedia dapat menghasilkan pertumbuhan yang tidak optimal dari sudut pandang sektor yang melihat kepentingan nasional secara sektoral. Berbagai pendekatan tersebut perlu dipadukan dalam perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari pembangunan sektor-sektor di berbagai daerah, dan pembangunan daerah/wilayah yang bertumpu pada sektor-sektor. Perencanaan mikro adalah perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan, yang merupakan penjabaran rencana-rencana baik makro, sektoral, maupun regional ke dalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya. Keterkaitan perencanaan sektoral, makro dan regional dapat dilihat pada Gambar 2.1



Gambar. 2.1: Koordinasi Perencanaan Pembangunan (Nursini, 2010)

Gambar 2.1 menjelaskan bahwa perencanaan makro merupakan perencanaan terbesar yang menaungi perencanaan sektoral, regional dan perencanaan mikro.

Keempat bentuk perencanaan tersebut saling berkaitan dan dapat disampaikan dalam 4 metode perencanaan yaitu: (i) pendekatan Rasional, (ii) Perencanaan Partisipatif, (iii) perencanaan advokasi, dan (iv) Perencanaan Komunikatif.

2.5 Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah

Tahap pertama perencanaan bagi setiap organisasi yang tertarik dalam pembangunan ekonomi daerah adalah menentukan peran (role) yang akan dilakukan dalam proses pembangunan. Ada 4 peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator bagi lahirnya inisiatifinisiatif pembangunan daerah Entrepreneur. Dengan Perannya sebagai entrepreneur, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri (BUMD).

Aset-aset pemerintah daerah harus dapat dikelola dengan lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.

1. Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perluasan dari peranan ini dalam pembangunan ekonomi bisa melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi Ekonomi, misalnya tingkat kesempatan kerja, angkatan kerja, pengangguran, dan sebagainya. Dalam perannya sebagai koordinator, pemerintah daerah bisa juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-sasaran ekonomi, rencana-rencana dan strategi-strategi. Pendekatan ini sangat potensial dalam menjaga konsistensi pembangunan daerah dengan nasional (pusat) dan menjamin bahwa perekonomian daerah akan mendapatkan manfaat yang maksimum daripadanya.

2. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal di daerahnya. Ha! ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (zoning) yang lebih baik.

3. Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan memengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut. Stimulasi ini dapat dilakukan dengan cara antara lain: pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan Outlets untuk produk-produk industri kecil, membantu industri-industri kecil melakukan pameran (Pasaribu, 2009)

2.6 Informasi Yang Dibutuhkan Dalam Manajemen Pembangunan Daerah

1. Data Kependudukan

Data kependudukan yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah struktur penduduk (hierarchy of age grouping) yang dikaitkan dengan tingkat pekerjaan (employment, umur, pendapatan, dan distribusi penduduk menurut pekerjaan selama kurang lebih 10 tahun yang terakhir; dan burden of dependency ratio. Tujuan analisis kependudukan ini adalah untuk menentukan karakteristik penduduk pada suatu daerah karena karakteristik penduduk tersebut berkaitan dengan vitalitas masyarakat dan untuk menaksir target penduduk untuk kegiatan ekonomi yang diinginkan.

2. Kondisi Pasar

Tenaga Kerja Data yang berkenaan dengan kondisi pasar tenaga kerja antara lain: informasi tentang distribusi pekerjaan menurut jenis kelamin pada setiap industri, informasi tentang pengangguran dan setengah pengangguran setiap sektor industri paling selama 5 tahun terakhir. Pola pekerjaan dalam suatu masyarakat akan menunjukkan apakah sumberdaya manusia tersedia atau dibutuhkan untuk

pembangunan ekonomi clan berapa jumlah angkatan kerja yang membutuhkan bantuan.

3. Karakteristik Ekonomi

Data ekonomi yang diperlukan antara lain: basis ekonomi suatu daerah, perubahannya, clan responsnya terhadap perubahan keadaan ekonomi baru; selain kondisi ekonomi masa lalu clan sekarang, faktor-faktor yang memengaruhi vitalitas ekonomi juga perlu untuk dikaji. Pemahaman yang baik terhadap struktur ekonomi merupakan tahap yang esensial dalam merancang program pembangunan ekonomi jangka panjang.

4. Kondisi Fisik/Lokasional

Data yang diperlukan untuk kondisi fisik ini meliputi kajian tentang kondisi clan bentuk fisik dari suatu daerah yang berhubungan dengan basis ekonominya, termasuk penilaian tentang sumberdaya fisik (pertanian, pertambangan, clan sebagainya), ketersediaan lahan untuk kawasan industri, jaringan transportasi clan komunikasi, persediaan perumahan, dan juga aset yang dapat digunakan untuk daerah tujuan wisata. Pendokumentasian terhadap aset-aset lokasional (dan "liabilities") membantu kita dalam mengidentifikasi keunggulan ekonomi daerah (dan kelemahannya).

5. Layanan Jasa bagi Masyarakat

Data tentang jasa-jasa pelayanan sosial, pendidikan, rekreasi, clan budaya yang tersedia bagi masyarakat juga diperlukan. Jasa-jasa pelayanan tersebut akan menambah daya tarik daerah sebagai tempat untuk hidup dan bekerja (Pasaribu, 2009).

Bab 3

Perencanaan Pembangunan

3.1 Pendahuluan

Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya dan untuk mencapai tujuannya pasti memiliki perencanaan. Tanpa perencanaan yang baik, maka tujuan yang diinginkan tidak akan tercapai dengan efisien dan efektif. Demikian halnya dengan negara dan pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya pasti memiliki perencanaan, baik perencanaan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Pada dasarnya perencanaan adalah tugas pokok atau faktor utama dari proses manajemen. Perencanaan pembangunan adalah tugas pokok dari manajemen pembangunan. Tanpa perencanaan pembangunan, maka manajemen pembangunan tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

Perencanaan pembangunan dibutuhkan antara lain disebabkan terbatasnya sumber-sumber daya pembangunan, kemampuan dan ruang dan waktu yang dimiliki, sehingga dengan perencanaan pembangunan dapat dirumuskan kegiatan dan program prioritas yang akan dilakukan berdasarkan potensi sumber daya, kemampuan, ruang dan waktu yang dimiliki. Perencanaan pembangunan adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan yang tersedia yaitu program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang akan dicapai dan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada hakikatnya, dasar dari perencanaan pembangunan adalah tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang akan dicapai akan mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan disusun. Sanjaya (2015) menyatakan bahwa perencanaan selalu dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan analisis kebutuhan serta dokumen yang lengkap, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika merencanakan sesuatu, maka kegiatan dan program yang akan dilakukan ditujukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan efektif dan efisien.

3.2 Pengertian Perencanaan

Sebelum sampai pada pengertian perencanaan pembangunan, maka terlebih dahulu dirumuskan pengertian perencanaan. Perencanaan berasal dari kata dasar rencana. Rencana adalah segala sesuatu yang akan dilakukan. Perencanaan adalah proses untuk menentukan segala sesuatu yang akan dilakukan.

Agar terdapat kesepatan, maka berikut disajikan beberapa definisi perencanaan yang diajukan para pakar perencanaan sebagai berikut:

- a. Hasibuan (2003) menyatakan perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada.
- b. Siagian (2003) mendefinisikan perencanaan yaitu keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
- c. Abe (2001) memberi arti perencanaan sebagai susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.
- d. Handoko (2001) menjelaskan pengertian perencanaan yaitu pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.
- e. Uno (2006) berpendapat bahwa perencanaan adalah hubungan antara apa yang ada sekarang (what is) dengan bagaimana seharusnya (what

should be) yang bertalian dengan kebutuhan penentuan tujuan, prioritas program, dan alokasi sumber.

Dengan demikian yang dimaksud dengan perencanaan adalah pemilihan sesuatu hal yang akan dilakukan dari berbagai pilihan yang tersedia dengan memperhitungkan potensi dan kemampuan serta sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Berbicara tentang perencanaan tidak terlepas dari 5W dan 1 H seperti yang diungkapkan oleh Terry (2009) sebagai berikut:

- a. Apa (what) yang diperlukan? jawabannya menunjukkan jenis dan jumlah kegiatan yang berkaitan dengan peralatan yang dibutuhkan.
- b. Siapa (who) yang akan mengerjakannya. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui jenis keterampilan dan pengalaman yang ada untuk dapat melaksanakan pekerjaan yang sudah direncanakan dengan baik.
- c. Mengapa (why) harus dikerjakan? Pertanyaan ini mengungkapkan urgensi (keadaan yang mendesak) daripada pekerjaan tersebut.
- d. Di mana (where) apa yang dikerjakan? Disini ditekankan pada pertimbangan yang tepat. Di kantor, di lapangan, di kantor cabang, yang pada lokasi mana pekerjaan itu akan dilakukan.
- e. Kapan (when) pekerjaan tersebut akan dilakukan dan kapan akan berakhir. Dalam hal ini akan pertimbangan masalah waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan sehingga dapat disusun jadwal dan kegiatan operasionalnya.
- f. Bagaimana (how) melaksanakan pekerjaan. Hal ini menyangkut bagaimana cara untuk menyelesaikan pekerjaan.

3.3 Pengertian Pembangunan

Pembangunan berasal dari kata dasar bangun yang artinya bangkit. Pembangunan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan untuk melakukan perubahan sosial ekonomi ke arah yang lebih baik. Pembangunan adalah segala sesuatu yang bersifat dinamis, bukan statis. Hal ini disebabkan pembangunan selalu mengalami perubahan dari yang belum ada menjadi ada, dari yang belum bagus menjadi lebih bagus lagi. Dengan demikian pembangunan mengandung arti perubahan tanpa akhir.

Beberapa pengertian pembangunan yang diajukan oleh para ahli sebagai berikut:

- a. Nugroho dan Dahuri (2004) menyatakan pembangunan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.
- b. Siagian (2003) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.
- c. Listyaningsih (2014) memberi arti pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju arah yang lebih baik.
- d. Supardi (1994) menyatakan pembangunan adalah proses sosial yang bersifat integral dan menyeluruh, baik berupa pertumbuhan ekonomi maupun perubahan sosial demi terwujudnya masyarakat yang lebih makmur.
- e. Kartasasmita (1996) mengartikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pembangunan adalah usaha sadar yang dilakukan seseorang atau kelompok orang ke arah yang lebih baik dengan mengerahkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Siagian (2003), menyatakan bahwa ide pokok pembangunan mengandung makna sebagai berikut:

- a. Bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang tanpa akhir
- b. Pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan secara terus menerus
- c. Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan
- d. Pembangunan mengarah kepada modernitas
- e. Modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multidimensional, proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Demikian halnya dengan pendapat Tjokroamidjojo (1995) yang menyimpulkan bahwa ada beberapa makna pembangunan yaitu:

- a. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik
- b. Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga
- c. Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (value free)
- d. Pembangunan memperoleh sifat dan konsep transendental, sebagai meta-disciplinary phenomenon bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, the ideologi of developmentalism
- e. Pembangunan sebagai konsep yang syarat nilai (value loaded) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat
- f. Pembangunan menjadi culture specific, situation specific, and time specific.

Selanjutnya, Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat dari 3 (tiga) hal sebagai berikut:

- a. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs),
- b. Meningkatkan rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia, dan
- c. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude).

Pembangunan akan berhasil apabila masyarakatnya bisa hidup sejahtera. Hal ini disebabkan bahwa pembangunan adalah proses perubahan terencana yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat atau sekelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses pembangunan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan baik pada level makro (nasional), maupun mikro (kelompok masyarakat). Dengan pembangunan diharapkan ada pertumbuhan dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat.

3.4 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah fungsi manajemen pembangunan yang pertama dan sangat fundamental bagi pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah dasar atau pedoman dalam melaksanakan pembangunan. Tanpa perencanaan pembangunan maka pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik.

Pengertian perencanaan pembangunan dapat dihimpun berdasarkan pendapat para pakar sebagai berikut:

- a. Listyaningsih (2014) mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.
- b. Riyadi dan Bratakusumah (2005) menyatakan perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.
- c. Soekartawi (1990) memberi arti perencanaan pembangunan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan (policy) dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun secara sistematis.
- d. Lewis (1994) mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia lebih produktif.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dengan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik melalui pengerahan potensi dan sumber daya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, menurut Nitisastro (2010) hal-hal yang tercakup dalam perencanaan pembangunan adalah:

- a. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Atas dasar nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.
- b. Pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien dan rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Selanjutnya, manfaat perencanaan pembangunan menurut Tjokroamidjojo (1995) yaitu:

- a. Adanya pengarahan kegiatan, pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan pada pencapaian tujuan pembangunan.
- b. Perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan tidak hanya dilakukan mengenai potensi dan prospek perkembangan, tetapi juga mengenai hambatan dan risiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan agar ketidakpastian dapat dibatasi seminimal mungkin.
- c. Adanya kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.
- d. Dapat dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan dari segi pentingnya tujuan, sasaran, maupun kegiatan usahanya.
- e. Adanya alat pengukur untuk mengadakan pengawasan dan evaluasi.
- f. Penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas secara lebih efisien dan efektif. Diusahakan dihindarinya keborosan-keborosan. Suatu usaha untuk mencapai output/hasil secara maksimal dari sumber-sumber yang tersedia.
- g. Perkembangan ekonomi yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus dapat ditingkatkan.
- h. Stabilitas ekonomi, menghadapi siklus konjungtur akan tercapai.

Perencanaan pembangunan dapat saja mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Menurut Ginanjar (1996), kegagalan dalam perencanaan pembangunan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan yang tidak tepat mungkin disebabkan informasi yang kurang lengkap, metodologi yang belum dikuasai, atau perencanaan sejak awal yang tidak realistis sehingga tidak dapat

terlaksana. Dalam hal terakhir ini, pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.

- b. Perencanaannya baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. Dengan demikian, kegagalan terjadi karena tidak ada keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaannya. Penyebabnya adalah aparat pelaksana yang tidak siap atau tidak kompeten, atau rakyat tidak mempunyai kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.
- c. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan semakin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, faktor kesalahan bukan perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
- d. Perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia hingga hal yang paling kecil. Hal tersebut menyebabkan perencanaan tidak memberikan kesempatan bagi perkembangan prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).

3.5 Jenis-jenis Perencanaan Pembangunan

Sesungguhnya, ada beberapa jenis-jenis perencanaan pembangunan yaitu perencanaan pembangunan jangka panjang yaitu 20 tahun, menengah 5 tahun, dan jangka pendek yaitu 1 tahun. Menurut Arsyad (2001), perencanaan pembangunan dibagi atas 3 (tiga) jenis yaitu: a) perencanaan pembangunan jangka panjang, b) perencanaan pembangunan jangka menengah, dan c) perencanaan pembangunan jangka pendek.

a. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang.

Perencanaan pembangunan jangka panjang adalah dasar dari semua jenis perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan jangka panjang sifatnya agak abstrak yang selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam

perencanaan jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan jangka panjang saat ini memiliki durasi hingga 20 tahun berbeda halnya pada zaman orde baru yang menetapkan perencanaan jangka panjang hingga 25 tahun yaitu melalui Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Perencanaan pembangunan jangka panjang adalah perencanaan yang bersifat strategik yang memandang jauh ke depan tentang hal-hal yang akan dicapai selama 20 tahun ke depan. Oleh karena itu perencanaan jangka panjang sifatnya lebih makro dan menyeluruh dan belum sampai pada tataran program dan kegiatan. Perencanaan jangka panjang meliputi seluruh kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, politik, budaya dan pertahanan keamanan Negara. Perencanaan jangka panjang akan diturunkan menjadi 4 (empat) tahapan perencanaan jangka menengah yang disebut dengan rencana jangka menengah pertama, kedua, ketiga dan keempat.

b. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah.

Perencanaan pembangunan jangka menengah biasanya memiliki durasi 5 (lima) tahun. Durasi ini sangat tergantung pada masa jabatan presiden, kepala daerah atau unit organisasi tertentu.

Perencanaan pembangunan jangka menengah adalah turunan dari perencanaan pembangunan jangka panjang. Hal ini mengandung arti bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah tidak boleh bertentangan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang.

Perencanaan pembangunan jangka menengah lebih bersifat operasional, jika dibandingkan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang. Di tingkat satuan kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perencanaan pembangunan jangka menengah dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis OPD yang menjadi dasar untuk melakukan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun.

c. Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek

Perencanaan pembangunan jangka pendek umumnya memiliki durasi 1 (satu) tahun. Perencanaan pembangunan jangka pendek adalah penjabaran dari perencanaan pembangunan jangka menengah. Perencanaan pembangunan jangka pendek memiliki program dan kegiatan yang lebih terukur yang langsung diiringi dengan pendanaan setiap program dan kegiatan yang memiliki indikator dan target yang akan dicapai secara kuantitatif dan kualitatif.

Perencanaan pembangunan jangka pendek adalah merupakan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat daerah. Di tingkat satuan kerja perencanaan pembangunan jangka pendek dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus dijadikan dasar untuk melakukan program dan kegiatan OPD setiap tahunnya.

3.6 Tahapan Dalam Perencanaan Pembangunan

Pada dasarnya ada 4 (empat) tahapan perencanaan pembangunan yang dilakukan sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Tahap ini adalah awal dari proses penyusunan naskah atau rancangan perencanaan pembangunan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk tingkat pusat, dan Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk tingkat daerah.

Sebagai perwujudan dari perencanaan partisipatif dan asas demokrasi, maka sebelum sampai pada tahap penyusunan naskah atau rancangan perencanaan pembangunan, maka dilakukan penjangkaran aspirasi dan keinginan/kebutuhan masyarakat tentang visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah pembangunan. Setelah dilakukan penjangkaran aspirasi masyarakat, lalu tim penyusunan perencanaan pembangunan menyusun rancangan awal dokumen perencanaan pembangunan. Rancangan awal dokumen perencanaan pembangunan yang telah disusun lalu dimusyawarahkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang sering disebut dengan istilah Musrenbang. Adapun tujuan Musrenbang adalah untuk mendapatkan masukan saran maupun kritik dari masyarakat dan stakeholders (pihak yang berkepentingan) seperti tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, alim ulama dan sebagainya

b. Tahap Penetapan Rencana

Setelah naskah atau dokumen yang telah mendapatkan masukan dalam Musrenbang, maka naskah dan dokumen perencanaan pembangunan

ditetapkan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah (DPR) untuk nasional dan Kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) untuk tingkat daerah.

c. Tahap pengendalian pelaksanaan rencana

Setelah perencanaan pembangunan mendapatkan pengesahan, maka selanjutnya dilakukan tahap pengendalian pelaksanaan rencana. Perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan kemudian dilaksanakan oleh satuan organisasi atau eksekutif baik di tingkat nasional maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat daerah. Sejalan dengan tahap pelaksanaan perencanaan pembangunan, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) untuk menjamin pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.

d. Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana

Setelah selesai pelaksanaan perencanaan pembangunan, kemudian dilakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana oleh BAPPENAS maupun BAPPEDA. Hal ini dimaksudkan untuk melihat dan mengukur capaian kinerja masing-masing satuan kerja maupun OPD yang telah melaksanakan perencanaan pembangunan. Tujuan utama evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana ini adalah untuk melihat apakah perencanaan pembangunan sudah benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan dan taraf hidup masyarakat sebagai objek pembangunan.

Bab 4

Penganggaran Pembangunan

Dalam

4.1 Pendahuluan

Era reformasi mengamanatkan perubahan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan melibatkan partisipasi masyarakat. Sejak disahkannya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN) dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN).

Setiap pemerintah daerah dalam mempertahankan keberlanjutan pembangunan ekonomi daerahnya diharapkan membawa dampak yang menguntungkan bagi penduduk daerah sehingga perlu memahami bahwa manajemen pembangunan daerah dapat memberikan pengaruh yang baik guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang diharapkan (Munthe et al, 2021). Perencanaan adalah kunci penting untuk memulai sebuah program. Pada saat perencanaan, pilihan-pilihan dibuat, langkah-langkah disusun untuk memandu agar kehendak bisa digenggam pada waktu yang telah digariskan (Pudjianto, 2019).

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah, wajib membuat perencanaan yang menjadi bagian dari siklus atau mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi jelas, perencanaan adalah bagian dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks pembangunan, perencanaan disusun dalam program-program. Perencanaan organisasi harus kreatif, dinamis, dan berkesinambungan. Artinya, tidak boleh kaku, tetapi penyusun rencana mesti piawai membaca perkembangan zaman, bukan cuma dalam konteks daerah, tapi juga nasional bahkan global. Perencanaan kegiatan pembangunan yang baik tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan anggaran. Sebab, anggaran merupakan instrumen penting untuk mencapai tujuan bernegara.

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintah, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran.

Tahap perencanaan dan penganggaran pembangunan didasarkan pada sejumlah undang-undang, yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN), UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (UU Desa), beserta peraturan turunannya seperti peraturan menteri. Undang-undang tersebut beserta turunannya mempunyai filosofi yang berbeda dalam memaknai proses perencanaan pembangunan.

Dalam bab ini akan dibahas tentang materi penganggaran dalam pembangunan secara lebih detil dalam kaitannya dengan manajemen pembangunan daerah yang dibahas di bab-bab awal buku ini.

4.2 Penganggaran

4.2.1 Pengertian dan Fungsi Penganggaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrument kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian, serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara (Rahajeng, 2016).

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Blocher (2005) mendefinisikan anggaran sebagai ekspresi formal mengenai rencana aksi dimasa mendatang (budget is a formal expression of plans for future plans). Hal ini berarti anggaran yang disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah tidak terlepas dari perencanaan kegiatan yang telah disusun sebelumnya yang berjangka menengah dan panjang. Secara umum, penganggaran dapat didefinisikan sebagai suatu cara atau metode yang sistematis untuk mengalokasikan sumberdaya-sumberdaya, terutama sumber daya keuangan dan merupakan aktivitas utama dari organisasi pemerintahan. Penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk satuan uang yang merupakan refleksi dari aktivitas dan target kinerja yang hendak dicapai dalam suatu periode tertentu (Mardiasmo, 2002).

Penganggaran merupakan estimasi kerja untuk merumuskan strategi dan rencana strategis, mulai dari perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran keuangan negara, dalam jangka waktu satu tahun. Hasil dari penganggaran tersebut yakni anggaran, sebagai alat utama kebijakan fiskal pemerintah. Penganggaran merupakan proses penentuan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti sarana dan prasarana, kesehatan, dan pendidikan. Hasilnya berupa anggaran yang digunakan eksekutif hanya untuk menjalankan pemerintahannya sehingga kondisi sosial dan ekonomi berkembang dan terjamin kesinambungannya (Gudban, 2017).

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan pengertian anggaran sebagai berikut:

1. Merupakan informasi atau pernyataan
2. Mengenai rencana atau kebijaksanaan bidang keuangan
3. Dari suatu organisasi atau badan usaha
4. Untuk suatu jangka waktu tertentu (umumnya 1 tahun).
5. Yang diharapkan akan terjadi pada suatu periode tertentu.

Dari pengertian anggaran di atas maka dapat diketahui beberapa fungsi anggaran yaitu:

1. Instrumen Politik; anggaran adalah salah satu instrumen formal yang mewujudkan bargaining eksekutif dengan tuntutan kebutuhan publik yang diwakili oleh legislative.

2. Instrumen Kebijakan Fiskal; dengan mengubah prioritas sebesar alokasi dana, anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memberikan fasilitas, dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi serta pemerataan hasil-hasilnya.
3. Instrumen Perencanaan; di dalam anggaran disebutkan tujuan yang ingin dicapai, biaya, dan hasil yang diharapkan dari setiap kegiatan pada masing-masing unit kerja.
4. Instrumen Pengendalian; dalam anggaran berisi rencana penerimaan dan pengeluaran secara rinci setiap unit kerja. Hal ini dimaksudkan agar unit kerja tidak melakukan overspending, underspending atau mengalokasikan anggaran pada bidang yang lain.

Menurut Halim dan Iqbal (2019), ada beberapa fungsi utama penyusunan anggaran, yaitu antara lain:

1. Menentukan penerimaan dan pengeluaran
2. Membantu dalam membuat kebijakan dan perencanaan
3. Mengesahkan pengeluaran yang akan datang
4. Menjadikan dasar pengendalian pendapatan dan pengeluaran
5. Sebagai standar dalam evaluasi kerja
6. Sebagai motivasi manajer dan karyawan
7. Mengkoordinir kegiatan dari berbagai macam tujuan.

4.2.2 Sistem dan Siklus Penganggaran

Sistem penganggaran adalah suatu tatanan yang logis, sistematis, dan baku yang terdiri dari tata kerja, pedoman kerja, dan prosedur kerja untuk menyusun anggaran dan saling berkaitan serta saling keterkaitan.

Jenis sistem penganggaran terdiri dari:

1. *Line Item Budgeting*, adalah penyusunan anggaran yang dilaksanakan kepada dan dari mana itu berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran).
2. *Incremental Budgeting*, sistem ini menggunakan revisi anggaran pendapatan dan belanja tahun berjalan untuk menentukan anggaran tahun yang akan datang. Sekali suatu pos pengeluaran muncul di dalam anggaran, maka selamanya pos tersebut ada pada anggaran periode

berikutnya dengan perubahan/kenaikan yang didasarkan dari jumlah yang dianggarkan pada periode sebelumnya. Titik perhatian adalah marginal atau selisih incremental antara anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya, bukan pada anggaran secara menyeluruh. Alasan diterapkannya sistem anggaran incremental ini adalah bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran yang sebelumnya merupakan kegiatan yang harus diteruskan pada tahun berikutnya.

3. *Planning Programming Budgeting System* (PPBS), adalah suatu proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terikat dalam suatu sistem sebagai satu kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah dan di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi, permasalahan yang mungkin timbul dalam pencapaian tujuan, proses pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang diperlukan dalam pencapaian tujuan dan proses pertimbangan implikasi keputusan terhadap berbagai kegiatan di masa yang akan datang.
4. *Zero Base Budgeting* (ZBB), adalah anggaran yang dibuat berdasarkan pada sesuatu yang sedang dilakukan dan merupakan sesuatu yang baru, dan tidak berdasarkan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu. Setiap kegiatan dilihat sebagai sesuatu yang mandiri dan bukan merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dilakukan.
5. *Performance Budgeting System* (PBS), adalah cara penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja dan yang berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Sistem penyusunan ini tidak hanya didasarkan kepada apa yang dibelanjakan saja, tetapi juga didasarkan kepada tujuan-tujuan/rencana-rencana tertentu yang untuk pelaksanaannya perlu disusun oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan biaya/dana yang dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien.

Siklus anggaran adalah masa atau jangka waktu dimulai saat anggaran disusun dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Lamanya siklus anggaran tergantung pada keadaan, anggaran sesuatu tahun siklusnya

tidak sama dengan anggaran tahun berikutnya dan berakhir siklus anggaran tahun pertama bukan merupakan titik awal siklus anggaran tahun kedua. Tahun anggaran adalah masa satu tahun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran itu atau waktu di mana anggaran tersebut akan dipertanggungjawabkan.

Ada beberapa tahap-tahap dalam siklus anggaran, yaitu:

1. Tahap Penyusunan Anggaran
2. Tahap Pengesahan Anggaran
3. Tahap Pelaksanaan Anggaran
4. Tahap Pengawasan
5. Tahap Pengesahan Perhitungan Anggaran

4.2.3 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Dalam UU SPPN disebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara itu, pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

SPPN bertujuan untuk:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi antardaerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah serta antara pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam UU SPPN juga dikenal tiga ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional, yaitu Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang memuat visi misi rencana pembangunan 20 tahun. Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang merupakan turunan atas RPJP untuk rencana pembangunan lima tahun. Ketiga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rencana kerja tahunan pemerintah dengan berpedoman pada RPJMN. Bappenas atau Kementerian Perencanaan Pembangunan

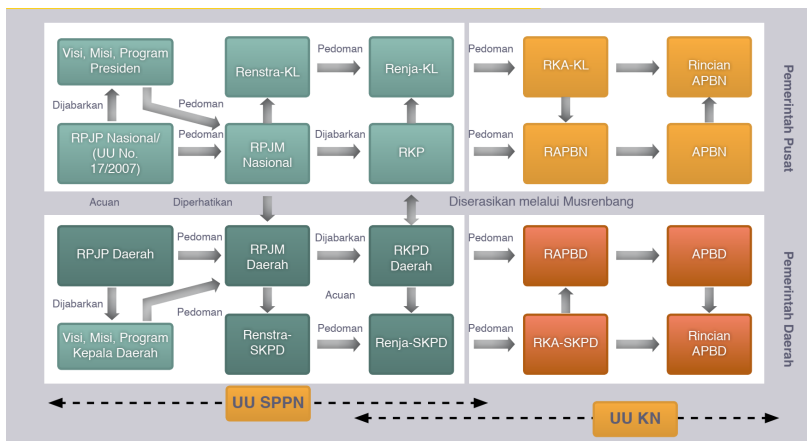
Nasional memiliki peran sentral dalam merumuskan ketiga dokumen perencanaan pembangunan nasional tersebut.

Tidak berbeda dengan sistem perencanaan pembangunan di tingkat nasional, perencanaan pembangunan di tingkat daerah juga terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. SPPN mengamanatkan adanya sinergisitas perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah.

Perencanaan pembangunan di Indonesia diatur dalam beberapa produk hukum yang berbeda. Peraturan yang menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan di Indonesia antara lain:

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
4. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
5. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Dapat dilihat pada Gambar 4.1 di bawah ini bahwa tahapan perencanaan dan penganggaran di Indonesia saling terhubung dan memengaruhi satu sama lain. Alur pada diagram tidak mengalami perubahan sejak UU KN dan UU SPPN ditetapkan pada 2003 dan 2004. Selain itu, dapat dilihat bahwa—idealnya—penganggaran seharusnya merupakan refleksi dari program pemerintah yang telah disusun dalam dokumen perencanaan. Namun pada kenyataannya, sinergi perencanaan dan penganggaran tidak semudah dan sesederhana itu.



Gambar 4.1: Alur Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia (Kementerian Keuangan, 2013)

4.2.4 Sistem Penganggaran Pembangunan Nasional

Dalam kerangka pembangunan nasional, sistem penganggaran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU SPPN yang menyatakan bahwa salah satu tujuan disusunnya sistem perencanaan pembangunan nasional adalah untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Kendati demikian, sistem penganggaran hingga saat ini tidak diatur secara terintegrasi dalam satu peraturan perundang-undangan yang utuh. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, UU SPPN tidak memuat ketentuan yang mengatur tentang penganggaran pembangunan.

Siklus anggaran pembangunan nasional setidaknya terbagi dalam lima tahap, yaitu: 1) perencanaan anggaran, 2) penetapan anggaran, 3) pelaksanaan anggaran, 4) pelaporan dan pencatatan anggaran, serta 5) pemeriksaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Dalam praktiknya, setiap tahapan dalam siklus anggaran ini memiliki irisan dengan tahun anggaran sebelum dan sesudahnya. Sebagai contoh, tahap pelaksanaan dan pelaporan anggaran tahun 2017 beririsan dengan tahapan perencanaan dan penetapan anggaran tahun 2018, serta beririsan dengan tahap pemeriksaan anggaran tahun 2016 (Kemenkeu, 2013).

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dan dasar hukum dalam proses penganggaran nasional adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

4.3 Perencanaan Pembangunan Daerah

4.3.1 Pengertian Perencanaan

Istilah perencanaan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi, sudah biasa terdengar dalam pembicaraan sehari-hari. Akan tetapi, perencanaan diartikan berbeda-beda dalam berbagai literatur yang berbeda. Conyers & Hills (1994) mendefinisikan perencanaan sebagai "suatu proses yang berkesinambungan", yang mencakup "keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan atas berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang".

Definisi tersebut mengedepankan 4 (empat) unsur dasar perencanaan, yaitu:

1. Pemilihan, "merencanakan berarti memilih", perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan, karena tidak semua yang diinginkan itu dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan.
2. Sumber daya, perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Penggunaan istilah sumber daya, menunjukkan segala sesuatu yang dianggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Sumber daya mencakup sumber daya manusia; sumber daya alam (tanah, air, hasil tambang, dan sebagainya); sumber daya modal dan keuangan. Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan

tentang bagaimana sumber daya yang tersedia itu digunakan sebaik-baiknya.

3. Tujuan, perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh seorang perencana adalah bahwa tujuan-tujuan mereka kurang dapat dirumuskan secara tepat. Sering kali tujuan-tujuan tersebut didefinisikan secara kurang tegas, karena kadang kala tujuan-tujuan tersebut ditetapkan oleh pihak lain.
4. Waktu, perencanaan mengacu ke masa depan. Salah satu unsur penting dalam perencanaan adalah unsur waktu. Tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan berkaitan dengan masa depan.

Perencanaan strategik adalah proses menentukan tujuan-tujuan organisasi dan memutuskan program-program tindakan menyeluruh yang akan diambil untuk mencapai tujuan organisasi. Rencana strategik mencakup keputusan-keputusan pokok mengenai arah organisasi yang akan diambil serta strategi yang bakal digunakan. Perencanaan strategik lebih bersifat konseptual dibandingkan dengan perencanaan jangka menengah atau jangka pendek. Sedangkan pada perencanaan jangka menengah (operational planning) umum berkaitan dengan program tertentu yang direncanakan dalam menerapkan rencana strategik. Perencanaan jangka pendek sering direpresentatif dalam bentuk anggaran (budget) dan biasanya berdimensi waktu tahunan.

Ditinjau dari karakteristik perencanaan strategik, ada 5 (lima) ciri pokok perencanaan strategik, yaitu:

1. Perencanaan strategik memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, seperti: "apakah jenis layanan/jasa yang diberikan dan seharusnya diberikan?"
2. Perencanaan strategik merupakan kerangka dasar yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk penyusunan rencana yang lebih rinci dan pengambilan keputusan harian/operasional. Jika seorang manajer harus mengambil keputusan semacam itu, ia dapat mengajukan pertanyaan "dari alternatif yang ada, manakah yang paling konsisten dengan strategi kita?"

3. Perencanaan strategik memiliki kurun waktu yang lebih panjang daripada jenis perencanaan lain.
4. Perencanaan strategik membantu organisasi untuk mengarahkan sumber dayanya pada kegiatan yang mempunyai prioritas tinggi.
5. Perencanaan strategik merupakan kegiatan tingkat atas, artinya pucuk pimpinan harus terlibat secara aktif. Karena hanya pucuk pimpinan yang memiliki pandangan yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan semua aspek organisasi dan karena komitmen dari pucuk pimpinan sangat diperlukan untuk menumbuhkan dan mendukung komitmen dari bawah.

Perencanaan pembangunan menjamin berlangsungnya proses pembangunan secara terus-menerus. Hal ini hanya dapat terjadi apabila di dalam usaha perencanaan tersebut faktor strategis proses pembangunan telah benar-benar dikuasai. Dengan demikian yang hanya dapat dijamin apabila telah diketahui dengan jelas apa sajakah yang merupakan faktor strategis proses pembangunan dalam suatu sumber daya masyarakat tertentu. Perencanaan pembangunan tersebut juga diartikan sebagai suatu hal yang mutlak untuk terlebih dahulu memahami secara mendalam hakikat proses pembangunan sebelum dapat menentukan cara pendekatan yang akan menjamin berhasilnya usaha perencanaan secara matang (Damanik et al, 2021).

4.3.2 Perencanaan Daerah

Menurut Haryanto (2008), Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran. Selama ini perencanaan dan penganggaran belum memiliki landasan aturan yang memadai. Sistem perencanaan nasional yang terintegrasi dari daerah sampai pusat selama ini juga belum memiliki landasan aturan yang bersifat mengikat. Digulirkannya kebijakan otonomi daerah dan dihapuskannya GBHN (Garis Besar Haluan Negara) yang selama ini dijadikan landasan dalam perencanaan, membawa implikasi akan perlunya kerangka kebijakan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional yang bersifat sistematis dan harmonis. Hal inilah yang menjadi landasan dikeluarkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SP2N).

Reformasi pengelolaan keuangan negara dengan terbitnya 3 (tiga) paket undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disertai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara, mengisyaratkan terjadinya perubahan yang mendasar terhadap perencanaan dan penganggaran di daerah.

Perubahan yang terkandung dalam undang-undang tersebut, antara lain:

- a) Bahwa perencanaan program kerja dan kegiatan menjadi satu kesatuan dengan perencanaan anggaran, sehingga program kerja dan kegiatan yang direncanakan akan sesuai dengan kemampuan pembiayaan yang tersedia. Oleh karena itu perencanaan jangka menengah daerah harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan pembiayaan jangka menengah atau medium term expenditure framework (MTEF).
- b) Mengisyaratkan kepada seluruh dinas, badan, lembaga, dan kantor melaksanakan program kerja dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing instansi/lembaga ditiap tingkat pemerintahan.
- c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikelola berdasarkan prestasi kerja/anggaran kinerja, yang berarti program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan APBD harus dirumuskan secara jelas dan terukur, apa output dan outcome-nya.

Mengacu pada substansi amanat yang terkandung dalam UU 32/2004, UU 25/2004 serta memperhatikan UU 17/2003, perencanaan daerah ditinjau dari dimensi waktunya terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD): merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Dokumen perencanaan tersebut bersifat makro, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai masa bakti kepala daerah terpilih. RPJMD disusun berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah. Program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah, dengan mempertimbangkan

kemampuan/kapasitas keuangan daerah. RPJMD wajib disusun oleh daerah yang telah memiliki kepala daerah hasil pemilihan langsung (PILKADA)

3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD); adalah dokumen perencanaan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dalam rangka mengoperasionalkan RPJMD sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah. Renstra-SKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan Standar Pelayanan Minimal, dengan materi dan substansi utama memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada tingkat SKPD. Setiap SKPD berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah, dengan tidak mengabaikan tingkat kinerja pelayanan/pembangunan yang sudah dicapai pada periode sebelumnya.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); merupakan rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah. RKPD wajib disusun oleh daerah sebagai landasan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dokumen RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Disamping itu, RKPD berfungsi sebagai pedoman penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja-SKPD).
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD); merupakan dokumen rencana pembangunan masing-masing SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun. Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (indikator), hasil, dan keluaran yang terukur, beserta rincian pendanaannya.

Bab 5

Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia

5.1 Pengantar

Penyerahan wewenang pada penguasa wilayah buat menata serta bertanggung jawab pada aspek profesi biasa, kesehatan, pembelajaran, kultur, pertanian, perhubungan, pabrik, serta perdagangan, penanaman modal, area hidup, pertanahan, koperasi serta daya kegiatan ialah keterkaitan dari kebijaksanaan desentralisasi serta independensi wilayah yang diatur dalam UU. 32 tahun 2004, sebaliknya dalam aspek pertahanan keamanan, peradilan, moneter, pajak serta agama sedang jadi wewenang penguasa pusat. dari kondisi di mana sebutan itu dipakai dalam memandang kondisi. Pembangunan pada dasarnya tidak bisa di lepaskan hubungannya dengan kondisi Negeri yang lagi membuat itu sendiri. Banyak perkara yang dialami oleh negeri Indonesia dalam upaya tingkatan keselamatan masyarakatnya (Lasmarita Nugra Gesty*, 2016). Pembangunan ekonomi di Indonesia ialah perihal yang “berusia lanjut” bisa dibilang kalau “pembangunan” menggambarkan kunci yang memastikan hidup matinya bangsa Indonesia. Di Indonesia permasalahan masyarakat terkategori amat sungguh-sungguh disamping ialah Negeri yang relatif belum aman dengan cara ekonomi bila dibanding dengan negeri orang sebelah. Kepadatan masyarakat pula amat besar serta kemajuan masyarakat yang terkategori amat kilat. Penerapan

pembangunan ditunjukkan buat melajukan pemerataan pembangunan dengan metode tingkatan pemanfaatan potensi- potensi yang dipunyai dengan cara maksimal. Dalam melakukan bermacam aktivitas yang berhubungan dengan penerapan wilayah khusus membutuhkan bayaran yang lumayan besar.

Oleh sebab itu, melangsungkan pembangunan ekonomi di negeri Indonesia ialah sesuatu kebutuhan yang amat menekan, ialah buat menanggulangi permasalahan kekurangan, pengangguran, tingkatan keselamatan warga serta memuat kebebasan dalam aspek politik dengan pembangunan ekonomi. Pada dikala ini, banyak para pemikir- pemikir ekonomi yang membagikan partisipasi pemikirannya dalam bermacam pandangan hal pembangunan ekonomi buat di lakukan di Indonesia. Negeri Indonesia kayaknya terus menjadi mengetahui kalau tidak terdapat jalur pintas buat melaksanakan pembangunan ekonomi yang terlantar serta tunagrahita selaku dampak kolonialis belanda serta jepang yang sudah berjalan demikian lama. Sedikit untuk sedikit tetapi tentu, Indonesia mulai mengetahui kalau kebebasan politik saja tanpa dibarengi.

Mengenang rancangan perkembangan ekonomi selaku dorong ukur evaluasi perkembangan ekonomi nasional telah terlanjur dipercayai dan diaplikasikan dengan cara besar, hingga kita tidak bisa tertinggal serta ingin tidak ingin pula wajib berupaya menekuni hakekat serta sumber- sumber perkembangan ekonomi itu. Perkembangan serta Pembangunan ekonomi mempunyai arti yang berlainan, ialah perkembangan ekonomi yakni cara ekskalasi output perkapita yang lalu menembus dalam waktu jauh. Perkembangan ekonomi tersebut ialah salah satu penanda kesuksesan pembangunan. Dengan demikian kian tingginya pertumbuhan ekonomi umumnya kian besar pula keselamatan warga, walaupun ada penanda yang lain ialah penyaluran pemasukan. Sebaliknya pembangunan ekonomi yakni upaya tingkatan pemasukan per jiwa dengan jalur memasak daya ekonomi potensial jadi ekonomi riil lewat penanaman modal, pemakaian teknologi, akumulasi wawasan, kenaikan ketrampilan, akumulasi keahlian berorganisasi serta manajemen (Nursetiawan, 2018). Alhasil semenjak lahirnya Ilmu Administrasi serta manajemen, para akademikus yang mempelajarinya sudah serta lalu berupaya melaksanakan bermacam riset dalam bagan penumpukan wawasan serta filosofi mengenai cara manajemen, tercantum mengenai fungsi- fungsi manajemen. Perihal ini dicoba dalam aplikasi penerapan pembangunan di Indonesia.

5.2 Pengertian Pembangunan

Pembangunan ialah usaha yang sistematis serta berkelanjutan buat banyak aspek lain. dengan kebebasan ekonomi tidak hendak banyak maksudnya. Ketidakstabilan politik hendak membatasi perkembangan ekonomi, tetapi kebalikannya ketergantungan di aspek ekonomi bisa memunculkan kerawanan politik di dalam negara. Dari bagian pembuatan modal, Nurke (1963) mengatakan terdapatnya suatu bundaran setan (*vicious circle*) yang menimbulkan Indonesia tidak sanggup menggulirkan ekonomi di atas kemampuannya sendiri. Dari mata kaitan jeleknya tingkatan pemasukan, dilanjutkan, dilanjutkan dengan ketidakmampuan menyisihkan dana serta rendahnya kapasitas pembuatan modal dan efisiensi yang kecil. Antrean terakhir mata kaitan itu merupakan rendahnya pemasukan perkapita masyarakat yang dengan sendirinya dilanjutkan dengan rendahnya dana (Indonesian Bank, 2015).

Pembangunan ialah cara multidimensional yang mencakup pergantian bentuk sosial, pergantian dalam tindakan hidup warga serta pergantian dalam kelembagaan(institusi) nasional. Pengembangan ekonomi lokal bermaksud buat meningkatkan ekonomi sesuatu area yang berkepanjangan dengan memaksimalkan eksploitasi pangkal energi lokal untuk perkembangan ekonomi area, kenaikan keselamatan warga, penurunan kesenjangan dampingsi golongan warga, dampingsi zona serta dampingsi area Michael P Todaro nyaris senantiasa mengidentikkan Bumi Ketiga(*tercantum indonesia*) dengan daya produksi pangkal energi orang yang kecil, kekurangan, perkembangan masyarakat yang besar, tidak demokratis, aristokratis serta mengarah militeristik, pasar yang tidak sempurna, ataupun standar hidup yang kecil (Todaro and Smith, 2014). Begitulah bundaran tanpa putus yang menantang ahli- ahli ekonomi pembangunan dalam merumuskan exit strategy, saat sebelum mendesak mereka mengejar negara- negara yang lebih maju. Sebab seperti itu, dari wawasan hendak filosofi itu. Kita dapat memandang dalam asal usul pembangunan Indonesia di mana pada tahun 1960- an, penguasa Indonesia mulai membela kepada pemodal asing dengan arti supaya terdapat pembuatan modal yang lebihh bagus serta lebih banyak di Indonesia. Yang esoknya di harapkan tingkatan pemasukan per jiwa bertambah serta warga mempunyai keahlian buat menyimpan uang yang lebihh bagus serta diharapkan bisa menyudahi kaitan kekurangan. Dalam khasanah ilmu ekonomi pembangunan, terdapat keadaan jadi amat populer serta bertumbuh sehabis perang bumi 2, Roy F. Harrod serta

Evsey Domar ilustrasinya. 2 ahli ekonomi yang membuat filosofi tiap- tiap ini, nyata tidak dapat dibiarkan dalam asal usul. Buah pikiran dalam filosofi Harrod-Domar berpusat dalam satu statment berarti kalau kunci perkembangan ekonomi terdapat pada pemodalan. Dengan begitu, ada ekspektasi kepada ekskalasi pemasukan warga serta kapasitas produktif yang senantiasa berkait dengan persoalan seberapa besar laju ekskalasi pemodalan.

Walaupun tidak bebas dari kritik situ mari, Harrod- Domar dikira memecahkan adat- istiadat Keynesian yang melalaikan variable- variabel waktu jauh, biarpun sedang bertugas dengan kerangka dasar berasumsi yang diletakkan Keynes, spesialnya hal anggapan full employment. Serta lebih berarti dari itu merupakan kalau bentuk Harrod- Domar sudah member gagasan pada ilmuwan- ilmuwan lain untuak membuat kemajuan filosofi perkembangan modern yang seluruhnya menaruh aspek modal serta pemodalan pada posisi vital dalam kenaikan pemasukan, kapasitas penciptaan serta employment. Kita dapat memandang dengan cara sejenak, kalau di Negeri bertumbuh, keinginan pemodalan umumnya memanglah lebih besar dari keahlian warga membuat dana. Karenanya, aduk tangan penguasa jadi telak di perlukan apabila pengganti yang di seleksi merupakan perluasan angsuran perbankan dengan tingkatan kaum bunga subsidi. Bisa jadi sedikit menyimpang dengan bentuk Harrod- Domar yang tidak memasukan elastis aduk tangan penguasa. Kita pula dapat memandang relevansi untuk Indonesia pada cetak biru Repelita. Di mana pembangunan Indonesia dibangun jadi zona industrialisasi serta membela pemodalan megah. Namun zona itu berdiri pada pertanian di mana sektor itu ialah zona favorit Indonesia kala itu. Serta memanglah terjalin, kala zona pertanian itu berkembang hingga zona yang lain hendak jadi terdukung. Semacam pariwisata serta yang lain. Tetapi belum seluruh di area Indonesia telah balance, Serta perihal yang terjalin di Indonesia di mana pembangunan pada dasarnya merupakan susunan ketidakseimbangan(disequilibrium). Dengan cara simpel, pola pikir kemajuan tidak berbanding ini menyangkal keharusan pemodalan dengan cara megah buat memompa tiap sector ekonomi yang mempunyai pola ikatan komplementer. Dengan membuat rasio prioritas pemodalan yang pas, perekonomian hendak berkeliling lalu serta hendak berjalan menggunakan eksternalitas ekonomi ataupun social overhead capital.

Pembangunan ialah sesuatu wujud upaya yang dicoba oleh penguasa buat memakmurkan orang. Dalam arti lain pembangunan ialah metode yang dicoba oleh penguasa dengan berkelanjutan serta mencakup semua kehidupan warga, bangsa serta Negeri buat menciptakan tujuan nasional. Dalam bumi yang terus

menjadi bertumbuh ini, pembangunan ialah perihal telak yang wajib dilaksanakan. Perkembangan sesuatu Negeri, salah satunya bisa diamati dari gimana pembangunan yang terdapat di dalamnya. Pasti, pembangunan di mari hendak salah bila cuma dimaknai selaku pembangunan raga. Sebaiknya kita cermati kalau pembangunan dikala ini seolah cuma menciptakan utopia. Pembangunan yang dilaksanakan tidak mencermati situasi serta keinginan warga sendiri, ataupun dalam tutur lain pembangunan sepanjang ini ialah produk kekuasaan rencana- rencana penguasa provinsi atau kabupaten saja. Kesimpulannya pembangunan cuma menjadikan warga selaku subjek bukan selaku poin, selaku pemirsa bukan selaku pemeran. Persoalan yang bisa jadi teapt buat perihal ini, merupakan apakah betul pembangunan betul- betul buat orang serta bermaksud memakmurkan orang?

Dengan cara simpel bisa kita lihat, gimana cetak biru megah yang digalangkan penguasa, dengan terus menjadi banyaknya penanam modal yang masuk, dalam bagan membuat, justru berekor jauh untuk pandangan hidup, style hidup serta kultur yang terdapat dalam warga. Pembangunan sedikit- demi sedikit menghilangkan gimana kultur warga dan pola interaksi yang terjalin. Nilai- nilai, pandangan hidup style hidup serta kultur yang terdapat dalam warga ialah kaca dari gimana warga itu, Serta wujud dan pola perekonomian yang terdapat membagikan akibat dengan cara analitis buat keadaan itu tercipta, sampai setelah itu perekonomian berputar pengaruhi gimana nilai- nilai, pandangan hidup, style hidup serta kultur.

Pola dasar Pembangunan Nasional meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan bangsa dan mewujudkan pembangunan nasional. Dalam pola dasar juga ditandakan bahwa pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia¹. Pembangunan yang dilakukan bangsa Indonesia meliputi berbagai bidang kehidupan di antaranya idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dalam era global dewasa ini, bidang ekonomi telah menempatkan diri dalam perkembangan yang sangat pesat, seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan Pembangunan tersebut dilakukan dengan menggunakan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Syahza and Suarman, 2013). Oleh sebab itu perkembangan tersebut memaksa manusia baik secara individu atau kelompok untuk senantiasa berkompetisi dalam kaitannya dengan hidup dan kehidupan, khususnya dalam kegiatan perekonomian yang semakin ketat dan berkompetisi dewasa ini.

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakekatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud disini adalah sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan pada umumnya. Sifat tidak kekal tersebut, selalu meliputi dan menyertai manusia, baik secara pribadi, maupun ia dalam kelompok atau dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan.

Masuknya pembangunan dengan corak hawa pasar leluasa pada area warga, amat berakibat kepada hawa perekonomian yang terjalin pada warga. Pasar leluasa dengan ciri- cirinya yang individualistik di bagian lain membuat profit pembangunan raga, namun disisi lain mudarat pembangunan warga. Warga pedesaan serta konvensional yang mempunyai kecondongan sama, sering jadi korban gimana pembangunan dengan corak pasar leluasa semacam ini. Hawa pasar leluasa yang jadi akhir cengkal pembangunan membagikan kesempatan untuk para penanam modal buat menanamkan modalnya. Di mari butuh dipusatkan kalau penanam modal yang menancapkan modal tentulah berambisi bisa mengeruk profit serta meraup hasil dari modalnya itu. Terus menjadi banyak modal yang diinvestasikan, terus menjadi besar pula impian hendak profit yang diperoleh(Ni Luh Putu Wiagustini et all., 2017). Cara- cara semacam inilah yang mengubah kondisi, di mana banyak orang dengan keahlian hidup kecil, yang tidak sedia dengan hawa semacam itu, hendak kian dipinggirkan jadi budak- budak di negara sendiri, jadi penyakit- penyakit di area tempat lahirnya. Minimnya kesertaan warga dalam pembangunan yang terjalin, merupakan fakta gimana pembangunan itu sukses dengan cara raga, namun kandas buat terus menjadi memakmurkan warga.

Dibangunnya infrastruktur- infrastruktur, generator daya listrik, perusahaan- perusahaan transnasional justru tidak profitabel warga bagus dengan cara badaniah ataupun akhlak, justru malah menghasilkan warga terus menjadi terbebani. Tidak hanya perihal itu, yang terjalin sepanjang ini, merupakan pola pembangunan untuk warga yang tidak mencermati faktor- faktor lain paling utama kemampuan warga itu sendiri. Tidak optimalnya pelibatan warga dalam formulasi pembangunan dan sangat passivnya organisasi- organisasi yang mengelola warga ialah salah satu karena kenapa pembangunan yang terdapat tidak dialami akibat positifnya oleh warga. Perihal inilah yang menyebabkan pembangunan tidak sesuai dengan area area, wawasan dan kemampuan yang dipunyai oleh warga.

Setelah itu, berekor para anak muda, bagus yang sedang sekolah ataupun selaku angkatan kegiatan lebih memilah buat evakuasi ke kota jadi kalangan urban

ataupun apalagi bertugas di luar negara jadi daya kegiatan. Perihal ini diakibatkan tidak terdapatnya alun- alun kegiatan yang pas ataupun kemampuan mereka tidak cocok dengan pola perekonomian yang terdapat dalam warga. Sementara itu di kota juga mereka serupa saja, apalagi tanpa terdapatnya kemampuan yang dipunyai, sangat juga cuma jadi pegawai. Mereka inilah yang dikala kembali ke warga justru sering mengganggu aturan warga yang terdapat(Maryono, 2015). Pembangunan memanglah sama dengan pembaharuan, namun pembangunan wajib mencermati situasi sosial adat warga yang dibentuk. Janganlah hingga dengan dibentuk, malah terus menjadi membuat warga kian tersingkirkan. Olehnya pembangunan wajib ditunjukan buat memaksimalkan kemampuan, wawasan dan ketrampilan dengan memadankan antara kebutuhan warga serta peranan penguasa. Janganlah hingga menunggu warga jadi lembu memerah memeras para penanam modal. Marilah kita bangun diri sendiri, membuat area serta membuat negeri bersama- sama.

5.3 Pola Pembangunan

Berbagai pandangan serta riset itu sudah menciptakan bermacam pengelompokan fungsi- fungsi manajemen itu. Hendak namun, terbebas dari berbagai macam macam pengelompokan itu para akademikus sudah akur kalau pada dasarnya totalitas fungsi- fungsi manajemen bisa digolongkan pada 2 tipe penting, ialah guna organik serta guna cagak. Yang terkategori pada tipe guna organik merupakan totalitas guna penting yang telak butuh dicoba oleh para administrator dalam bagan pendapatan tujuan serta bermacam target yang sudah diresmikan tadinya(Marfiani, Hartoyo and Manuwoto, 2018). Fungsi- fungsi organik itu ialah pemaparan kebijaksanaan dasar ataupun strategi badan yang sudah diresmikan serta wajib dipakai selaku dasar berperan. Berdialog hal pembangunan Indonesia pastinya tidak hendak terbebas dari ikatan serta kondisi dari negeri itu sendiri. Dari kondisi itu lah kita bisa memandang sepanjang mana pembangunan ini bisa berjalan dengan cara sebaiknya, Indonesia sendiri memanglah kerap kali tersendat dengan banyak perkara terpaut kenaikan keselamatan masyarakatnya. Karenanya pembangunan Indonesia paling utama dalam aspek ekonomi ini merupakan perihal yang harus ditingkatkan serta difokuskan dalam sebagian tahun ke depan. Perihal itu supaya bisa menanggulangi bermacam perkara semacam kekurangan, pengangguran sampai tingkatan keselamatan dengan cara global. Buat melaksanakan

pembangunan ekonomi dibutuhkan banyak pandangan ataupun aspek yang bisa dicoba. Aspek ini kita hendak untuk jadi 2 ialah aspek ekonomi serta aspek nonbekonomi. Perkembangan ekonomi merupakan sesuatu” cara”, bukan sesuatu cerminan ekonomi pada sesuatu dikala ataupun yang membuktikan terdapatnya perekonomian bertumbuh ataupun berganti dari durasi ke durasi di mana penekanannya pada perkembangan ataupun pergantian itu sendiri. Pergantian ekonomi berhubungan dengan” Output Perkapita”, terdapat 2 bagian yang butuh dicermati disini ialah bagian output keseluruhan(GDP) serta bagian jumlah penduduknya. Output perkapita merupakan output keseluruhan dipecah jumlah masyarakat. Pandangan ketiga dari arti perkembangan ekonomi merupakan perspektif durasi waktu jauh (Rahayu and Budi, 2013).

Pola- pola pembangunan dikala ini, memantulkan gimana warga dalam menyikapi kekayaan ataupun kemampuan ekologi- lingkungan dekat, buat modal dalam pembangunan, disamping perannya sebagai pengemudi dan pengontrol itme alam, alhasil menentukan stabilitas dinamika hubungan antara sesama dan alam dekat. Di sisi itu, keseimbangan tatanan alam, juga dapat dibangun dan tercipta dari perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi (IPTEKS), yang dikembangkan untuk mempermudah manusia mengeksplere lebih jauh kekayaan atau potensi tatanan ekologi- lingkungan dengan seluruh konsekuensinya. Oleh sebab itu, format amatan ilmu lingkungan memiliki kedudukan penting dalam mengetahui, merefleksikan dan mengevaluasi dinamika pembangunan itu, sertamampu menentukan langkah kedepan, yang mengarah pada penyeimbang alam yang komprehensif dan integratif, baik secara ekologis maupun non ekologis. Kajian pustaka(Library Research) dan pengamatan intensif(Depth- Observations), yang digunakan untuk menganalisa kontens dari fenomena ekologis maupun non ekologis, alhasil elaborasi ataupun kerja sama keilmuan amat diperlukan dalam menguasai gairah aturan ekologis ataupun non ekologis, terpaut terdapatnya cara pembangunan yang lalu berjalan (Astirin, 2016). Asumsi mengenai hubungan manusia dengan alam tidak akan tercapai keseimbangan atau harmonisasi, bilamana paradigma pembangunan yang dibangunnya tidak mencerminkan atau merepresentasikan pada kaidah-kaidah ekologis yang berlaku. Oleh karena itu, kerusakan demi kerusakan ekologis terus mengalami peningkatan dengan tahap yang semakin mengkwatirkan, yang tentunya dapat mengarah pada tahap kerusakan non ekologis (konflik sosial, ekonomi, budaya, politik, bahkan agama), bilamana tiadanya solusi yang strategis dan alternatif, dalam meresponnya secara adaptif dan persuasive (Cahyandito, 2016).

Buat mengenali pengelompokan wilayah didasarkan pada 2 penanda penting ialah perkembangan ekonomi serta pemasukan ataupun produk dalam negeri regional bruto per jiwa. Dengan memastikan pada umumnya produk dalam negeri regional bruto(PDRB) per jiwa selaku sumbu mendatar, sebaliknya wilayah per kabupaten dipecah jadi 4 kalangan ialah kabupaten yang kilat maju serta kilat berkembang, kabupaten maju tetapi terhimpit, kabupaten yang bertumbuh kilat serta kabupaten yang relatif terabaikan(Drajat Kartono and hanif Nurcholis, 2016). Paradigma pembangunan, pastinya jadi atensi bersama dalam memandang serta menelaah dengan cara menyeluruh, terpaut gimana pola pembangunan saat ini seolah sudah menghindar dari penyeimbang alam. Sepanjang ini, ketidakseimbangan area ataupun alam, jika dibedah serta dianalisis hendak membagikan suatu khasanah ataupun menghasilkan warna yang energik, terpaut dengan butuh tidaknya suatu metodologi yang sanggup menjembati dualitas keilmuan yang lalu berjalan dalam perjalanannya. Titik temu, pastinya susah dicoba, kala perbincangan hal kejadian yang terjalin tidak silih memuat, namun silih mempersalahkan(RICAS EKA MUKTI, 2019). Oleh sebab itu sinergitas dalam membuat paradigma yang keseimbangan amat diperlukan dalam era saat ini serta kedepan. Ilmu ilmu lingkungan, saat ini hadapi suatu perkembangan cepat, bersamaan dengan perkembangan kasus yang timbul dengan akibat yang dibawahnya, disamping itu kajiannya telah membidik pada bermacam perspektif dengan cara menyeluruh.

Dalam pola pembangunan, pada masa 1998 sehabis referomasi terjalin pergantian pola pemograman serta penerapan pembangunan di Indonesia, di mana pola“ maksimum down” yang pada masa sistem terkini dengan GBHN dilaksanakan dengan cara sentralistik. Pasti dalam perihal ini terdapat plus kurang yang bisa kita cermati dari pola itu, dalam pola“ maksimum down” optimalisasi keinginan wilayah mulai dari pemograman hingga penerapan tidak terselenggara dengan bagus. Alhasil bila diamati di wilayah banyak situasi“ out put” pembangunan itu tidak di maanfaatkan, sebab pola yang dilakuakn dengan cara sentralistik. Misalnya pembangunan gedung KUD(Koperasi bagian Dusun), pada sebahagian wilayah gedung fisiknya tidak dipakai dengan sebagian factor ialah: posisi tidak penting, keinginan wilayah belum pada gedung raga, serta tindakan warga yang tidak sepakat dengan gedung itu. Pasti perihal ini dicoba sebab pada era itu dengan sentralistik, di mana pembangunan wajib dilaksanakan cocok pola pusat. Alhasil pergantian pola dengan“ Button Up” pemograman serta penerapan di samakan dengan keinginan dari dasar ataupun wilayah. Usulan aktivitas dicoba dengan keinginan serta penguasa

pimpinan melaksanakan pengesahan, perihal ini lebih membuktikan optimalisasi hasil serta *outcome* nya.

Alhasil dengan pola ini pembangunan ekonomi wilayah merupakan sesuatu cara di mana penguasa wilayah serta masyarakatnya mengatur sumberdaya-sumberdaya yang terdapat serta membentuk sesuatu pola kemitraan antara penguasa wilayah dengan zona swasta buat menghasilkan sesuatu alun- alun kegiatan terkini serta memicu perkembangan aktivitas ekonomi dalam area itu. Permasalahan utama dalam pembangunan wilayah merupakan terdapat pada pengepresan kepada kebijakan- kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri wilayah yang berhubungan(*endogenous development*) dengan memakai kemampuan sumberdaya orang, kelembagaan, serta sumberdaya raga dengan cara local. Perihal ini lebih dikuatkan oleh Hukum Dusun yang menggenggam andil berarti dalam usaha percepatan pembangunan dusun di Indonesia. Regulasi itu mendesak aturan rezim dusun yang lebih partisipatif dan keikutsertaan warga dusun yang lebih aktif dalam pembangunan di dusun (Gamaliel Hirung Ding, DB. Paranoan, 2014).

5.4 Implementasi Pembangunan

Pembangunan ekonomi nasional hendak terjalin pada tiap wilayah serta perekonomian wilayah inilah tulang punggung perekonomian Indonesia. Kesuksesan pembangunan ekonomi wilayah ialah salah satu dosis untuk kesuksesan independensi wilayah. Sayangnya, sangat tidak hingga dikala ini warga tercantum penguasa lebih terpicat pada soal- soal penjabatan finansial antara penguasa pusat dengan penguasa wilayah, serta amat sedikit atensi mengenai membangun ekonomi wilayah. Tidak sangat kelewatan kalau sangat tidak buat sebagian dasawarsa ke depan, bila kita berketetapan batin buat membuat ekonomi wilayah, hingga tidak terdapat opsi lain melainkan membuat sistem agribisnis yang berplatform pada sumberdaya lokal. Perihal ini diakibatkan hingga dikala ini nyaris semua ekonomi wilayah di Indonesia berplatform pada sistem agribisnis bagus diamati dari pemasukan dalam negeri regional bruto(PDRB), absorpsi daya kegiatan, kemampuan teknologi, ataupun strukturekspor. Perbangunan ekonomi yang sentralistik pada waktu kemudian, menyebabkan terbentuknya darurat multidimensi yang dirasakan bangsa Indonesia, spesialnya krisis dibidang ekonomi. Darurat ekonomi yang terjalin ialah dampak dari permasalahan elementer serta kondisi spesial. Permasalahan

elementer merupakan tantangan dalam berbentuk kesenjangan yang diisyrati oleh terdapatnya pengangguran serta kekurangan, sebaliknya tantangan eksternal merupakan usaha tingkatkan energi saing mengalami masa perdagangan leluasa. Kondisi spesial merupakan musibah alam kekeringan yang tiba berbarengan dengan darurat moneter yang merembet dari negeri orang sebelah.

Semacam kita tahu bersama kalau salah satu tujuan berarti pemograman ekonomi di Negeri Lagi Bertumbuh (NSB) tercantum di Indonesia merupakan buat tingkatkan laju perkembangan ekonomi. Buat tingkatkan perkembangan itu berarti butuh pula meningkatkan laju pembuatan modal dengan metode meningkatkan tingkatan pemasukan, dana serta pemodalan. Buat negeri Indonesia kenaikan laju pembuatan modal ini mengalami bermacam hambatan, salah satunya merupakan kekurangan warga Indonesia itu sendiri. Perihal ini disebabkan sebab tingkatan dana yang kecil, tingkatan dana kecil sebab tingkatan pemasukan pula kecil. Akhirnya laju pemodalan pula kecil serta memengaruhi pada rendahnya modal serta daya produksi. Kondisi inilah yang kerap diucap dengan “bundaran setan kekurangan” (Wibowo, 2008).

Telah waktunya pembangunan ekonomi wilayah yang menyangkut beberapa besar kebutuhan ekonomi orang banyak tidak menyudahi pada retorika saja, melainkan wajib secepatnya bisa jadi direalisasikan dalam kelakuan jelas serta sokongan kebijaksanaan besar ekonomi (Robert Berumur Siregar Et All, 2020). Tiap wilayah memiliki corak perkembangan ekonomi yang berlainan dengan wilayah lain. Oleh karena itu pemograman pembangunan ekonomi sesuatu wilayah pertama-tama butuh mengidentifikasi kepribadian ekonomi, sosial serta raga wilayah itu sendiri, tercantum interaksinya dengan wilayah lain. Dengan begitu tidak terdapat strategi pembangunan ekonomi wilayah yang bisa legal buat seluruh wilayah (Abd Belas kasih, Erika, 2020). Tetapi di pihak lain, dalam menata strategi pembangunan ekonomi wilayah, bagus waktu pendek ataupun waktu jauh, uraian hal filosofi perkembangan ekonomi area, yang dihimpun dari amatan kepada pola-pola perkembangan ekonomi dari bermacam area, ialah satu aspek yang lumayan memastikan mutu konsep pembangunan ekonomi wilayah.

Dalam gairah pembangunan ekonomi wilayah, salah satu pandangan yang butuh diperhitungkan merupakan keahlian buat menggunakan ataupun memakai sumberdaya—baik sumberdaya orang ataupun sumberdaya alam—seefektif serta seefisien bisa jadi (Ekstrak et angkatan laut (AL), 2020). Keahlian dalam membagikan serta menggunakan sumberdaya itu hendak amat

didetapkan oleh kapasitas serta ketersediaan sumberdaya diartikan dengan tutur lain, bekal (dalam pandangan kuantitatif) serta kualitas sumberdaya (dalam pandangan kualitatif) serta format penggunaannya wajib diformulasikan dalam sesuatu kerangka kebijaksanaan pembangunan ekonomi wilayah yang baik, seimbang, berwawasan area dan berkepanjangan. Hingga dalam menghasilkan independensi wilayah, penguasa wilayah wajib sanggup mengatur pangkal energi yang dipunyanya dengan cara berdaya guna serta efisien. Perihal itu bisa direalisasikan dengan kebijaksanaan desentralisasi lewat independensi wilayah. Aplikasi independensi wilayah serta desentralisasi pajak dilandasi oleh pandangan kalau penguasa wilayah jauh lebih menguasai kemampuan, situasi, serta perma- salah daerahnya sendiri(Arif, 2015). Oleh karena itu, tiap wilayah pula lebih paham besarnya keinginan perhitungan yang dibutuhkan buat menyelenggarakan aktivitas rezim serta pembangunan. Pengembangan tata cara buat menganalisa sesuatu perekonomian sesuatu wilayah berarti sekali kegunaanya selaku alat mengakulasi informasi tentang perekonomian wilayah yang berhubungan dan cara pertumbuhannya.

Pengembangan tata cara analisa ini setelah itu bisa digunakan selaku prinsip buat memastikan tindakan- tindakan apa yang wajib didapat untuk memesatkan laju perkembangan yang terdapat. Kemauan kokoh dari penguasa wilayah buat membuat strategi pengembangan ekonomi wilayah bisa membuat warga turut dan membuat bangun ekonomi wilayah yang dicita- citakan. Dengan pembangunan ekonomi wilayah yang terencana, pembayar pajak serta penanam modal pula bisa tergerak buat memperjuangkan kenaikan ekonomi. Kebijakan pertanian yang afdal, misalnya; hendak membuat wiraswasta bisa memandang terdapat kesempatan buat kenaikan penciptaan pertanian serta ekspansi ekspor. Dengan kenaikan kemampuan pola kegiatan rezim dalam pembangunan, selaku bagian dari pemograman pembangunan, wiraswasta bisa mengestimasi kalau pajak serta pungutan tidak naik, alhasil ada lebih banyak modal untuk pembangunan ekonomi wilayah pada tahun depan (Kuncoro and Idris, 2015).

Pembangunan ekonomi wilayah butuh membagikan pemecahan waktu pendek serta waktu jauh kepada isu- isu ekonomi wilayah yang dialami, serta butuh mengkoreksi kebijaksanaan yang galat. Pembangunan ekonomi wilayah ialah bagian dari pembangunan wilayah dengan cara global. 2 prinsip dasar pengembangan ekonomi wilayah yang butuh dicermati merupakan (1) mengidentifikasi ekonomi area serta (2) merumuskan manajemen pembangunan wilayah yang pro- bisnis. Pada penerapan pembangunan, aspek

ekonomi bisa pengaruhi sesuatu perkembangan dan pembangunan ekonomi antara lain semacam pangkal energi alam, pangkal energi orang, pangkal energi modal sampai keterampilannya. Pangkal energi alam yang diartikan mencakup tanah serta kekayaan alam semacam kesuburan tanah, kondisi hawa ataupun cuaca, hasil hutan, tambang sampai hasil laut seluruh itu pasti hendak mempunyai akibat besar kepada perkembangan pabrik suatu negeri. Tidak hanya itu, kemampuan dan kewirausahaan pula diperlukan dalam pengurusan materi anom dari alam, jadi suatu yang mempunyai angka(cara penciptaan). Tidak hanya pangkal energi alam terdapat pula pangkal energi orang yang jadi satu determinan kesuksesan dalam pembangunan nasional lewat jumlah dan mutu masyarakat. Dengan mempunyai jumlah masyarakat yang besar hingga hendak jadi kemampuan besar buat menjual bermacam berbagai hasil penciptaan, sebaliknya mutu masyarakat bisa memastikan seberapa besar daya produksi yang terdapat (Rahayu and Budi, 2013). Sebaliknya pangkal energi modal pula diperlukan oleh orang buat mengatur materi anom itu. Dengan pembuatan modal dan melaksanakan pemodalannya dibutuhkan buat menggali serta memasak kekayaan yang dipunyai. Pangkal energi modal pula bisa berbentuk beberapa barang modal yang amat berarti untuk perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi sebab beberapa barang modal ini bisa tingkatkan daya produksi. Dengan tutur lain pembangunan lebih ialah peninggalan hal kehidupan buat koreksi perkembangan serta wawasan. Kenaikan kemampuan wilayah bisa terjalin bila sesuatu area telah mengenali zona potensial yang dipunyai.

Penerapan pembangunan ditunjukan buat melajukan pemerataan pembangunan dengan metode tingkatkan pemanfaatan potensi- potensi yang dipunyai dengan cara maksimal. Dalam melakukan bermacam kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan wilayah khusus membutuhkan bayaran yang lumayan besar. Pangkal pemasukan wilayah bisa berawal dari dorongan penguasa pusat serta bisa pula berawal dari penguasa wilayah sendiri (Muhi, 2011). Namun, tidak seluruh sumber- sumber pembiayaan penguasa pusat bisa diserahkan pada wilayah. Penguasa wilayah diharuskan buat bisa menggali seluruh sumber- sumber keuangannya sendiri bersumber pada peraturan perundang- undangan yang legal. Alhasil dalam aplikasi pembangunan sumberdaya ekonomi wilayah ataupun lebih diketahui dengan kemampuan ekonomi wilayah pada dasarnya bisa dimaksud selaku suatu ataupun seluruh suatu sumberdaya yang dipunyai oleh wilayah yang bisa membagikan khasiat(ben- efit) dan bisa dipakai selaku modal dasar pembangunan (ekonomi) area. Dengan cara biasa ada 4 pengelompokan sumberdaya itu ialah pangkal energi alam (Alami Re- sources

atau *Endowment factors*, diucap pula Alami Capital), sumberdaya orang (Human Resources, diucap pula Human Capital), sumberdaya ciptaan (Physical Resources, diucap pula Physical Capital) serta sumberdaya sosial (Sosial Resources, diucap pula Social Capital)

Bab 6

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

6.1 Pendahuluan

Monitoring dan Evaluasi (monev) merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengawasan atau pengendalian suatu program dalam pembangunan. Meskipun merupakan satu kesatuan kegiatan, namun monitoring dan evaluasi memiliki fokus yang berbeda satu sama lain. Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan unsur dari manajemen yang sangat penting dilaksanakan dalam suatu organisasi swasta dan pemerintahan atau lembaga, terutama dalam upaya untuk memastikan proses pelaksanaan kegiatan atau program pembangunan yang sedang berjalan benar-benar *on the track* sesuai dengan tujuan rencana kegiatan dan program yang telah direncanakan.

Monitoring merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan dari penerapan kebijakan yang telah diambil terhadap program pembangunan. Dengan demikian, fokus dari pada kegiatan monitoring adalah berdasarkan pada pelaksanaannya bukan berdasarkan hasil. Artinya, monitoring dilakukan ketika kegiatan program pembangunan sedang berlangsung guna mengetahui dan memastikan kesesuaian proses dan capaiannya apakah telah sesuai dengan perencanaan atau untuk memeriksa

proses selanjutnya, yaitu untuk mengetahui kondisi atau kemajuannya. Hasil monitoring tersebut akan digunakan sebagai input bagi kepentingan proses selanjutnya, yaitu untuk melakukan evaluasi.

Evaluasi adalah suatu rangkaian kegiatan untuk dapat membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana program yang telah ditetapkan sebelumnya dengan berdasarkan standar yang telah ditentukan. Artinya, evaluasi sebagai suatu kegiatan yang penting, untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan program/kegiatan bila diketahui adanya kekurangan dalam pelaksanaan program. Evaluasi merupakan suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas, dan dampak kegiatan-kegiatan atau program pembangunan serta kesesuaian dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematis dan objektif. Evaluasi terhadap program pembangunan dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk melakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.

Evaluasi harus dilakukan secara terencana dan sistematis untuk menilai suatu program pembangunan berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Artinya, evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung dan menilai hasil atau produk pembangunan yang telah dihasilkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Sebelum melakukan monitoring dan evaluasi program pembangunan, maka seorang tim penilai atau evaluator haruslah memiliki pemahaman, keterampilan, dan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Artinya, pelaksana yang melakukan monitoring dan evaluasi (monev) haruslah dilakukan oleh petugas yang independen dan profesional, sehingga diharapkan diperoleh data objektif dan akurat karena hasil evaluasi akan sangat berharga untuk dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan manajemen dan menentukan kebijakan dalam perencanaan program pembangunan di masa yang akan mendatang.

6.2 Pengertian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan pada hakekatnya adalah perubahan yang terencana dari situasi yang satu ke situasi yang lain, sehingga pembangunan dapat diartikan sebagai proses perbaikan menuju bentuk yang lebih baik (Roupp, 1983). Menurut Siagian (2005), pembangunan adalah suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu negara dan pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dinyatakan pembangunan adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu perubahan yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

Untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan atau proyek pembangunan daerah dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya, maka harus dilakukan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Monitoring dilaksanakan dengan maksud agar proyek pembangunan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan menyediakan umpan balik bagi pengelola proyek pembangunan pada setiap tingkatan. Umpan balik ini memungkinkan pemimpin proyek untuk dapat menyempurnakan rencana operasional proyek pembangunan dan mengambil tindakan korektif tepat pada waktunya, jika terjadi masalah dan hambatan (Deptan, 1989).

Monitoring dan evaluasi adalah merupakan alat manajemen yang harus dilakukan dalam menjalankan roda organisasi. Dalam pelaksanaannya monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada waktu yang berbeda, namun memiliki hubungan yang erat dan saling berkaitan, bersifat interaktif, dan memberikan informasi dan data yang saling mendukung. Melalui kegiatan pelacakan atau investigasi terhadap kemajuan suatu program, monitoring akan memberikan data, baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang sangat dibutuhkan dalam merencanakan dan melaksanakan evaluasi.

Daman (2012) menjelaskan bahwa monitoring dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, untuk mengikuti perkembangan suatu program yang dilakukan secara mantap dan teratur serta terus menerus. Monitoring didefinisikan sebagai siklus

kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan (Mercy, 2005). Sedangkan, Mardiani (2013) menyatakan monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan/ program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/ kegiatan selanjutnya.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa monitoring merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk melihat, memantau jalannya program pembangunan selama program tersebut dilaksanakan, dan menilai ketercapaian tujuan, melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program pembangunan tersebut. Artinya, monitoring merupakan upaya pengumpulan informasi secara berkelanjutan yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada pengelola program guna kepentingan untuk mengetahui kemajuan dan kekurangan pelaksanaan program dalam rangka perbaikan untuk mencapai tujuan.

Monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Monitoring merupakan serangkaian kegiatan pengambilan keputusan untuk menjamin agar suatu program/ kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hasil akhirnya berupa tindakan/keputusan berupa pelaporan yang berguna sebagai informasi yang akan ditindaklanjuti melalui evaluasi.

Evaluasi merupakan proses menentukan nilai yang objektif dan sistematis terhadap suatu program yang sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan. Evaluasi sebagai suatu proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan (Arikunto, 2010). Sedangkan, Umar (2005) menyatakan evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

Berdasarkan pernyataan tersebut, evaluasi dilakukan pada pelaksanaan program berdasarkan penilaian yang objektif, rasional dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Artinya, evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan

setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan. Seperti yang disampaikan Ismail (2014) bahwa evaluasi dilakukan pada tahap akhir dari penilaian dan pengukuran serta di dalamnya memiliki unsur pertimbangan dan keputusan terhadap suatu program berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelum program tersebut berjalan. Dengan demikian, evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output).

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara periodik, sehingga alat dan strategi monitoring dapat diperbaiki dan dikembangkan untuk lebih baik lagi. Moerdiyanto, (2009) menyatakan keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau akuntabel hasilnya, serta ada keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari program itu sendiri. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) maka keberhasilan, dampak dan kendala pelaksanaan suatu program dapat diketahui. Pernyataan yang sama dinyatakan Ojha (1998) bahwa monitoring dan evaluasi merupakan sebuah proses yang berkesinambungan meliputi pengumpulan data, proses dan pemilihan informasi mengenai implementasi program, progress yang dicapai pada program tersebut sampai kepada dampak dan efek dari adanya program tersebut.

Perbedaan antara monitoring dan evaluasi adalah monitoring dilakukan pada saat program pembangunan masih berjalan, sedangkan evaluasi dapat dilakukan baik sewaktu program pembangunan itu masih berjalan ataupun program itu sudah selesai. Pelaku monitoring biasanya dilakukan oleh pihak internal sedangkan evaluasi dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh fakta atau kebenaran dari suatu program beserta dampaknya, sedangkan monitoring hanya melihat keterlaksanaan dari program yang telah dilaksanakan, faktor pendukung, dan penghambatnya (Moerdiyanto, 2009).

6.3 Hubungan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan dua alat manajemen, walaupun secara konsep berbeda, tapi memiliki hubungan yang erat dan saling memberikan dukungan satu sama lain.. Melalui kegiatan investigasi, monitoring dapat memberikan data, baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang berguna dalam melakukan evaluasi. Dengan demikian, evaluasi merupakan tahapan yang memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Artinya, evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari monitoring, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan saling melengkapi. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan, mengontrol ketercapaian tujuan, berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai dan memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan (Dunn, 2000).

Dengan demikian, monitoring dan evaluasi memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam memastikan proses pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan benar-benar dilakukan sesuai tujuan rencana proyek dan program pembangunan. Monitoring disebut sebagai *on going evaluation*, yaitu yang dilakukan ketika kegiatan sedang berlangsung untuk melakukan perbaikan bila diperlukan. Sedangkan, evaluasi disebut sebagai *terminate evaluation*, yang dilakukan pada akhir proyek pembangunan untuk memastikan apakah pelaksanaan dan manfaat proyek pembangunan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, UNESCO (1982) mengidentifikasi ada lima keterkaitan dan perbedaan antara monitoring dan evaluasi, yaitu:

1. Monitoring berfokus pada program yang sedang dilaksanakan, bukan pada konteks kegiatan yang dilakukan, sedangkan evaluasi dilakukan sejak perencanaan program;
2. Monitoring menitikberatkan pada aspek kuantitatif dalam pelaksanaan program yang menjadi bahan kegiatan melakukan evaluasi. Dengan demikian, monitoring berhubungan dengan dimensi kuantitatif, sedangkan evaluasi lebih berkaitan dengan dimensi kualitatif;
3. Monitoring mencakup usaha mengidentifikasi faktor-faktor pendukung program, seperti faktor logistik, yang membantu atau memengaruhi penampilan program, sedangkan evaluasi mengarah

- pada upaya menyiapkan bahan masukan untuk pengambilan keputusan tentang ketepatan perbaikan perluasan atau pengembangan program;
4. Kontribusi yang dapat dimanfaatkan dengan segera dari hasil monitoring adalah untuk kepentingan pengelolaan program, sedangkan kontribusi evaluasi lebih terkait dengan pengambilan keputusan tentang penyusunan rancangan dan isi program;
 5. Monitoring dan evaluasi merupakan proses yang saling berhubungan dan melengkapi antara satu sama lainnya. Walaupun penekanannya berbeda, keduanya mempunyai arah yang sama, yaitu meningkatkan efektivitas program.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan monitoring dan evaluasi (monev) merupakan dua kegiatan yang saling berhubungan erat yang perlu di manage dalam rangka pengendalian suatu kegiatan program pembangunan. Meskipun merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, namun monitoring dan evaluasi memiliki fokus yang berbeda satu sama lain. Evaluasi memerlukan data dari hasil monitoring yang digunakan untuk melihat kontribusi program pembangunan yang berjalan untuk dievaluasi dan hasilnya digunakan untuk kontribusi program pembangunan selanjutnya.

Monitoring dan evaluasi memiliki persamaan, keduanya merupakan alat manajemen yang digunakan untuk pengendalian. Evaluasi memerlukan hasil dari monitoring. Perbedaannya terletak pada waktu, apa yang akan diukur, siapa yang terlibat dan penggunaan hasilnya (Fahmi, 2020). Untuk lebih jelasnya dapat diketahui dari tabel berikut:

Tabel 6.1: Perbedaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Fahmi, 2020)

Monitoring	Evaluasi
<ul style="list-style-type: none"> • Frekuensi pelaksanaan secara terus menerus dan dijalankan selama pekerjaan sedang berlangsung. Tidak memperhitungkan hasil pengalaman masa lalu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan 1-2 kali pada pertengahan (<i>mid-term evaluation</i>) dan akhir pekerjaan (<i>post evaluation</i>). Memperhitungkan hasil pengalaman masa lalu.
<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatannya untuk saat pekerjaan berlangsung dan memberikan saran konstruktif agar lebih efektif dan efisien. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatannya untuk keperluan nanti dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi setelah pekerjaan selesai.

<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan yang dilaksanakan berupa koreksi minor pada program dan berfungsi sebagai indikator awal dalam kemajuan pekerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan yang dilaksanakan berupa koreksi mayor dan berfokus pada perbaikan masa mendatang.
<ul style="list-style-type: none"> • Yang diukur adalah input, <i>output</i> dan proses, kondisi/ asumsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yang diukur adalah dampak jangka Panjang dan kontinuitas (kelangsungan).
<ul style="list-style-type: none"> • Sumber informasi diperoleh dari sistem rutin, dokumen internal, survey dan laporan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber informasi diperoleh dari dokumen internal dan eksternal, penilaian dampak dan riset.
<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaanya merupakan level manajemen (manajer dan staff). 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaanya merupakan level manajemen dan pihak eksternal (manajer, staff, konsultan, <i>stakeholder</i> lainnya).

6.4 Tujuan dan Manfaat Monitoring dan Evaluasi

Tujuan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang langkah-langkah persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil evaluasi dari suatu program atau kegiatan sehingga hasil dari monitoring dan evaluasi (monev) dapat dijadikan sebagai informasi yang berharga untuk acuan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk pengembangan organisasi. Tujuan monitoring dapat ditinjau dari beberapa segi, misalnya segi objek dan subjek yang dipantau serta hasil dari proses monitoring itu sendiri.

Elfindri (2011) menyatakan monitoring dilakukan bertujuan untuk:

- a. Memonitor trend dari luaran dalam kurun waktu, baik antar kelompok maupun antar tempat;
- b. Mengumpulkan informasi untuk mengumpulkan penyebab dari sebuah hasil atau keadaan;
- c. Untuk memberikan umpan balik bagi pengambil kebijakan terhadap effectiveness dari sebuah program dan usaha-usaha untuk mengatasi sesuatu.

Sedangkan, Amsler, Findley & Ingram (2009) menyatakan ada beberapa tujuan dari monitoring, yaitu:

1. Memastikan suatu proses apakah telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku sehingga proses berjalan sesuai jalurnya (on the track);
2. Menyediakan probabilitas tinggi akan keakuratan data bagi pelaku monitoring;
3. Mengidentifikasi hasil yang tidak diinginkan pada suatu proses dengan cepat (tanpa menunggu proses selesai);
4. Menumbuhkembangkan motivasi dan kebiasaan positif pekerja.

Untuk menindaklanjuti hasil monitoring maka dilakukan evaluasi dengan memanfaatkan data atau informasi dari hasil monitoring. Arikunto dan Jabar (2009) mengatakan bahwa tujuan diadakannya evaluasi adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program atau kegiatan telah sesuai dengan langkah keterlaksanaan kegiatan program tersebut, serta apakah sudah memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Sedangkan, Wirawan (2012) menyatakan bahwa tujuan dilakukan evaluasi terhadap suatu program, sebagai berikut:

1. Mengukur program terhadap masyarakat;
2. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana;
3. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar;
4. Mengidentifikasi dan menemukan makna dimensi program yang jalan dan mana yang tidak jalan;
5. Pengembangan staf program;
6. Memenuhi ketentuan undang-undang;
7. Akreditasi program;
8. Mengukur cost effectiveness dan cost efficiency;
9. Mengambil keputusan mengenai program;
10. Akuntabilitas;
11. Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program;
12. Mengembangkan teori ilmu evaluasi.

Lebih lanjut, Sarbian (2017) menyatakan tujuan dilakukan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Menilai keberhasilan pelaksanaan suatu program
2. Menentukan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program
3. Memberikan masukan untuk perencanaan program periode berikutnya

4. Memberikan masukan untuk keputusan melanjutkan, memperluas, dan menghentikan program
5. Memberikan masukan untuk keputusan memodifikasi program.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan evaluasi terhadap suatu program pembangunan dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input dari program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan.

BPKAD Banjar (2018) menyebutkan secara umum tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) pembangunan adalah;

1. Mengkaji kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan apakah telah sesuai dengan perencanaan;
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar dapat langsung diatasi;
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek atau pembangunan;
4. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan;
5. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan, Rasidi (2011) menyatakan evaluasi terhadap pembangunan dilakukan untuk melakukan penilaian yang objektif dan sistematis terhadap sebuah program yang direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan. Hal-hal yang harus dievaluasi, yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sektor, tematik, dan bantuan negara.

Adapun manfaat dari evaluasi tersebut adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang akurat tentang kinerja, kebijakan, program dan kegiatan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai;
2. Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target;
3. Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, dan efisien;
4. Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek;

5. Menjadikan kebijakan, program dan proyek serta diharapkan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik;
6. Membantu Pemangku kepentingan untuk belajar lebih banyak tentang kebijakan, program dan proyek;
7. Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi;
8. Negosiasi antara evaluator dan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi.

Monitoring dan evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk melihat ketercapaian program pembangunan yang telah dilaksanakan sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dapat mengetahui kendala yang dialami, mengenali masalah sedini mungkin, melakukan perbandingan antar lokasi/ tempat, menilai trend situasi yang terjadi sehingga dapat diambil tindakan korektif secara tepat dan cepat.

BPKAD Banjar (2018) menjelaskan manfaat dari penerapan monitoring dan evaluasi dalam pembangunan, sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi (monev) sebagai alat untuk mendukung perencanaan, yaitu:
 - a. Penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang disertai dengan pemilihan dan penggunaan indikator akan memperjelas tujuan serta arah kegiatan untuk pencapaian tujuan tersebut.
 - b. Pemilihan indikator program yang melibatkan berbagai pihak secara partisipatif tidak saja berguna untuk mendapatkan indikator yang tepat tetapi juga akan mendorong pemilik proyek dan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mendukung suksesnya program.
2. Monitoring dan evaluasi (monev) sebagai alat mengetahui kemajuan program, yaitu:
 - a. Adanya sistem monitoring dan evaluasi yang berfungsi dengan baik, memungkinkan pelaksana program dapat mengetahui kemajuan dan hambatan yang secara potensial dapat menghambat jalannya program pembangunan, dan pelaksana program untuk dapat melakukan tindakan dengan tepat waktu dalam mengatasi masalah;

- b. Informasi hasil monitoring dan evaluasi dapat memberikan umpan balik kepada pelaksana program tentang hasil capaian program, dalam arti sesuai atau tidak sesuai dengan yang diharapkan;
 - c. Bilamana hasil program belum sesuai dengan harapan maka pelaksana program dapat melakukan tindakan penyesuaian atau koreksi secara tepat dan cepat sebelum program terlanjur berjalan tidak pada jalurnya. Informasi hasil monitoring dan evaluasi akan bermanfaat dalam memperbaiki jalannya implementasi program.
3. Monitoring dan evaluasi (monev) sebagai alat akuntabilitas program dan advokasi, yaitu:
- a. Monitoring dan evaluasi tidak hanya memantau aktivitas program tetapi hasil dari aktivitas tersebut. Informasi pemantauan terhadap luaran dan hasil (output dan outcome) program pembangunan yang dipublikasikan akan dapat diakses pemangku kepentingan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas program pembangunan;
 - b. Informasi hasil monitoring dan evaluasi dapat dipakai sebagai bahan masukan untuk advokasi program kepada pemangku kepentingan;
 - c. Informasi tersebut akan memicu dialog dan pembelajaran serta memacu keikutsertaan.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa manfaat dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) dapat menjadi acuan untuk meningkatkan keterampilan petugas monev dalam pengumpulan data secara akurat tentang pelaksanaan program yang dimonitoring dan dievaluasi sehingga hasil analisisnya dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi yang mendasari suatu kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan.

6.5 Pendekatan dalam Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pembangunan, yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan monitoring adalah acuan atau pedoman dalam melakukan kegiatan monitoring, yaitu ketentuan-ketentuan atau pedoman yang telah disepakati dan diberlakukan, sehingga sustainability kegiatan terjaga, dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara objektif dan berorientasi pada tujuan dari program tersebut, sehingga diperoleh informasi yang akurat untuk bahan dalam melakukan evaluasi. Untuk mendapatkan data yang akurat, maka diperlukan pendekatan yang tepat untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Moerdiyanto (2009) menyatakan ada 2 (dua) cara pendekatan yang dapat dilakukan dalam monitoring dan evaluasi, yaitu:

1. Pendekatan survei, yaitu ada empat tujuan yang dapat dicapai melalui survei, yaitu:
 - a. Pendekatan survei deskriptif digunakan apabila monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan dan kondisi subyek dan atau objek yang dimonitoring dan evaluasi (monev).
 - b. Pendekatan survei eksplanatif digunakan bila monitoring dan evaluasi bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengapa, yaitu menjelaskan mengapa hal ini terjadi, atau mengapa terjadi perubahan, atau mengapa tidak ada perubahan, mengapa program tidak berjalan lancar, mengapa dampak program tidak seperti yang diharapkan, dan lain sebagainya.
 - c. Pendekatan survei eksploratif digunakan bila monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengungkap hal-hal yang sebelumnya tidak dirumuskan dalam tujuan program.
 - d. Pendekatan survei prediktif digunakan bila monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memprediksikan hasil dan dampak program beberapa tahun yang akan datang dengan memperhatikan data yang ada saat ini.
2. Pendekatan *expost facto* digunakan bila monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mencari dampak suatu program perbaikan yang telah dilakukan di masa lampau.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilihan pendekatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dapat ditentukan dengan memperhatikan tujuan dan waktu atau saat monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan.

6.6 Prinsip-prinsip melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara integratif dengan menyusun rencana sasaran, mendesain instrumen yang akan digunakan, melakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang baik dan benar agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar.

Fattah (1996) mengemukakan ada 6 (enam) prinsip-prinsip dalam monitoring yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Prinsip berkesinambungan, artinya dilakukan secara berlanjut;
2. Prinsip menyeluruh, artinya keseluruhan aspek dan komponen program harus dievaluasi;
3. Prinsip objektif, artinya pelaksanaannya bebas dari kepentingan pribadi;
4. Prinsip sahih, yaitu mengandung konsistensi yang benar-benar mengukur yang seharusnya diukur;
5. Prinsip penggunaan kritis;
6. Prinsip kegunaan atau manfaat.

Sedangkan, Daman (2012) menyampaikan pernyataan Suryana bahwa prinsip-prinsip monitoring sebagai berikut:

1. Monitoring harus dilakukan secara terus-menerus;
2. Monitoring harus menjadi umpan balik bagi perbaikan kegiatan program organisasi;
3. Monitoring harus memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun terhadap pengguna produk atau layanan;
4. Monitoring harus dapat memotivasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi;
5. Monitoring harus berorientasi pada peraturan yang berlaku;

6. Monitoring harus objektif.

Setelah melaksanakan monitoring, maka dilanjutkan dengan evaluasi. Nurmawati (2016) menyatakan evaluasi merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan data yang akurat dan bermakna. Dalam melakukan evaluasi, harus diperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam melakukan evaluasi, yaitu:

1. Penentuan indikator yang akan dievaluasi;
2. Mendesain kegiatan evaluasi;
3. Mengumpulkan data evaluasi;
4. Menganalisis dan mengolah data; dan
5. Melaporkan hasil evaluasi.

Sedangkan, Moerdiyanto (2009) menyatakan untuk mendapatkan hasil yang baik, maka dalam pelaksanaannya, monitoring dan evaluasi haruslah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip, seperti berikut :

1. Berorientasi pada tujuan, yaitu monitoring dan evaluasi hendaknya dilaksanakan mengacu pada tujuan yang ingin dicapai. Hasil monev dipergunakan sebagai bahan untuk perbaikan atau peningkatan program pada evaluasi formatif dan membuat justifikasi dan akuntabilitas pada evaluasi sumatif;
2. Mengacu pada kriteria keberhasilan, yaitu monitoring dan evaluasi seharusnya dilaksanakan mengacu pada kriteria keberhasilan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan kriteria keberhasilan dilakukan bersama antara para evaluator, para sponsor, pelaksana program (pimpinan dan staf), para pemakai lulusan (konsumen), lembaga terkait (di mana peserta kegiatan bekerja);
3. Mengacu pada asas manfaat, yaitu monitoring dan evaluasi sudah seharusnya dilaksanakan dengan manfaat yang jelas. Manfaat tersebut adalah berupa saran, masukan atau rekomendasi untuk perbaikan program yang di monitoring dan evaluasi atau program sejenis di masa mendatang;
4. Dilakukan secara objektif, yaitu monitoring dan evaluasi harus dilaksanakan secara objektif. Petugas monev dari pihak eksternal harus bersifat independen, yaitu bebas dari pengaruh pihak pelaksana program. Petugas monitoring dan evaluasi internal harus bertindak objektif, yaitu melaporkan temuannya apa adanya.

Sedangkan, BPKAD Banjar (2018) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pembangunan, sebagai berikut:

1. Sistem monitoring dan evaluasi dibuat sederhana, disesuaikan dengan kapasitas dan sumber daya yang tersedia untuk menghindari kesulitan implementasi di lapangan;
2. Tujuan yang jelas, yaitu difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tujuan dari monitoring yang dikaitkan dengan aktivitas dan tujuan program. Perlu dibuat logframe, intervention logic model, dan rencana kerja monitoring dan evaluasi;
3. Dilakukan tepat waktu; yaitu esensi dari monitoring adalah ketersediaan data diperlukan on-time bagi pihak manajemen/pengguna data untuk penyelesaian masalah secara tepat waktu. Ketepatan waktu monitoring penting untuk mendapatkan data akurat dalam memantau objek tertentu pada saat yang tepat;
4. Informasi hasil monitoring dan evaluasi harus akurat dan objektif; sehingga perlu mekanisme untuk check konsistensi dan akurasi data;
5. Sistem monitoring dan evaluasi bersifat partisipatif dan transparan; sehingga perlu pelibatan semua stakeholders dalam penyusunan desain dan implementasinya, serta hasilnya dapat diakses oleh semua pihak;
6. Sistem monitoring dan evaluasi dibuat fleksibel; tidak kaku tapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dan dalam batas koridor SOP.
7. Bersifat action-oriented; yaitu monitoring diharapkan menjadi basis dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Untuk itu, sejak awal perlu dilakukan analisis kebutuhan informasi untuk menjamin data monitoring yang akan digunakan untuk melakukan tindakan;
8. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara cost-effective;
9. Unit monitoring dan evaluasi terdiri dari para spesialis yang tidak hanya bertugas mengumpulkan data tetapi melakukan analisis masalah dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah secara praktis.

6.7 Hambatan dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan adalah untuk melihat apakah program yang dilaksanakan mampu mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Evaluasi merupakan kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektivitas dan kemanfaatan program serta keberlanjutan pembangunan. Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan bukanlah pekerjaan yang mudah, karena akan berhadapan dengan berbagai hambatan atau permasalahan yang sangat kompleks dan komprehensif meliputi berbagai aspek social, situasi dan keadaan yang di daerah tersebut.

Manik (2011) menyatakan beberapa permasalahan dalam penerapan monitoring dan evaluasi dalam pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi belum menjadi kebutuhan mendasar untuk perbaikan kinerja, yaitu indikasinya:
 - a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan-laporan lainnya, masih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administrasi dan formalitas semata.
 - b. Hasil monitoring evaluasi belum menjadi dasar perencanaan tahun berikutnya.
 - c. Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Satuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih rendah.
2. Rendahnya kemampuan PNS dalam perencanaan, yaitu belum mampu menyusun indikator kinerja yang tepat syarat, sehingga menyulitkan proses pelaporan dan monitoring dan evaluasi;
3. Rendahnya kualitas data dan informasi, yaitu data tidak ada, atau berbeda antar instansi (SKPD), atau terlambat dalam beberapa tahun;
4. Belum optimalnya audit kinerja oleh BPK; masih fokus pada audit laporan keuangan;
5. Rendahnya kualitas rekomendasi DPRD terhadap LKPj Kepala Daerah. Rekomendasi tersebut merupakan bentuk evaluasi DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Rendahnya peran serta Customer Service Officer (CSO) dan Media dalam pengawasan kinerja Pemda.
7. Ketidaktepatan mekanisme pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

- a. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) disampaikan pada masyarakat agar mendapatkan tanggapan sebagai masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - b. Tatacaranya tidak dijelaskan secara cukup.
8. Rendahnya kualitas diseminasi materi pelaporan.

Bab 7

Indikator Pembangunan

7.1 Pendahuluan

Bab ini akan membantu kita untuk memahami indikator – indikator pembangunan sebagai alat ukur keberhasilan kinerja pembangunan. Pada bab sebelumnya telah diuraikan mengenai makna pembangunan, perencanaan pembangunan, dan tujuan pembangunan. Bagian ini akan menjelaskan indikator pembangunan ekonomi, indikator pembangunan manusia, dan indikator pembangunan berkelanjutan. Bagian pendahuluan akan menyampaikan gambaran singkat capaian kinerja pembangunan Indonesia.

Perekonomian Indonesia merupakan salah satu ekonomi Negara berkembang di dunia dan yang terbesar di Asia Tenggara. Sebagai anggota G20 dengan penghasilan menengah ke atas, Indonesia digolongkan sebagai Negara industri baru dan ekonomi terbesar ke-15 di dunia berdasar pada Produk Domestik Bruto (PDB) nominal dan terbesar ke-7 dalam hal PDB. (G20, 2009) Pada tahun 2019 Indonesia diperkirakan mencapai PDB US\$ 40 miliar. Pada tahun 2025 Indonesia diperkirakan akan melampaui angka PDB US\$ 130 miliar. (News, 2019). Pasar domestik, belanja anggaran Pemerintah dan kepemilikan pada Badan Usaha Milik Negara (141 perusahaan) menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pengelolaan harga berbagai barang kebutuhan pokok juga memiliki peran penting dalam ekonomi pasar Indonesia. Namun, kini,

mayoritas perekonomian Indonesia telah dikuasai oleh swasta lokal dan perusahaan asing (Kemenperin, 2013; Kemenperin, 2017; News., 2020).

Mobilitas pembangunan menghasilkan capaian ekonomi menjadi lebih positif. Pertumbuhan mengalami percepatan 5,1% pada tahun 2004 dan mencapai 5,6% pada tahun 2005. Konsumsi domestik menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang menyumbang tiga perempat dari PDB Indonesia. Namun masalah rendahnya tingkat investasi asing, pengelolaan birokrasi, dan tingginya tingkat korupsi terus menghambat pertumbuhan hingga saat ini. Korupsi telah menelan biaya Rp. 51,4 triliun (US \$ 5,6 miliar) atau sekitar 1,4% dari PDB Indonesia per tahun. Pada Februari 2007 tingkat pengangguran mencatat sebesar 9,75%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia beranjak cepat ke tingkat tertinggi dalam sepuluh tahun di 6,3% pada tahun 2007. Tingkat pertumbuhan ini dapat menurunkan tingkat kemiskinan dari 17,8% menjadi 16,6% dan mengoreksi tingkat pengangguran turun menjadi 8,46% di Februari 2008. Pertumbuhan PDB riil Indonesia mengalami ketidakstabilan, pada tahun 2012 mencapai 6%, kemudian hingga tahun 2015 menurun di bawah 5%. Setelah Joko Widodo terpilih untuk menggantikan Susilo Bambang Yudoyono untuk memimpin Pemerintahan Indonesia. Pemerintah Indonesia mengambil tahapan dengan melonggarkan peraturan tentang penanaman modal asing untuk mendorong perekonomian. Pada tahun 2016 - 2017 Pemerintah Indonesia berhasil menaikan pertumbuhan PDB sedikit di atas 5%. Namun, Pemerintah masih dihadapkan pada masalah pelemahan mata uang, penurunan ekspor dan stagnasi belanja konsumen. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran berada di 5,3 (Wikipedia, 2020)

Di tengah pandemic – Covid – 19, perekonomian Indonesia turun 0,74% pada kuartal satu (Q1) tahun 2021, setelah penurunan 2,19% pada periode sebelumnya. Ini adalah pelemahan ekonomi keempat berturut-turut. Konsumsi rumah tangga (-2,23% vs -3,61% di Q4) dan investasi tetap (-0,23% vs -6,15% di Q4) menurun lebih sedikit dan permintaan eksternal berkontribusi positif terhadap PDB, ekspor tumbuh 6,74 persen, impor naik lebih lunak pada 5,27. Pengeluaran Pemerintah meningkat lebih cepat (2,96% vs 1,76% di Q4). Output produksi berkontraksi terutama untuk transportasi dan gudang (-13,12% vs -13,42% di Q4), akomodasi dan jasa makanan (-7,26%), pertambangan (-2,02% vs -1,20% di Q4), manufaktur (-1,38% vs -3,14% di Q4), konstruksi (-0,79% vs -5,67% di Q4), perdagangan grosir, eceran (-1,234% vs -3,64% di Q4). Sebaliknya, output tumbuh untuk komunikasi (8,72% vs 10,91%). (Economics, 2020)

Kabar gembira datang dari John Hawksworth, *Chief Economist Pricewaterhouse Cooper* (PwC), Ia mengatakan bahwa Indonesia pada tahun 2030 akan berada di peringkat 5 sebagai Negara dengan perekonomian big emerging market. Pada tahun 2030 nilai GDP diestimasi akan berada pada US\$ 5,424 miliar. Pada tahun 2050 diestimasi GDP Indonesia naik menjadi US\$ 10,502 miliar (GDP dengan metode perhitungan PPP) dan posisi berada di peringkat 4. (PwC., 2017) Ilustrasi tersebut menunjukkan kinerja perekonomian Indonesia didukung dengan capaian indikator – indikator pembangunan ekonomi. Dengan capaian indikator – indikator pembangunan tersebut menggambarkan perkembangan suatu Negara dan menunjukkan keberhasilan suatu Negara dalam melaksanakan pembangunan perekonomian. Keberhasilan kinerja pembangunan ekonomi umumnya ditunjukkan dengan capaian PDB dan *Gross National Product* (GNP) per kapita yang akan dijelaskan pada bagian berikut.

Indikator pembangunan lainnya adalah indikator pembangunan manusia. Indikator ini berbeda dengan indikator pembangunan ekonomi. Kinerja pembangunan ditunjukkan dengan indeks pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) Indonesia pada tahun 2020 menduduki peringkat 107 naik 4 peringkat dari tahun sebelumnya dari 189 Negara. HDI Indonesia tahun 2020 naik 1 peringkat ke peringkat 5 dibandingkan tahun sebelumnya dari 10 Negara Asean. Di tingkat Negara Asean HDI Indonesia masih di bawah Singapura, Brunei Darusalam, Malaysia, Thailand, dan di atas Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Timor Timur dan Papua Nugini. (UNDP, 2020). Berdasarkan rilis data Tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan, sedangkan dari sisi pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami penurunan. (BPS, 2020) Tahun 2020 HDI Indonesia mengalami pelemahan pertumbuhan dibanding tahun – tahun sebelumnya. Pelemahan HDI tersebut sangat dipengaruhi oleh Pandemi COVID – 19. Capaian HDI Indonesia tahun 2020 tumbuh 0,03 persen atau meningkat 0,02 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Capaian HDI Indonesia pada tahun 2020 adalah 71,94. Perlambatan pertumbuhan HDI tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh turunnya rata – rata pengeluaran yang disesuaikan. Indikator pengeluaran turun dari 11,30 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 11,01 juta rupiah pada tahun 2020. (BPS, 2020)

Pada tahun 2020 anak-anak Indonesia yang berusia 7 tahun memiliki harapan menikmati pendidikan selama 12,98. Angka ini naik 0,03 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 12,95 tahun. Bersamaan dengan itu, rata-rata

lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,14 tahun, dari 8,34 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,48 tahun pada tahun 2020. (BPS, 2020) Harapan hidup bayi yang lahir pada tahun 2020 memiliki harapan hidup hingga 71,47 tahun, lebih lama 0,13 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya (BPS, 2020).

United Nation Development Program (UNDP) adalah Program Pembangunan Perserikatan Bangsa – Bangsa yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan bantuan, terutama untuk meningkatkan pembangunan Negara-negara berkembang. UNDP sudah mengelompokkan Indonesia menjadi Negara dengan HDI tinggi. Pada tahun 2020 HDI Indonesia sebesar 0,718 dan berada pada posisi 107. Kondisi ini patut menjadi perhatian Pemerintah Indonesia karena peringkat Indonesia masih tertinggal dengan beberapa Negara tetangga Asean lainnya. Sebut saja Thailand yang mempunyai skor 0,777 masih mengungguli Indonesia di posisi 79. Lebih lanjut lagi Malaysia di posisi 62, dengan skor 0,810, Brunei Darusalam di posisi 47 dengan skor 0,838 dan Singapura di posisi 11 dengan skor 0,938 (UNDP, 2020)

Ilustrasi tersebut sangat berbeda dengan ilustrasi kinerja pembangunan ekonomi. HDI merefleksikan keberhasilan kinerja pembangunan manusia. HDI akan menunjukkan keberhasilan kinerja Pemerintah Indonesia dalam membangun kualitas hidup dan harapan hidup manusia Indonesia.

Indikator pembangunan yang terakhir yang akan dibahas pada bab ini adalah indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainability Development Goals) biasa disingkat dengan SDGs. Indikator ini memiliki 17 tujuan pembangunan yang berkelanjutan. SDGs fokus pada keberhasilan kinerja dibidang sosial seperti tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender. SDGs juga menekankan pembangunan dalam perbaikan ekonomi seperti energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kemitraan untuk mencapai tujuan. Penekanan SDGs dalam pembangunan lingkungan seperti air bersih dan sanitasi layak, kota dan komunikasi berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, dan ekosistem darat. Terakhir SDGs dalam pembangunan hukum seperti perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Tujuan pembangunan ini dapat dicapai jika seluruh pemangku kepentingan yaitu Pemerintah, akademisi, perusahaan swasta dan masyarakat memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan Sustainable Development Report. Tiga Negara yang menempati posisi SDGs tertinggi adalah (1) Swedia dengan skor indeks 84,72, (2) Denmark dengan skor indeks 84,56 dan terakhir (3) Finlandia dengan skor indeks 83,77. Selanjutnya, tiga Negara yang menempati posisi SDGs terendah adalah (164) Chad dengan skor indeks 43,75, (165) Sudan Selatan dengan skor indeks 43,66 dan terakhir (166) Republik Afrika tengah dengan skor indeks 38,54. Peringkat capaian pembangunan SDGs Indonesia pada tahun 2020 dan Negara – Negara tetangga di Asean adalah (41) Thailand dengan skor indeks 74,54, (49) Vietnam dengan skor indeks 73,80, (60) Malaysia dengan skor indeks 71,76, (88) Brunei darusalam dengan skor indeks 68,15, (93) Singapore dengan skor indeks 67,00, (99) Philipina dengan skor indeks 65,85, (101) Indonesia dengan skor indeks 65,30, (104) Myanmar dengan skor indeks 64,58, (106) Kamboja dengan skor indeks 64,39, (116) Laos dengan skor indeks (62,06), (155) Papua New Guinea dengan skor indeks 51,66, dan Timor Leste belum memiliki peringkat karena belum menjalankan SDGs. Peringkat Indonesia pada tahun 2020 mengalami kenaikan 1 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. (SDR, 2020) Capaian pembangunan SDGs di tingkat Provinsi di seluruh Indonesia pada tahun 2019 telah menunjukkan hasil capaian yang cukup baik. Namun tetap merupakan tantangan bagi Pemerintah pusat maupun daerah beserta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui dinamika program atau kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Di tingkat nasional capaian tertinggi dicapai oleh Provinsi Bali dengan capaian indeks sebesar 77,4 yang diikuti oleh Provinsi DIY Yogyakarta dengan capaian indeks 76,0 dan di peringkat ke tiga diisi oleh Provinsi Sulawesi Utara dengan capaian indeks 75,7. Tiga Provinsi dengan capaian indeks terendah masing-masing ditempati oleh Provinsi Maluku dengan capaian indeks 45,0, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan capaian Indeks 39,9 dan terakhir Provinsi Papua dengan Capaian Indeks 24,1. (BPS, 2019) Ada tiga hal yang dipelukan untuk mempercepat pencapaian SDGs. Pertama, perlu komitmen politik yang kuat dan aksi konkret dari semua pemangku kepentingan untuk membawa pembangunan SDGs ke jalur percepatan. Kedua, perlunya penguatan kerja sama dan solidaritas internasional. Ketiga, perlu inovasi dalam penyediaan data yang real time dan new sources data (big data). (Gatra, 2020)

SDGs merupakan suatu rencana global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

7.2 Indikator Pembangunan

7.2.1 Pengertian Indikator

Pada bagian ini akan lebih memahami pengertian indikator. Pengertian indikator menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk atau keterangan. Indikator merupakan variabel yang membantu dalam mengukur berbagai macam perubahan yang terjadi baik secara langsung ataupun tidak langsung (Organization, 1981) Indikator juga dimaknai sebagai variabel – variabel yang dapat menunjukkan atau mengindikasikan kepada penggunaannya mengenai sesuatu kondisi tertentu, sehingga bisa dipakai untuk mengukur perubahan yang terjadi. (Green and Kreuter, 1993) Indikator menekankan pada variabel yang diukur, perubahan yang terjadi sebagai hasil dari variabel yang diukur, dan hasil tersebut akan memberikan petunjuk sesuatu kondisi tertentu. Sehingga, indikator akan dimaknai sebagai sesuatu atau variabel yang membantu kegiatan pengukuran berbagai macam perubahan yang terjadi, dan akan memberikan petunjuk kepada penggunaannya mengenai sesuatu kondisi tertentu.

7.2.2 Pengertian Pembangunan

Pembangunan dimaknai sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. (Kartasasmita, 1996) Selanjutnya, pembangunan dimaknai sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan Pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Tarigan, (2018) Lebih lanjut, pembangunan dimaknai sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga Negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho and Dahuri, 2004). Terakhir, pembangunan dapat dimaknai berbeda oleh satu orang dengan orang lain, wilayah yang satu dengan wilayah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan

Berdasarkan pemikiran dari para pemikir di atas, pembangunan menekankan pada proses, upaya terencana, upaya terkoordinasi, dan rangkaian usaha pertumbuhan yang dilakukan secara sadar oleh Pemerintah suatu Negara atau suatu daerah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Pembangunan dapat dimaknai berbeda oleh satu orang dengan orang lain, wilayah yang satu dengan wilayah lainnya, Negara satu dengan Negara lainnya.

Pembangunan regional yang relevan bagi konteks Indonesia adalah pembangunan dengan konsep “membangun dari pinggiran”. Konsep “membangun dari pinggiran” muncul saat calon presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo (2014), menyampaikan serangkaian agendanya yang diberi judul “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan” (Riyadi dan Bratakusumah D. S, 2005).

7.2.3 Pengertian Indikator Pembangunan

Sebelum masuk pada pengertian indikator pembangunan, sebaiknya untuk mengingat kembali makna dari kata “pembangunan” itu sendiri. Karena pengertian pembangunan tersebut akan mengantarkan kita pada arah tujuan pembangunan yang hendak dituju oleh suatu Negara.

Ketika pembangunan dimaknai sebagai pengertian ekonomi maka pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai proses, upaya terencana, upaya terkoordinasi, dan rangkaian usaha pertumbuhan yang dilakukan secara sadar oleh Pemerintah suatu Negara atau suatu daerah untuk melakukan perubahan ekonomi ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, indikator pembangunan ekonomi dapat dimaknai sebagai sesuatu atau variabel ekonomi yang mendorong kegiatan pengukuran berbagai macam perubahan ekonomi yang terjadi, melalui proses, upaya terencana, upaya terkoordinasi, dan rangkaian usaha pertumbuhan yang dilakukan secara sadar oleh Pemerintah suatu Negara atau suatu daerah untuk menghasilkan perubahan ekonomi ke arah yang lebih baik. Indikator tersebut akan memberikan petunjuk kepada penggunaannya mengenai kondisi ekonomian suatu Negara atau suatu daerah. Dengan demikian, indikator pembangunan ekonomi dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja pembangunan atau keberhasilan pembangunan.

Namun, jika pembangunan dimaknai sebagai pembangunan manusia maka pembangunan manusia dapat diartikan sebagai proses, upaya terencana, upaya terkoordinasi, dan rangkaian usaha peningkatan yang dilakukan secara sadar oleh Pemerintah suatu Negara atau suatu daerah untuk melakukan peningkatan harapan hidup dan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, indikator pembangunan manusia dapat dimaknai sebagai variabel harapan hidup dan kualitas hidup manusia yang membantu kegiatan pengukuran berbagai macam perubahan harapan hidup dan kualitas hidup yang

terjadi, melalui proses, upaya terencana, upaya terkoordinasi, dan rangkaian usaha perbaikan harapan hidup masyarakat yang dilakukan secara sadar oleh Pemerintah suatu Negara atau suatu daerah untuk menghasilkan perubahan harapan hidup dan kualitas hidup ke arah yang lebih baik. Indikator tersebut akan memberikan petunjuk kepada penggunaannya mengenai harapan hidup dan kualitas hidup suatu Negara atau suatu daerah. Dengan demikian, indikator pembangunan manusia dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja pembangunan atau keberhasilan pembangunan.

Terakhir, jika pembangunan dimaknai sebagai tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs maka pembangunan SDGs dapat diartikan sebagai proses, upaya terencana, upaya terkoordinasi, dan rangkaian usaha peningkatan yang dilakukan secara sadar oleh Pemerintah suatu Negara atau suatu daerah untuk melakukan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, indikator pembangunan SDGs dapat dimaknai sebagai variabel sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum yang membantu kegiatan pengukuran berbagai macam perubahan sosial, ekonomi, pembangunan lingkungan dan pembangunan hukum yang terjadi, melalui proses, upaya terencana, upaya terkoordinasi, dan rangkaian usaha perbaikan yang dilakukan secara sadar oleh Pemerintah suatu Negara atau suatu daerah untuk menghasilkan perubahan sosial, ekonomi, pembangunan lingkungan dan pembangunan hukum ke arah yang lebih baik. Indikator tersebut akan memberikan petunjuk kepada penggunaannya mengenai kondisi sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum suatu Negara atau suatu daerah. Dengan demikian, indikator pembangunan SDGs dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja pembangunan atau keberhasilan pembangunan.

Pergeseran paradigma pembangunan memberikan dampak pada indikator pembangunan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pembangunan secara berkelanjutan. Dengan demikian pembangunan merupakan proses yang multidimensi yang mencakup sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan berkelanjutan dapat diukur dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan hukum. Keseluruhan aspek tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menyusun perencanaan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian perbaikan aspek-aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum akan menjadi kebijakan pembangunan.

Masing – masing Negara menggunakan indikator pembangunan dapat berbeda – berbeda. Ukuran keberhasilan pembangunan di Negara-negara yang masih

misalnya mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pemerataan listrik di seluruh wilayah atau daerah, pemberian layanan kesehatan sampai pelosok daerah, dan makanan pokok yang layak dan harga yang terjangkau masyarakat desa. Akan tetapi, di Negara – negara yang telah memenuhi kebutuhan pokok, indikator pembangunan akan bergeser pada pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier (T, 2015).

Terdapat dua jenis indikator yang digunakan yaitu indikator ekonomi dan indikator non ekonomi. Indikator ekonomi terdiri dari *Gross National Product* (GNP) perkapita dengan laju pertumbuhan ekonomi dan *Gross Domestic Product* (GDP) dengan *Purchasing Power Parity* (PPP). Indikator non ekonomi terdiri dari indeks kualitas hidup (*Physical Quality Life Index*) dan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) (Kuncoro, 1919) Di sisi lain, (Arsyad L., 2016) menggunakan istilah yang berbeda untuk kedua indikator tersebut yaitu indikator moneter dan indikator non moneter. Kedua pendapat tersebut intinya sama, masing-masing indikator menunjukkan tingkat pertumbuhan dan pemerataan. Selain dua jenis indikator diatas pada bagian selanjutnya akan ditambahkan pembahasan mengenai indikator tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

7.3 Indikator Ekonomi

Tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu Negara sering menggunakan indikator pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah indikator atas kinerja perekonomian secara keseluruhan dan merupakan indikator moneter atas setiap kegiatan ekonomi suatu Negara (Arsyad L., 2016).

GNP maupun PDB merupakan ukuran untuk mengetahui pendapatan per kapita suatu Negara, GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makro – ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Indikator ini merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga, pendapatan per kapita telah menjadi indikator makro – ekonomi yang penting, meskipun memiliki beberapa kelemahan. (Pasaribu, 2012) Salah satu kelemahan mendasar dari pendapatan per kapita sebagai sebuah indikator pembangunan terletak pada ketidak mampuannya untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara utuh. Seringkali adanya kenaikan pendapatan per kapita suatu Negara tidak

disertai oleh perbaikan kualitas hidup masyarakatnya. Meskipun pendekatan ini dianggap memiliki kelemahan yang cukup mendasar, pendekatan ini masih relevan dan sering digunakan serta mudah untuk dipahami. (Arsyad L., 2016) Sebagai contoh Perekonomian Indonesia 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.434,2 triliun sehingga PDB per kapita mencapai Rp56,9 Juta atau US\$3.911,7. Kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen dibandingkan tahun 2019 (BPS, 2020) Kenaikan angka PDB per kapita tersebut tidak mencerminkan perbaikan kualitas hidup penduduk Indonesia.

7.3.1 Pendapatan Nasional

Pada pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa tolak ukur keberhasilan laju pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan kenaikan pendapatan nasional dan tingkat pendapatan per kapita dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional adalah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian Negara dalam waktu satu tahun.

Ada tiga pendekatan perhitungan pendapatan nasional yaitu:

1. Pendekatan produksi

Menurut pendekatan produksi (nilai tambah), pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah yang diciptakan oleh sektor produktif. Pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap sektor produktif dalam satu Negara selama satu periode tertentu, biasanya periode waktu tersebut adalah satu tahun. Sektor produktif tersebut terdiri dari sembilan sektor: pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, air dan gas; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; bank dan lembaga keuangan; sewa rumah, pertahanan dan jasa-jasa lainnya. Jumlah nilai tambah produksi dari barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan sektor-sektor tersebut selama satu tahun fiskal disebut GDP atau GNP. (Arsyad L., 2016) Terdapat perbedaan pengertian antara GDP dan GNP. GNP adalah jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh warga Negara yang berada di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan Gross Domestic Product (GDP) jumlah dari barang dan jasa yang terdapat di wilayah suatu Negara termasuk di dalamnya orang-orang dan perusahaan asing yang berada di wilayah tersebut. Jika GDP suatu Negara lebih besar dari GNP maka artinya penanaman modal asing (PMA) atau investasi lebih besar daripada

penanaman modal Negara tersebut di luar negeri. Teknis perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi ini adalah dengan cara menjumlahkan nilai tambah yang diciptakan. (Tarigan, 2018).

2. Pendekatan pendapatan

Menurut pendekatan ini pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga dan wiraswasta yang digunakan tersebut diberi balas jasa yang masing-masing bernama sewa, bunga, upah dan gaji serta laba. Faktor produksi tersebut dimiliki oleh seorang atau kelompok dalam masyarakat, dengan demikian balas jasanya kembali pada masyarakat sebagai pendapatan nasional. Pendapatan nasional yang dihitung dengan metode ini dikenal dengan sebutan Gross National Income (GNI), GNI dikurangi dengan penyusutan barang-barang modal disebut Net National Income (NNI). (Arsyad L., 2016)

GNI dapat diformulasikan melalui rumus : (S, 2019)

$$\text{GNI} = r + w + i + p$$

NNI dapat diformulasikan melalui rumus :

$$\text{GNI} = (r + w + i + p) - d$$

Penjelasan : r = rent atau sewa
 w = wage atau upah
 i = interest atau bunga
 p = profit atau laba
 d = depreciation atau penyusutan

3. Pendekatan pengeluaran

Pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran dari lapisan masyarakat. Pendapatan yang diterima oleh semua lapisan masyarakat akan dibelanjakan pada berbagai barang dan jasa atau di tabung (Tarigan, 2018)

Pendekatan ini mengelompokkan pengeluaran ke dalam:

1. Pengeluaran konsumsi perorangan dan rumah tangga (personal consumption expenditure) terdiri dari pengeluaran untuk barang-barang tahan lama dan tidak tahan lama;

2. Investasi domestik bruto yang terdiri dari dana bangunan-bangunan baru, alat-alat produksi yang tahan lama dan persediaan barang-barang untuk perusahaan-perusahaan;
3. Pengeluaran konsumsi Pemerintah (government expenditure);
4. Selisih antara ekspor dan impor.

GDP dapat dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh aktivitas warga Negara dalam suatu wilayah Negara, sementara GNP diukur dengan menjumlahkan seluruh aktivitas warga Negara di dalam suatu bangsa. Oleh karena itu untuk menghitung GNP mempertimbangkan aktivitas ekonomi warga Negara asing di suatu Negara dengan aktivitas warga Negara tersebut di Negara lain. Selisih aktivitas ekonomi atau Net Factor Payment (F) merupakan selisih penerimaan yang di dapat dari Negara lain dikurangi dengan pengeluaran yang dibayarkan untuk warga Negara asing. Selisih aktivitas ekonomi tersebut dinamakan.

GDP dan GNP dapat diformulasikan sebagai berikut : (S, 2019) $GDP = C + I + G + (X - M)$

$GNP = C + I + G + (X - M) + F$

Penjelasan : C = Consumption atau pengeluaran perorangan atau keluarga

I = Investation atau pembelian barang modal

G = Government expenditure atau belanja Pemerintah

X = Export atau penjualan barang ke luar negeri

M = Import atau pembelian barang dari luar negeri

7.4 Indikator Non Ekonomi

Secara umum kebijakan pembangunan dirancang untuk meningkatkan GNP secepat mungkin. Pertumbuhan yang cepat akan meningkatkan pendapatan per kapita dan ini akan dengan cepat diterjemahkan ke dalam kesejahteraan manusia. Di banyak Negara berkembang, termasuk beberapa yang paling banyak penduduknya, rata-rata GNP per kapita tumbuh sangat lambat dan sedikit manfaat untuk yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Rata – rata GNP per kapita telah meningkat pesat di beberapa Negara miskin, tetapi manfaatnya sebagian besar dirasakan hanya oleh masyarakat yang kaya. Oleh karena itu, pertumbuhan GNP per kapita tidak berdampak pada perbaikan kualitas hidup yang diharapkan. Negara - negara yang sangat kaya (diukur dengan GNP per kapita) umumnya memiliki harapan hidup yang lebih baik dan cukup tinggi, angka kematian yang rendah, dan standar kinerja kesehatan yang memuaskan.

Sementara Negara yang sangat miskin umumnya memiliki harapan hidup yang rendah, angka kematian yang tinggi dan kondisi kesehatan yang tidak memuaskan. (Morris, 1978) GNP tidak dapat diharapkan menjadi ukuran yang baik untuk mengukur pencapaian kualitas hidup (Physical Quality of Life). Tidak ada hubungan langsung antara tingkat pertumbuhan GNP dengan harapan hidup, tingkat kematian, kematian bayi, dll. Rata-rata GNP per kapita, atau rata-rata pendapatan yang dapat dibelanjakan dan dapat dirasakan oleh kelompok sosial dalam proporsi yang sangat tidak seimbang. Kelompok masyarakat yang paling miskin mungkin tidak mendapat banyak manfaat dari peningkatan pendapatan nasional. Beberapa kelompok bahkan mungkin mengalami penurunan pendapatan riil. Bahkan jika uang dibagikan kepada kelompok – kelompok termiskin, tidak ada jaminan bahwa uang tersebut akan dibelanjakan barang untuk meningkatkan asupan kalori atau meningkatkan kesejahteraan fisik penduduk (Morris, 1978). Ada sejumlah upaya yang dilakukan untuk mengukur kesejahteraan fisik dengan cara lain. Penggunaan ukuran yang didasarkan pada asumsi bahwa ada hubungan yang erat antara asupan gizi dan kesehatan dengan kualitas hidup.

7.4.1 Indeks Kualitas Hidup

Indeks Kualitas Hidup (Physical Quality of Life Index) merupakan upaya untuk mengukur kualitas hidup atau kesejahteraan suatu Negara. Nilai tersebut adalah rata-rata dari penjumlahan angka melek huruf dasar (literacy), kematian bayi (infant mortality), dan harapan hidup pada usia satu tahun (life expectation at age one), semuanya memiliki bobot yang sama pada skala 0 sampai 100.

Untuk batas atas indeks harapan hidup 100 ditetapkan usia 77 tahun (hasil studi ditemukan di Swedia). Batas bawah adalah 28 tahun (di Guinea-Bissau). Untuk batas atas tingkat kematian bayi adalah 9 kematian per 1.000 kelahiran (di Swedia). Batas bawah adalah 229 kematian per 1.000 kelahiran (di Gabon)

Langkah-langkah Menghitung Indeks Kualitas Hidup (IKH) (Arsyad L., 2016)

1. Tentukan persentase penduduk Indeks Melek Huruf (IMH). Persentase tingkat melek huruf per 100 orang dewasa.
2. Temukan angka kematian bayi (AKB) dari 1000 kelahiran.
$$\text{Indeks Kematian Bayi (IKB)} = (229 - \text{tingkat per 1.000 kematian bayi di suatu Negara}) / 2,22$$

(2,22 adalah angka pembagi yang jika terdapat tingkat kematian bayi terendah yaitu 9 bayi per 1.000 kelahiran maka akan didapatkan indeks 100.)

3. Temukan angka Harapan Hidup (HH).
 Indeks Harapan Hidup (IHH) = $(HH - 28) / 0,39$ (0,39 adalah angka yang menunjukkan bahwa bila terjadi kenaikan umur harapan hidup sebesar 0,39 akan menghasilkan 1 poin angka indeks).
4. Indeks Kualitas Hidup = $(IMH + IKB + IHH) / 3$

Jumlah bayi yang mengalami kematian (Angka Kematian Bayi) dan harapan hidup pada usia satu tahun (Angka Harapan Hidup) dapat digunakan sebagai indikator yang mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat, kecukupan gizi, kecukupan pendapatan, dan kualitas penanganan lingkungan. Angka kematian bayi tidak secara mutlak mencerminkan tingkat kecukupan gizi tetapi dapat dipicu oleh faktor lain misalnya ketersediaan air bersih, kondisi kesehatan lingkungan dan kondisi kesejahteraan ibunya. Sedangkan harapan hidup pada umur satu tahun tidak secara mutlak mencerminkan tingkat gizi dan kualitas lingkungan. Tingkat melek huruf dapat digunakan untuk mengukur tingkat keterampilan dan kesejahteraan yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan.

7.4.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. HDI menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

HDI diperkenalkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Universitas Yale dan Lord Meghnad Desai dari *London School of Economics*. Sejak saat itu, indeks ini dipakai oleh UNDP pada laporan HDI tahunannya. Amartya Sen menggambarkan indeks ini sebagai "pengukuran vulgar" oleh karena batasannya. Indeks ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekadar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. (Wikipedia, 2020)

HDI merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Indeks ini juga

berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah Negara adalah Negara maju, Negara berkembang atau Negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. HDI digunakan untuk melakukan pemeringkat kinerja pembangunan berbagai Negara di dunia. Berdasarkan HDI nya Negara – Negara di dunia ini dikelompok menjadi empat, yaitu (Arsyad L., 2016):

Kelompok Negara dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah (low human development), bila memiliki nilai HDI antara 0,350 – 0,549.

Kelompok Negara dengan tingkat pembangunan manusia yang sedang (medium human development), bila memiliki nilai HDI antara 0,550 – 0,699.

Kelompok Negara dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi (high human development), bila memiliki nilai HDI antara 0,700 – 0,799.

Kelompok Negara dengan tingkat pembangunan manusia yang sangat tinggi (very high human development), bila memiliki nilai HDI antara 0,800 – 1,000.

Menghitung Indeks Komponen

Setiap komponen HDI distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut. (BPS, 2015)

Dimensi Kesehatan

$$\text{Indeks Kesehatan} = (\text{AHH} - \text{AHH min}) / (\text{AHH maks} - \text{AHH min})$$

Dimensi Pendidikan

$$\text{Indeks HLS} = (\text{HLS} - \text{HLS min}) / (\text{HLS maks} - \text{HLS min})$$

$$\text{Indeks RLS} = (\text{RLS} - \text{RLS min}) / (\text{RLS maks} - \text{RLS min})$$

$$\text{Indeks Pendidikan} = (\text{Indeks HLS} + \text{Indeks RLS}) / 2$$

Dimensi pengeluaran

$$\text{In Pengeluaran} = (\text{In Pengeluaran} - \text{In pengeluaran min}) /$$

$$(\text{In Pengeluaran maks} - \text{In Pengeluaran min})$$

HDI dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$\text{HDI} = \sqrt[3]{((\text{IKesehatan} \times \text{IPendidikan} \times \text{IPengeluaran}))} \times 100$$

Angka Harapan Hidup Saat Lahir - AHH (Life Expectancy)

Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

Rata-rata Lama Sekolah - RLS (Mean Years of Schooling)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Angka Harapan Lama Sekolah - HLS (Expected Years of Schooling)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas di mana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Capaian HDI antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan HDI ke dalam empat kelompok, yaitu (BPS, 2015):

Kelompok wilayah dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah (low human development), bila memiliki nilai HDI < 60 .

Kelompok wilayah dengan tingkat pembangunan manusia yang sedang (medium human development), bila memiliki nilai HDI antara $60 < \text{HDI} < 70$.

Kelompok wilayah dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi (high human development), bila memiliki nilai HDI antara $70 < \text{HDI} < 80$.

Kelompok wilayah dengan tingkat pembangunan manusia yang sangat tinggi (very high human development), bila memiliki nilai HDI antara $80 < \text{HDI}$.

7.4.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Empat tahun terakhir SDGs oleh Negara-negara di dunia termasuk Indonesia telah diimplementasikan sebagai tujuan pembangunan Negara. SDGs diumumkan pada tanggal 25 September 2015 di Kantor Pusat PBB New York oleh 193 Negara sebagai komitmen Agenda Pembangunan Global. Tujuan ini merupakan kelanjutan dari Milenium Development Goals (MDGs) yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin Negara dari 189 Negara sebagai Deklarasi Milenium pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

SDGs mengimplementasikan lima Prinsip yaitu: *People, Planet, Prosperity, Peace* dan *Partnership*. Pertama *People*, SDGs bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan kelaparan, dalam segala bentuk dan dimensinya. SDGs juga untuk memastikan bahwa semua manusia dapat menikmati pendidikan dan kesehatan yang layak dan mengakses dengan mudah. SDGs harus membangun kesetaraan gender. Kedua *Planet*, SDGs bertujuan untuk melindungi planet dari penurunan kualitas ekosistem laut dan daratan. Perlindungan dari pola konsumsi dan produksi yang berlebihan yang tidak mempertimbangkan kehidupan generasi mendatang. Dengan pengelolaan sumber- sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan tindakan cepat terhadap perubahan iklim, sehingga planet dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang. Ketiga *Prosperity*, SDGs bertujuan agar seluruh manusia di bumi dapat menikmati hidup dan terpenuhi kebutuhannya, pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial dan kemajuan teknologi berjalan secara harmoni dengan alam. Keempat *Peace*, SDGs bertujuan agar masyarakat menjaga perilaku damai, adil, inklusif, dan terbebas dari ketakutan dan kekerasan. Terakhir *Partnership*, bertujuan untuk mencapai Agenda SDGs tahun 2030 melalui kerja sama global yang berlandaskan semangat solidaritas global (BPS, 2019).

SDGs mencakup 17 tujuan, yaitu :

1. Tanpa kemiskinan, mengentaskan segala bentuk kemiskinan di seluruh daerah di Indonesia.
2. Tanpa kelaparan, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi di seluruh daerah di Indonesia, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Kehidupan sehat dan sejahtera, menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia di seluruh daerah di Indonesia.
4. Pendidikan berkualitas, memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang di seluruh daerah di Indonesia.
5. Kesetaraan gender, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.
6. Air bersih dan sanitasi layak, menjamin akses air dan sanitasi untuk semua.
7. Energi bersih dan terjangkau, memastikan akses energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan, dan modern.
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, serta lapangan pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Industri, inovasi dan infrastruktur, membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi.
10. Berkurangnya kesenjangan, mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara Negara-negara.
11. Kota dan komunikasi berkelanjutan, membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.
13. Penanganan perubahan iklim, menmgambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
14. Ekosistem laut, perlindungan dan penggunaan samudra, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
15. Ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan kepunahan keragaman hayati.

16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan, menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

SDGs berpijak pada empat pilar: (1) pilar Sosial, pembangunan manusia untuk perbaikan kualitas kehidupan sosial; (2) pilar Ekonomi, pembangunan ekonomi untuk peningkatan pendapatan per kapita; (3) pilar Lingkungan, pembangunan pengelolaan lingkungan termasuk Keanekaragaman hayati. (4) pilar Hukum. Keempat pilar ditopang oleh landasan institusi tata-kelola. Keempat pilar dan landasan institusi ini bertumpu pada 17 SDGs yang diurai dalam 169 sasaran dan 241 indikator yang saling memengaruhi. Masing – masing pilar saling memengaruhi pilar lainnya dalam hubungan serasi, utuh, lestari dan berlanjut. SDGs menempatkan manusia sebagai pelaku sentral dan penikmat hasil pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia atau human wellbeing. (Alisjahbana and Murniningtyas, 2018)

Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, tujuh belas tujuan SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu;

1. Pilar pembangunan sosial: meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5
2. Pilar pembangunan ekonomi: meliputi Tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17
3. Pilar pembangunan lingkungan: meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15
4. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola: meliputi Tujuan 16

Bab 8

Pembangunan Antarwilayah Secara Berimbang

8.1 Pendahuluan

Pembangunan wilayah adalah upaya mencapai pembangunan berimbang (balance development). Isu pembangunan wilayah atau daerah berimbang yaitu tidak mengharuskan adanya kesamaan tingkat pembangunan antar daerah (equally developed), juga tidak menuntut pencapaian tingkat industrialisasi wilayah atau daerah yang seragam, juga bentuk-bentuk keseragaman pola dan struktur ekonomi daerah, atau juga tingkat pemenuhan kebutuhan dasar (self sufficiency) setiap wilayah atau daerah. Pembangunan yang berimbang adalah terpenuhinya potensi-potensi pembangunan sesuai dengan kapasitas pembangunan setiap wilayah atau daerah yang beragam (Basmar, Purba, Nugraha, et al., 2021; Purba, Purba, et al., 2021; Purba, Rahmadana, et al., 2021).

Dalam proses pembangunan ekonomi nasional, tidak terlepas dari pembangunan ekonomi daerah atau regional. Pembangunan ekonomi daerah adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk pola kemitraan pemerintah daerah dan sektor swasta dalam menciptakan lapangan kerja baru dan perangsang

pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh keunggulan komparatif suatu daerah, spesialisasi wilayah, serta potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut (Basmar, Purba, Damanik, et al., 2021; Purba, Arfandi, et al., 2021)(Lincoln, 1999).

Istilah pola keruangan erat kaitannya dengan istilah-istilah seperti pemusatan, penyebaran, pencampuran dan keterkaitan, serta posisi atau lokasi dan lain-lain. Istilah pola pemanfaatan ruang berkaitan dengan aspek-aspek distribusi spasial sumberdaya dan aktivitas pemanfatannya menurut lokasi, setiap jenis aktivitas menyebar dengan luas yang berbeda-beda dan tingkat penyebaran yang berbeda-beda pula. Dalam cara pandang yang lain, sumberdaya dan aktivitas manusia yang memanfaatkannya terkonsentrasi dengan tingkat yang berbeda-beda. Secara formal, ekspresi pola pemanfaatan ruang umumnya digambarkan dalam berbagai bentuk peta (Rustiadi, 2018).

Kemampuan memacu pertumbuhan suatu wilayah atau negara sangat tergantung dari keunggulan atau daya saing sektor-sektor ekonomi di wilayahnya. Nilai strategis setiap sektor di dalam memacu menjadi pendorong utama (prime mover) pertumbuhan ekonomi wilayah berbeda-beda. Sektor ekonomi suatu wilayah dapat dibagi dalam dua golongan yaitu sektor basis di mana kelebihan dan kekurangan yang terjadi dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut menyebabkan terjadinya mekanisme ekspor dan impor antar wilayah. Artinya industri basis ini akan menghasilkan barang dan jasa, baik untuk pasar domestik daerah maupun pasar luar wilayah atau daerah. Sedangkan sektor non-basis adalah sektor dengan kegiatan ekonomi yang hanya melayani pasar di daerahnya sendiri dan kapasitas ekspor daerah belum berkembang (Purba, 2013, 2019b; Sari et al., 2020; Marit, Nainggolan, et al., 2021; P. A. Siregar et al., 2021).

Pengembangan wilayah memandang pentingnya keterpaduan sektoral, spasial, serta keterpaduan antar pelaku (institutions) pembangunan di dalam dan antar wilayah. Keterpaduan sektoral menuntut adanya keterkaitan fungsional yang sinergis antar sektor pembangunan, sehingga setiap kegiatan pembangunan dalam kelembagaan sektoral dilaksanakan dalam kerangka pembangunan wilayah. Wilayah yang berkembang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan anantara sektor ekonomi wilayah, dalam arti terjadi transfer input dan output barang dan jasa antar sektor yang sangat dinamis (Rustiadi, 2018; Marzuki et al., 2021; Sudarmanto et al., 2021).

8.2 Pembangunan Antar Wilayah

Parr (1999) dalam Rustiadi (2018) mengemukakan bahwa wilayah tumbuh dan berkembang dapat didekati melalui teori sektor (sector theory) dan tahapan perkembangan (development stages theory). Teori sektor diadopsi dari Fisher dan Clark yang mengemukakan bahwa perkembangan wilayah dihubungkan dengan transformasi struktur ekonomi dalam tiga sektor utama, yakni primer (pertanian, kehutanan, perikanan), sekunder (pertambangan, manufaktur, konstruksi, publik utilities) dan tersier (perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa). Perkembangan ditandai oleh penggunaan sumberdaya (dan manfaatnya) yang menurun di sektor primer, meningkat di sektor tersier dan meningkat hingga pada suatu tingkat tertentu di sektor sekunder.

Rondinelli dan Puma (1995) mengungkapkan indeks perkembangan wilayah dapat dilihat secara sederhana dalam tiga indikator, yaitu :

- a) Karakteristik sosial ekonomi dan demografi diukur melalui pendapatan perkapita, kebutuhan fisik minimum, Produk Domestik Regional Bruto, investasi jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, jumlah usia harapan hidup, tingkat kematian bayi per 100 penduduk, jumlah fasilitas kesehatan.
- b) Kontribusi industri dan produksi pertanian diukur melalui persentase penyerapan tenaga kerja jumlah perusahaan komersial, luas total lahan pertanian dan produktivitas pertanian, luas lahan sawah, luas lahan pertanian untuk hidup layak.
- c) Transportasi diukur melalui kualitas jalan, kepadatan jalan, tipe jalan dan panjang jalan.

Ibery (1985) dalam Rustiadi (2018) mengungkapkan bahwa geografi pertanian merupakan usaha untuk menjelaskan mengenai variasi aktivitas pertanian secara spasial pada suatu wilayah di permukaan bumi. Geografi pertanian merupakan satu bidang yang mengkaji dan menguraikan perbedaan kawasan-kawasan yang diliputi oleh tanaman di permukaan bumi dan boleh dikatakan "ilmu pertanian permukaan bumi berubah, dengan segala keterkaitan alam, ekonomi, dan sosial yang terkait sebagaimana tercermin spasial". Geografi pertanian merupakan gabungan dari kegiatan ekonomi, sosial dan alam yang saling berkaitan dan berkesinambungan.

Tujuan geografi pertanian menurut Singh dan Dhilon (1984) dalam Muta'ali, Marwast dan Christanto (2018) yaitu :

- a) Perbedaan macam-macam pertanian yang tersebar di muka bumi dan fungsinya dalam spasial.
- b) Tipe-tipe pertanian yang dikembangkan di daerah tertentu, persamaan dan perbedaan dengan daerah lain.
- c) Menganalisa pelaksanaan sistem pertanian dan proses perubahannya.
- d) Arah dan isi perubahan dalam pertanian.
- e) Batas wilayah-wilayah produksi hasil panen dan kombinasi hasil panen atau perusahaan pertanian
- f) Menghitung dan menguji tingkat perbedaan antar wilayah
- g) Identifikasi wilayah yang produktivitas pertaniannya lemah; dan
- h) Mengungkap wilayah pertanian yang stagnasi, transisi, dan dinamis.

Pembangunan pertanian pada dasarnya adalah proses transformasi pertanian. Transformasi pertanian yaitu suatu proses perubahan pada berbagai aspek di bidang pertanian. Perubahan yang dimaksud bukan hanya pada teknologi namun lebih jauh lagi pada kelembagaan ekonomi dan sosial pertanian. Modernisasi pertanian dalam sistem perekonomian campuran di beberapa negara berkembang juga dapat dikatakan sebagai suatu proses transisi yang berlangsung secara bertahap tetapi berkesinambungan, yakni pola produksi yang subsistem menjadi sistem pertanian yang terdiversifikasi dan terspesialisasi (Todaro and Smith, 2020).

Soekartawi (2003), Proses transformasi ekonomi nasional di mana peranan sektor pertanian tergeser oleh sektor ekonomi yang lain seperti industri, perdagangan dan konstruksi adalah wajar terjadi di Negara yang sedang membangun. Proses transformasi ini berjalan secara alami dan terjadi di mana-mana termasuk pengalaman di negara maju. Ciri transformasi struktural ini dapat dilihat pada peran relatif sektor pertanian dan sumbangannya pada PDB serta penyerapan tenaga kerja.

Ada 4 hal yang dapat dicatat sehubungan dengan adanya proses transformasi antara sektor pertanian dan nonpertanian yaitu:

- a) Adanya indikasi kekakuan di bidang teknologi, investasi dan tingkat ketrampilan tenaga kerja di sektor pertanian; sehingga sektor ini tidak mampu bersaing dengan sektor nonpertanian.
- b) Sektor nonpertanian khususnya industri, perdagangan dan konstruksi yang kontribusinya naik begitu cepat terhadap PDB, ternyata tidak

mampu banyak menyerap tenaga kerja; yang memberikan indikasi bahwa kegiatan industri yang ada selama ini lebih banyak berorientasi pada industri padat modal.

- c) Sebagian besar produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian yang rendah karena tingkat pendidikan mereka yang rendah pula; sehingga terjadi stagnasi tenaga kerja di sektor pertanian; sehingga perpindahan tenaga kerja di sektor nonpertanian relative lama.
- d) Sektor pertanian diperlukan untuk mencukupi kebutuhan pangan (swasembada pangan) dan untuk meningkatkan penerimaan devisa melalui ekspor. Namun nilai tukar produk pertanian masih begitu rendah bila dibandingkan dengan nilai tukar produk sektor nonpertanian khususnya industri (Simarmata et al., 2021).

Akibat keterbatasan sumberdaya yang tersedia, maka dalam suatu perencanaan pembangunan diperlukan adanya skala prioritas pembangunan. Dari sudut dimensi sektor pembangunan, suatu skala prioritas didasarkan atas pemahaman bahwa pertama, setiap sektor memiliki sumbangan langsung dan tidak langsung yang berbeda terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan (penyerapan tenaga kerja, pendapatan wilayah, dan lain-lain). Kedua, setiap sektor memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Ketiga, aktivitas sektoral tersebar secara tidak merata dan spesifik, beberapa sektor cenderung memiliki aktivitas yang terpusat dan terkait dengan sebaran sumberdaya alam, buatan (infrastruktur) dan sosial yang ada (Purba, 2020b; Purba, Nainggolan, et al., 2020; Purba, Sudarmanto, et al., 2020; Marit, Revida, et al., 2021; Purba, Albra, et al., 2021; Suleman et al., 2021).

Atas dasar pemikiran di atas, dapat dipahami bahwa di setiap wilayah selalu terdapat sektor-sektor yang bersifat strategis akibat besarnya sumbangan yang diberikan dalam perekonomian wilayah serta keterkaitan sektoral dan spasialnya. Perkembangan sektor strategis tersebut memiliki dampak langsung dan tidak langsung yang signifikan. Dampak tidak langsung akibat perkembangan suatu sektor berpengaruh terhadap perkembangan sektor-sektor lainnya, dan secara spasial berpengaruh secara luas di seluruh wilayah sasaran.

8.3 Pembangunan Wilayah

Teori-teori pembangunan memuat berbagai pendekatan ilmu sosial yang berusaha menangani masalah keterbelakangan. Teori pembangunan benar-benar lepas landas hanya setelah diketahui bahwa persoalan pembangunan di Dunia Ketiga bersifat khusus dan secara kualitatif berbeda dari “transisi orisinil”. Sepanjang evolusinya, teori pembangunan menjadi semakin kompleks dan nondisipliner. Dengan demikian, tidak akan ada definisi baku dan final mengenai pembangunan, yang ada hanyalah usulan mengenai apa yang seharusnya diimplikasikan oleh pembangunan dalam konteks tertentu (Syamsul, 2005).

Salah satu teori pembangunan wilayah adalah pertumbuhan tak berimbang (*unbalanced growth*) yang dikembangkan oleh Hirschman dan Myrdal. Pengembangan wilayah merupakan proses perumusan dan pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan dalam skala supra urban. Pembangunan wilayah pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan sumber daya alam secara optimal melalui pengembangan ekonomi lokal, yaitu berdasarkan kepada kegiatan ekonomi dasar yang terjadi pada suatu wilayah.

Teori pertumbuhan tak berimbang memandang bahwa suatu wilayah tidak dapat berkembang bila ada keseimbangan, sehingga harus terjadi ketidakseimbangan. Penanaman investasi tidak mungkin dilakukan pada setiap sektor di suatu wilayah secara merata, tetapi harus dilakukan pada sektor-sektor unggulan yang diharapkan dapat menarik kemajuan sektor lainnya. Sektor yang diunggulkan tersebut dinamakan sebagai *leading sektor*.

Sesungguhnya teori pembangunan terkait erat dengan strategi pembangunan, yakni perubahan struktur ekonomi dan pranata sosial yang diupayakan untuk menemukan solusi yang konsisten bagi persoalan yang dihadapi. Berbagai pendekatan menyangkut tema-tema kajian tentang pembangunan, satu di antaranya adalah mengenai isu pembangunan wilayah. Secara luas, pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan (Nugroho, 2004).

8.3.1 Ketimpangan Pembangunan

Menurut Kuncoro (2006), kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat, sebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (endowment factor). Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut.

Ketimpangan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini terjadi disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Adanya perbedaan ini menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (Developed Region) dan wilayah terbelakang (Underdeveloped Region). Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Sjafrizal, 2008).

Ekonomi merupakan sistem kegiatan manusia yang berkaitan dengan distribusi, konsumsi dan pertukaran barang dan jasa ataupun upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai tingkat kemakmuran hidup. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu “Oikos” yang artinya adalah keluarga atau rumah dan “Nomos” artinya adalah peraturan atau hukum. Sehingga secara garis besar dapat diartikan sebagai suatu “manajemen rumah tangga”.

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan antar wilayah mula-mula dimunculkan oleh Douglas C North dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lebih dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2008).

Menurut Hipotesa Neo-Klasik dalam Sjafrizal (2008), pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesa ini, bahwa pada negara-negara

sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk huruf u terbalik.

Kebenaran Hipotesa Neo-Klasik ini kemudian diuji kebenarannya oleh Jeffrey G Williamson pada tahun 1966 melalui studi tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang dengan menggunakan data time series dan cross section. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hipotesa Neo-Klasik yang diformulasi secara teoritis ternyata terbukti benar secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah, tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya (Sjafrizal, 2008).

8.3.2 Ukuran Ketimpangan Antarwilayah

Ukuran ketimpangan antar wilayah yang mula-mula ditemukan adalah Williamson Index yang digunakan dalam studi Jeffrey G Williamson pada tahun 1966. Istilah Williamson Index muncul sebagai penghargaan kepada Jeffrey G Williamson yang mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Walaupun indeks ini mempunyai kelemahan yaitu sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun demikian indeks ini cukup lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Berbeda dengan Gini Rasio yang lazim digunakan dalam mengukur distribusi pendapatan, Williamson Index menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita sebagai data dasar. Karena yang dibandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok (Sjafrizal, 2008).

8.3.3 Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Pembangunan

Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah menurut Sjafrizal (2012) yaitu:

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam

Perbedaan kandungan sumber daya alam akan memengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif

murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Contohnya adalah Minyak dan gas alam, batubara, tingkat kesuburan lahan.

2. Perbedaan kondisi demografis

Kondisi demografis akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat setempat. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Contohnya adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan.

3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah apabila mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat di jual ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah di mana konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Contohnya adalah terdapatnya sumberdaya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu, misalnya minyak bumi, gas, batubara dan bahan mineral lainnya. Terdapat lahan yang subur juga turut memengaruhi, khususnya menyangkut pertumbuhan kegiatan

pertanian. Meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut dan udara, juga ikut memengaruhi konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah.

5. Alokasi dana pembangunan antar wilayah

Alokasi dana ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Pada sistem pemerintahan otonomi maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih rendah. Untuk investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Di mana keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta. Keuntungan lokasi ditentukan oleh biaya transpor baik bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Oleh karena itu investasi akan cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.

8.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa atau peningkatan pendapatan nasional, dengan hal ini dapat dikatakan bahwa suatu perekonomian mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat.

Berikut ini faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, antara lain:

- a) Sumber daya alam yang tersedia
- b) Modal untuk pengelolaan sumber daya alam yang tersedia
- c) Sarana dan prasarana yang menunjang

Menurut Djojohadikusumo (1994) pertumbuhan ekonomi berfokus pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatkan hasil produksi dan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Dalam hal ini berkaitan dengan output total (GDP) dan jumlah penduduk, karena output perkapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi, kenaikan output perkapita harus dianalisis

dengan melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak, dan jumlah penduduk di pihak lain, pertumbuhan ekonomi mencakup GDP total dan pertumbuhan penduduk (Ashoer et al., 2021; Damanik et al., 2021; Faried et al., 2021; Munthe et al., 2021).

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dengan kata lain, pertumbuhannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya (Sukirno, 2004). Pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah dalam kehidupan masyarakat, sehingga penting untuk melakukan penghitungan pada pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk menghitungnya adalah dengan menghitung nilai uang. Nilai uang tersebut terdapat pada produk domestik bruto (PDB) (B. Purba et al., 2019; Bonaraja Purba et al., 2019; Purba, 2019a, 2020a; Siagian et al., 2020).

8.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kondisi ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) yang memiliki arti sebagai besarnya nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki sedikit perbedaan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Bruto (PDB) diperuntukkan untuk menghitung pendapatan nasional, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDR) diperuntukkan untuk skala daerah, sehingga PDRB merupakan total nilai produksi barang dan jasa pada suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Keduanya menjadi indikator utama dalam menilai produktif suatu negara dan daerah serta kesejahteraan dalam suatu negara atau daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB pada dasarnya merupakan nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang

berlaku pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasar (Adisasmita, 2013; Damanik et al., 2021; Nainggolan et al., 2021; Rahmadana et al., 2021; R. T. Siregar et al., 2021).

PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Nilai PDRB per kapita didapatkan dari hasil bagi antara total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB memiliki manfaat sangat banyak dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi wilayah. Beberapa manfaatnya antara lain sebagai indikator tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan per kapita, kemakmuran, kenaikan dan penurunan daya beli masyarakat, tingkat inflasi dan deflasi, menggambarkan kondisi ekonomi yang terjadi, tetapi juga menggambarkan perekonomian dimasa lalu dan kemungkinan-kemungkinan prediksi perubahan dimasa yang akan datang (Sjafrizal and Elfindri, 2008; Adisasmita, 2013; Muta'ali, 2019).

1) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran didapatkan dari nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Untuk sektor pemerintahan dan usaha yang sidatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha (Bunga neto, sewa tanah, dan keuntungan) tidak diperhitungkan.

2) Pendekatan Pendapatan

PDB dan PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang dimaksudkan adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya belum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

8.4.2 Teori Indeks Pemerataan Koefisien Variasi (KV)

Teknik pengukuran distribusi keragaman (variasi) dapat dilakukan dengan mengukur varian dan standart deviasi dan rata-rata. Standar deviasi (simpangan baku) merupakan akarkuadrat dari varian. Jika semakin mendekati nilai rata-rata berarti terdapat pemerataan, sebaliknya jika nilai standar deviasi semakin besar maka perbedaan semakin besar. Perbandingan antar nilai standar deviasi dan rata-rata ini disebut dengan koefisien variasi (Muta'ali, 2015).

Penggunaan koefisien variasi dalam mengukur pemerataan hasil-hasil pembangunan sangat bermanfaat. Beberapa indikator tingkat perkembangan wilayah seperti PDRB, PDDR/B/Kapita, Jumlah Penduduk, Luas lahan terbangun dan sebagainya yang dinilai koefisien variasinya dapat menggambarkan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Koefisien Variasi yang mendekati nol menunjukkan indikasi semakin meratanya pembangunan suatu wilayah berdasarkan aspek yang diamati dan demikian sebaliknya.

8.4.3 Teori Indeks Keseimbangan Pertumbuhan Antarsektor (Sj)

Solow dan Samuelson mengembangkan model *balanced growth under constant return to scale* yang pada dasarnya ingin menentukan keseimbangan pertumbuhan wilayah yang dihasilkan dari produksi sektor-sektor di dalamnya. Dalam perhitungan PDRB mendasarkan pada produksi, komponen pertumbuhan wilayah ditentukan oleh pertumbuhan produksi dan kontribusi sektor-sektor di dalamnya. Model ini digunakan untuk menganalisis masalah perbedaan pertumbuhan antar sektor terhadap pertumbuhan ekonomi rata-rata suatu daerah dalam periode tertentu. Sehingga, pada tahap selanjutnya akan diperoleh gambaran keseimbangan pertumbuhan pada suatu daerah (Muta'ali, 2019).

8.4.4 Teori Indeks Williamson (IW)

Indek ketimpangan Williamson digunakan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar daerah, misalnya antar wilayah dalam suatu kabupaten, antar kabupaten/kota dalam suatu provinsi maupun antar provinsi dan negara. Indeks Williamson pada dasarnya melihat perbandingan antar PDRB per kapita suatu wilayah dengan jumlah penduduk dalam wilayah tersebut. Indeks ini ditemukan oleh Jeffrey G. Williamson (1965) yang meneliti hubungan antar disparitas regional dan tingkat pembangunan ekonomi antar negara maju dan sedang berkembang (Muta'ali, Marwast and Christanto, 2018).

Nilai indeks kesenjangan Williamson antardaerah adalah $0 < IW < 1$ artinya bila nilai indeks Williamson semakin besar maka semakin tinggi kesenjangan antar wilayah, dan apabila nilai yang diperoleh mendekati nol maka indikasi terjadinya ketimpangan regional kecil atau semakin mengecil.

Sebagai panduan, dapat digunakan kriteria ketimpangan adalah sebagai berikut:

- a. Jika $0,1 < IW < 0,35$ maka tingkat ketimpangan termasuk ringan
- b. Jika $0,35 < IW < 0,50$ maka tingkat ketimpangan termasuk sedang
- c. Jika $IW > 0,50$ maka tingkat ketimpangan termasuk berat (Sjafrizal and Elfindri, 2008)

Bab 9

Keterkaitan Desa Kota

9.1 Pendahuluan

Keterkaitan desa dan kota merupakan aspek yang penting untuk mewujudkan pembangunan wilayah berkelanjutan. Desa dan kota memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam mendukung aktivitas ekonomi yang potensial pada wilayah tertentu. Untuk mencapai keseimbangan dan keterkaitan desakota yang saling menguntungkan, maka sangat diperlukan identifikasi fungsi desa dan kota pada suatu wilayah serta menentukan keterkaitan di antaranya.

Rural urban (rurban) linkage merupakan konsep pengembangan wilayah yang menitikberatkan pada keseimbangan antara desa dan kota dalam menjalankan fungsinya untuk kegiatan ekonomi, sosial, dan sebagainya. (Tacoli, C, 2003) menjelaskan bahwa keterkaitan positif pada desa dan kota dapat berupa keterkaitan ke belakang (backward) dan keterkaitan ke depan (forward). Terjadinya keterkaitan tersebut ditandai dengan adanya pergerakan, perpindahan, atau aliran (flow) manusia, produksi, komoditas, modal, serta informasi antar wilayah (Sietchiping, R, 2014).

Keterkaitan desa-kota dapat mensinergikan seluruh sektor ekonomi yang berkembang pada wilayah tertentu dan bukan hanya pada sektor unggulan sehingga konsep ini sangat berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat lokal (Berdegue, 2015). Namun, pada kenyataannya, pembangunan

wilayah yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, bukan pada pemerataan aktivitas dan manfaat dari kegiatan ekonomi, seperti yang terjadi di Dar es Salaam, Tanzania (Adam, C, 2018), Chile, Colombia, dan Meksiko (Berdegue, 2015), Assam, India (Das, 2013), serta beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Rigg, J, 1998). Pemerataan aktivitas dan manfaat tersebut bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga dalam keruangan (kewilayahan).

Hambatan tersebut kemudian semakin pelik karena adanya bias fungsi antara desa dan kota (Kim, S. M, 2015). Dalam perkembangannya saat ini, desa dan kota hanya dipandang hanya dari sisi administratif. Padahal, sebenarnya desa dan kota memiliki karakteristik fisik, sosial, dan ekonomi yang berbeda (Bintarto, 1989). Apabila desa dan kota difungsikan sesuai dengan karakteristiknya, maka dapat terbentuk keterkaitan atau linkage di dalamnya, yang tentunya sangat menguntungkan bagi perkembangan ekonomi.

9.2 Ciri-Ciri Daerah Perdesaan dan Perkotaan

Secara umum daerah perdesaan ditandai oleh struktur kegiatan penduduk berbasis agraris atau pertanian, kepadatan penduduk lebih rendah dibanding kepadatan penduduk perkotaan, cara hidup ataupun pola budaya yang dekat dengan pemanfaatan sumber daya alam, tempat tinggal penduduk berkelompok dan tersebar, potensi tenaga kerja dengan pendidikan baik agak langka, sistem organisasi sederhana berbasis kegiatan subsisten atau primer, dan sebagainya.

Sebaliknya ciri masyarakat perkotaan ditandai oleh struktur masyarakat berbasis perdagangan dan jasa, kepadatan penduduk rapat, tempat tinggal penduduk berkelompok, tenaga berpendidikan relatif tinggi, sistem organisasi kerja yang kompleks berbasis kegiatan formal. Kawasan perkotaan juga dianggap sebagai tempat terjadinya proses pemusatan kekuasaan dan perubahan budaya, pusat kreativitas yang menyebabkan terjadinya pola perkembangan kehidupan masyarakat dan lingkungan fisiknya sangat berbeda dengan kawasan perdesaan yang biasa disebut pinggiran.

Banyak ahli yakin, walaupun ciri dan kegiatan kedua masyarakat itu berbeda, tidak berarti bahwa tingkat kesejahteraan harus berbeda. Terlebih lagi

seharusnya tidak ada perbedaan perlakuan dalam memberikan pelayanan antara masyarakat perdesaan dan perkotaan, misalnya terhadap standar pelayanan kebutuhan dasar, standar pelayanan prasarana, standar pelayanan teknologi dasar. Kesimpulan sementara ini terhadap terjadinya kesenjangan secara umum disebabkan oleh ketidakseimbangan kemampuan dan kesempatan yang diperoleh antara masyarakat perdesaan dan perkotaan.

Terdapat dugaan bahwa masyarakat perdesaan di Indonesia mempunyai posisi yang kurang diuntungkan dari adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah, yang kurang memihak, yang menyebabkan proses produksi dan kapitalisasi tidak berkembang secepat yang terjadi di perkotaan. Disamping itu di perdesaan juga sering terjadi migrasi sumberdaya manusia ke daerah lain yang lebih maju. Akibatnya secara keseluruhan respons terhadap proses pembangunan tidak optimal, walaupun input kesempatan yang diberikan kepada masyarakat mungkin sama dengan kesempatan yang diberikan terhadap masyarakat di daerah perkotaan.

Kecenderungan ini dapat diubah jika alokasi sumberdaya pembangunan dan proses manajemen dapat diarahkan secara seimbang kepada masyarakat perdesaan agar tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat perdesaan dan perkotaan berkurang. Salah satu hipotesis yang diajukan adalah jika produksi dan produktivitas di perdesaan lebih berkembang, akan terjadi diversifikasi yang selanjutnya akan diikuti dengan peningkatan pendapatan dan tabungan di masyarakat, sehingga terjadi akumulasi modal dan peningkatan teknologi di masyarakat. Salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan timbulnya percepatan peningkatan produksi dan produktivitas yang mendorong perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan tabungan, serta kapitalisasi di masyarakat perdesaan adalah jika terjadi keterkaitan ekonomi yang erat dengan arus perdagangan dengan pihak luar (Kakazu, n.d.).

Hal ini dapat diartikan bahwa peningkatan dan perubahan struktur ekonomi perdesaan dapat terjadi bila terdapat kemampuan masyarakat untuk menjual produk dan jasa ke pasaran luar kawasan, terjadi transaksi ekonomi antar produsen dan pembeli, antar sektor usaha, antar daerah, bahkan dengan negara lain (Suparmini, 2007). Proses rekayasa keterkaitan inilah yang diduga sebagai landasan upaya meningkatkan dan mengubah kehidupan masyarakat perdesaan menjadi lebih berkembang, karena kegiatan produksi dapat memperbesar pendapatan masyarakat, mengubah pola pendapatan dan pengeluaran keluarga yang makin setara dengan masyarakat kota, atau dikatakan sebagai kehidupan yang modern.

Pemahaman tersebut didasarkan pada pemikiran dasar bahwa pada dasarnya masyarakat perdesaan pun bersifat dinamis untuk dapat mengalami proses modernisasi, jika terjadi perubahan struktur ekonomi sosial. Modernisasi merupakan wujud nyata proses urbanisasi, di mana urbanisasi merupakan proses yang digerakkan oleh perubahan struktural dalam masyarakat, sehingga daerah yang dulunya merupakan perdesaan lambat laun menjadi perkotaan atau masyarakat berubah mempunyai ciri seperti kehidupan kota (Suparmini, 2007).

Pengertian tersebut dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan (a) apakah perubahan struktural masyarakat perdesaan menjadi bercirikan seperti masyarakat perkotaan dapat berlangsung di kawasan perdesaan namun masih sesuai dengan ciri dasar pembagian kerja di perdesaan yang berbasis ekonomi pertanian; (b) apakah nilai kesetaraan kehidupan masyarakat perdesaan dengan kehidupan masyarakat perkotaan mempunyai nilai yang sama, mengingat masing-masing mempunyai ciri yang berbeda. Secara umum nilai kesetaraan dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat, yang diukur dari kesetaraan mendapatkan lapangan kerja, dan pendapatan. Nilai pendapatan itu harus dapat dinikmati untuk dapat memberikan daya atau kemampuan mencukupi baik kebutuhan primer seperti kebutuhan pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, maupun kebutuhan sekunder untuk kenyamanan hidup dan kualitas kehidupan yang setara antara masyarakat perdesaan dan perkotaan.

9.3 Kegiatan Produksi Masyarakat Desa Kota

Hidup bermasyarakat merupakan sekelompok orang atau manusia yang hidup bersama yang mempunyai daerah atau tempat tertentu untuk jangka waktu yang lama. Masing-masing anggotanya saling berhubungan satu sama lain, hubungan yang di maksudkan baik itu sikap, tingkah laku ataupun perbuatan. Segala tingkah laku dan perbuatan itu diatur dalam tata tertib, undangundang, peraturan tertentu, yang biasanya di sebut hukum adat. Kehidupan bermasyarakat umumnya berbeda-beda antara masyarakat satu dengan lainnya, perbedaan itu dapat di sebabkan oleh antara lain struktur masyarakat tersebut dan juga faktor tempat atau daerah yang mempunyai peranan penting . Perbedaan yang menonjol tampak pada kehidupan masyarakat desa dan masyarakat kota. Dalam kehidupan masyarakat desa gotong royong merupakan ciri kehidupan

masyarakat yang menonjol. Faktor gotong royong ini dapat mendekatkan rasa kekeluargaan yang mempererat hubungan, memperat solidaritas antara anggota masyarakat satu dengan yang lainnya. Demikian pula dengan factor pendidikan, umumnya pendidikan di pedesaan lebih rendah di banding dengan masyarakat perkotaan.

Hal ini juga menyebabkan perbedaan antara perkembangan masyarakat desa dan kota. Masyarakat dengan Pendidikan yang lebih maju akan mendorong perkembangan masyarakat lebih cepat, begitu pula sebaliknya. Faktor ekonomi, perkembangan perekonomian di pedesaan lebih rendah dibanding perkotaan, hal ini dapat di ketahui missal dari besarnya income perkapita masyarakat pedesaan. Oleh karena itu kebutuhan sehari-hari lebih sederhana disebabkan kemampuan untuk membeli barang-barang kebutuhannya. Kota tergantung pada desa dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan, seperti beras, sayuran, buah-buahan, daging, dan ikan. Desa juga merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi jenis-jenis pekerjaan tertentu di kota, misalnya buruh bangunan dalam proyekproyek perumahan, proyek pembangunan atau perbaikan.

Produksi merupakan suatu proses atau kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan sektor-sektor produksi dalam waktu tertentu. Membuat produk di dalam perusahaan merupakan kegiatan yang cukup penting dan sangat menentukan. Dalam pandangan sistem penggolongan administrasi “kota” di lihat sebagai pusat dominasi bertingkat dari atas ke bawah melalui sistem administrasi Negara. Melihat realitas ini jelas sekali bahwa kota berkedudukan di atas, sedangkan desa di tempatkan di posisi bawah. Hal ini dapat dilihat dari bentuk hubungan di mana masyarakat pedesaan dan perkotaan bukanlah dua komunitas yang terpisah satu sama lain. Akan tetapi, keadaan yang wajar di antara keduanya terdapat hubungan yang erat, bersifat ketergantungan. Sebab antara desa dan kota terdapat hubungan yang saling membutuhkan. Kota tergantung pada desa dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan, seperti beras, sayuran, buah-buahan, daging, dan ikan. Desa juga merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi jenis-jenis pekerjaan tertentu di kota, misalnya buruh bangunan dalam proyek-proyek perumahan, proyek pembangunan, atau perbaikan jalan raya, dan jembatan. Perkembangan perbedaan biasanya diidentifikasi dengan perkembangan kota-kota besar, dan pertanian di desa sebagai daerah tempat bercocok tanam yang mempunyai hubungan tetap dengan kota. Perjalanan evolusi kebudayaan sering dimulai dari pusat-pusat khusus desa, yang menuntutnya menjadi kota besar. Desa pun tidak

jarang dikunjungi secara berkala oleh sebagian tokoh-tokoh penting dari kota yang memiliki kepentingan terhadap desa ini.

Relasi kota dan desa juga dapat terorganisasi melalui mekanisme pasar yang di tempat tersebut terjadi tukar-menukar bahan yang menjadi produksi khusus desadesa di pasar daerah. Dalam sistem pasar yang besar, desa merupakan seksi-seksi yang dibuat pasar “jaringan”, yang menghubungkan desa dengan daerah luar yang lebih luas. Kegiatan perekonomian masyarakat lapisan bawah merupakan ekonomi rakyat. Ekonomi pedesaan pada dasarnya merupakan ekonomi rakyat. Menurut Ginandjar kartasasmi (1995 : 17) dalam (Syukur, 2018) ekonomi rakyat adalah kehidupan ekonomi seadanya dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam setempat, yang memiliki ciri-ciri (1) bersifat tradisional; (2) skala usahanya kecil dan (3) subsisten. Karena itu, dalam ekonomi rakyat, produksi diarahkan untuk konsumsi sendiri, kegiatan atau usahanya bersifat sekedar untuk bertahan hidup. Jika terdapat kelebihan hasil produksi atas kebutuhannya sendiri, maka kelebihan tersebut akan dijual ke pasar. Dengan demikian produksi belum ditujukan untuk kepentingan pasar. Sifat tradisional ekonomi rakyat ditandai dan jenis usahanya melestarikan usahanya yang telah dirintis pendahulunya. Bentuk usahanya bersifat perseorangan dan teknologi yang digunakan masih relative sederhana. Kecilnya skala usaha yang dilakukan di sebabkan terbatasnya modal dan peralatan yang di gunakan.

9.4 Konsep Keterkaitan Desa-Kota Di Indonesia

Dari waktu ke waktu, banyak konsep pengembangan wilayah yang muncul telah mewarnai dan berusaha menjawab permasalahan-permasalahan suatu wilayah dan perkotaan dalam berbagai konteks dan dinamika di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Di satu sisi, konsep-konsep yang muncul telah memberikan efek positif terhadap pengembangan suatu wilayah atau kota, namun di sisi lain masih menyisakan dan bahkan menimbulkan permasalahan-permasalahan lain. Salah satu tujuan munculnya konsep-konsep pengembangan wilayah adalah untuk menjawab isu ketimpangan pengembangan wilayah antara urban dan rural. Oleh karena itu, pada bagian ini akan menganalisa beberapa konsep atau teori pengembangan wilayah yang diharapkan mampu

memberikan opportunities, constraints, dan limitations terhadap munculnya konsep rural-urban linkage dalam suatu kerangka pengembangan wilayah yang terpadu (integrated regional development). Berdasarkan fungsi dan sejarah perkembangannya, analisa paper ini mengambil konsep pemikiran dari (Rondinelli, D, 1985), yaitu dengan membaginya kedalam 3 kelompok utama perencanaan wilayah, yaitu mulai dari (i) Konsep Growth Poles (centralized regional planning) (ii) konsep agropolitan (decentralized regional planning) (iii) functional spatial integration yang mengarah pada keterkaitan desa-kota.

9.4.1 Konsep Development From Above (Growth Poles)

Perencanaan Pembangunan wilayah di Indonesia secara historik pada awalnya menganut konsep Kutub Pertumbuhan (Growth Pole) yang awalnya dirancang oleh Francois Perroux (1950) yang kemudian diperkaya oleh Gurnal Mirdal (1956) dan Hirschman (1958) melalui konsep Pusat – Pinggiran (Center - Pheriphery) (Sawitri, D, 2006). Konsep ini menyatakan bahwa pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak, tetapi pertumbuhan terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub pertumbuhan dengan intensitas yang berubah-ubah. Lalu pertumbuhan itu menyebar sepanjang saluran yang beraneka ragam dan dengan pengaruh yang dinamis terhadap perekonomian wilayah (Glasson, 1978). Konsep ini bersifat top-down (sentralistik) dan awalnya hanya berlandaskan perspektif ekonomi (industri) tidak memasukkan unsur keruangan.

Menurut Gore, C (1984) : konsep growth pole telah di definisikan oleh berbagai pakar secara berbeda beda dan lebih spesifik :

1. Boudeville (1966) : kutub pertumbuhan regional, yaitu sekelompok industri yang mengalami ekspansi yang berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi lebih lanjut ke seluruh daerah pengaruhnya.
2. McCrone (1969) suatu pusat pertumbuhan yang terdiri dari suatu kompleks industri yang saling berkaitan dan mendapat keunggulan ekonomi dari keuntungan lokasi (locational proximity).
3. Nichols (1969) suatu pusat pertumbuhan adalah suatu pusat kegiatan ekonomi di perkotaan yang mengalami pertumbuhan secara self sustaining, dan sampai suatu titik pertumbuhan itu didorong ke luar daerah pusat terutama ke daerah-daerah yang kurang berkembang.
4. Parr (1973) suatu pusat pengembangan menyajikan suatu pusat perkotaan dgn ukuran populasi yang terdefiniskan meliputi salah satu

karakteristik pertumbuhan (a) pertumbuhan penduduk (kesempatan kerja) pd tingkat yang lebih besar dari rata-rata ukuran regional, dan (b) pertumbuhan absolut penduduk (kesempatan kerja) yang lebih besar daripada pertumbuhan regional.

5. Lasuen (1974) pusat pengembangan adalah sekelompok industri yang besar yang mempunyai keterkaitan yang kuat melalui hubungan input-output antara leading industri di sekitarnya yang secara geografi membentuk kluster.

Teori pusat pertumbuhan yang mulai berkembang sejak tahun 1950 ini secara garis besar menetapkan beberapa konsep sebagai berikut (Perroux dalam Glasson, 1978):

1. *Propulsive industry*, industri sebagai pemicu perkembangan. Suatu perusahaan propulsip (propulsive firm) dicirikan sebagai perusahaan yang antara lain relatif besar dan menimbulkan dorongan-dorongan pertumbuhan yang nyata kepada lingkungannya;
2. *Circular and cumulative causation*, proses yang memungkinkan akumulasi perkembangan;
3. *Multiplier effect*, menurut teori ini ketimpangan dapat diatasi oleh *trickling down process and spread effect*.

Konsep *spread effects* menyatakan bahwa pada waktunya, kualitas propulsip dinamik (output) dari kutub pertumbuhan akan memencar keluar dan memasuki ruang di sekitarnya (hinterland), sehingga dengan terdistribusinya output dari pusat pengembangan dapat mendorong pertumbuhan ruang di sekitarnya. Perroux dalam (Pontoh, N. A dan Kustiwan, I, 2009).

Ada beberapa hal positif dari konsep growth pole ini, di antaranya :

1. Konsep ini memberikan peluang untuk mendekatkan dua cabang penting dalam analisis regional, yaitu analisis mengenai pertumbuhan ekonomi regional dan analisis struktur ruang regional;
2. Konsep ini dapat digunakan sebagai alat strategi intervensi pemerintah dalam menetapkan kebijakan investasi pembangunan daerah.

Namun demikian, menurut (Alkadri et al, 1999) konsep ini mempunyai banyak kelemahan dan keterbatasan, di antaranya;

1. Kerangka permasalahan dikembangkan dalam mengatur masyarakat industri dan cenderung tidak melihat problem spesifik wilayah, khususnya wilayah pedesaan yang didominasi sektor pertanian;
2. Rendahnya kapasitas penyerapan tenaga kerja karena industri yang dikembangkan di pusat-pusat pertumbuhan merupakan industri padat modal, sehingga kenaikan dalam kapasitas produksi tidak menciptakan kesempatan kerja yang seimbang;
3. Dalam hubungan pusat-pinggiran, efek balik (backwash effect) sering bekerja lebih cepat daripada efek pemancaran (spread effect), sehingga kesenjangan wilayah semakin melebar. Kondisi ini terjadi karena (a) kurang jelasnya hirarki kota-kota; (b) wilayah pinggiran tidak memiliki kekuasaan untuk mengendalikan sumber dayanya;
4. Kegagalan teori pusat pertumbuhan dalam meminimalisir kesenjangan adalah karena trickle down effect dan spread effect tidak terjadi yang diakibatkan karena aktivitas industri (perkotaan) tidak mempunyai hubungan dengan basis sumberdaya di wilayah hinterland (pedesaan). Selain itu respon pertumbuhan dipusat tidak cukup menjangkau wilayah hinterland karena hanya untuk melengkapi kepentingan hirarki kota.

9.4.2 Konsep Development From Below (Agropolitan)

Selanjutnya kegagalan konsep growth pole dalam menghadirkan keseimbangan pembangunan, telah dijawab dengan menerapkan konsep desentralisasi pengembangan wilayah (pedesaan) atau ada juga yang menyebut Development from below (DFB), yaitu dalam hal ini agropolitan/minapolitan.

Menurut Rondinelli (1983) alasan munculnya strategi agropolitan atau tipe-tipe pembangunan dari bawah antara lain:

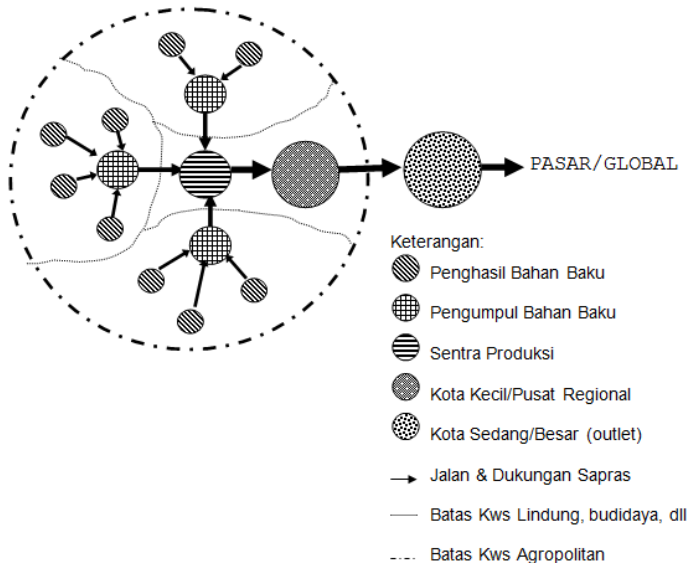
1. Kegagalan strategi development from above (DFA), yang berakibat pada ketimpangan wilayah, karena terkonsentrasi pada program pembangunan skala besar (largescale);
2. Kondisi fisik dan sosial ekonomi internal merupakan kunci sukses penerapan strategi pembangunan.
3. konsep pembangunan hendaknya berasal dari masyarakat itu sendiri dengan mempertimbangkan sumberdaya lokal dan partisipasi.

4. Sistem ekonomi lokal harus berperan dalam membentuk pola interaksi ekonomi antar wilayah. Sehingga dapat meningkatkan nilai tambah (value added).

Pendekatan pembangunan perdesaan melalui konsep agropolitan dikembangkan oleh (Friedmann, J, 1975). Menurut Friedman dan Douglas (1975) bahwa dalam konteks pengembangan agropolitan terdapat tiga isu utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu: (1) akses terhadap lahan pertanian dan penyediaan pengairan, (2). desentralisasi politik dan wewenang administrasi dari tingkat pusat dan tingkat lokal, dan (3) perubahan paradigma atau kebijakan pembangunan nasional untuk lebih mendukung diversifikasi produk pertanian. Menurut Douglass, 1998 dalam (Djakapermana R. D., 2003) melihat kota-kota sebagai tempat utama untuk fungsi-fungsi politik dan administrasi, pendekatan pengembangan agropolitan di banyak negara lebih cocok dilakukan pada skala kabupaten.

Tujuan pembangunan agropolitan adalah menciptakan “cities in the field” dengan memasukkan beberapa unsur penting dari gaya hidup kota ke dalam daerah perdesaan yang berpenduduk dengan kepadatan tertentu. Agropolitan distric merupakan satuan yang tepat untuk membuat suatu kebijaksanaan pembangunan ruang, melalui desentralisasi perencanaan dan pengambilan keputusan (decentralized) (Friedman dan douglass, 1975). Agropolitan districts dapat dikembangkan didaerah perdesaan dengan kepadatan penduduk tinggi atau peri-urban untuk meningkatkan standart hidup meningkatkan kesempatan bekerja dan mengurangi tingkat migrasi ke kota (Friedman, 1996).

Menurut Djakapermana R. D., (2003), kawasan agropolitan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya membentuk Kawasan Agropolitan. Disamping itu, Kawasan agropolitan ini juga dicirikan dengan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis di pusat agropolitan yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya (lihat gambar 9.1).



Gambar 9.1: Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan, (Djakapermana R. D., 2003)

Lebih lanjut, Rondinelli, D, (1985) menyatakan bahwa kunci keberhasilan penerapan strategi pengembangan agropolitan adalah :

1. Wilayah agropolitan tersebut harus merupakan wilayah yang tertutup. Hal ini terkait dengan kebijaksanaan untuk memanfaatkan sumberdaya lokal dan melawan sistem perdagangan bebas dan mekanisme pasar yang eksploitatif melalui perusahaan-perusahaan multinasional. Ekspresi kemampuan masyarakat untuk mengembangkan wilayah dengan kemampuannya sendiri (self reliance);
2. Mengarahkan pemanfaatan sumberdaya untuk kepentingan wilayah tersebut sehingga terjadi akumulasi perkembangan di dalam wilayah itu sendiri;
3. Aksesibilitas penduduk yang sama terhadap kekuatan sosial dan faktor produksi. Basis untuk akumulasi kekuatan sosial ini di antaranya ialah aset produktif dan faktor produksi seperti tanah, air dan alat produksi lainnya, sumberdaya finansial, informasi, pengetahuan dan keterampilan, organisasi sosial-politik.

Dari uraian di atas, konsep agropolitan ini memberikan hal-hal yang positif dalam konsep pengembangan wilayah, menurut Friedmann (1975) di antaranya:

1. Menyeimbangkan pendapatan desa dan kota dengan memperbanyak kesempatan kerja produktif dan memadukan kegiatan-kegiatan pertanian dengan kegiatan non-pertanian;
2. Merangkai distrik agropolitan menjadi jaringan regional, dengan cara membangun dan memperbaiki sarana untuk menciptakan hubungan antar wilayah agropolitan dan antara wilayah agropolitan dengan kota-kota yang lebih besar;
3. Melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.

Namun, Konsep ini juga pada tataran implementatif hanya berjalan (efektif) pada tahap-tahap awal saja hampir di sebagian besar wilayah Indonesia (Holis Y.M, 2017). Kontinuitas, outcomes dan impact dari konsep pembangunan dengan pendekatan kewilayahan tersebut cenderung tidak dapat tercapai.

Hal ini karena :

1. Pemutusan hubungan antar sektor perkotaan dengan perdesaan karena khawatir akan terjadinya eksploitasi (tidak melihat segi positif perkotaan);
2. Sistem wilayah yang tertutup terhadap intervensi dari luar hampir mustahil dilakukan dan bahkan akan mendistorsi konsep pengembangan wilayah terpadu wilayah perkotaan dan perdesaan;
3. Konsep ini memerlukan koordinasi baik secara vertikal dan horizontal, sementara sistem pemerintahan dan otonomi daerah menimbulkan permasalahan koordinasi tersebut.

Strategi integrasi spasial merupakan jalan tengah antara pendekatan sentralisasi yang menekankan pertumbuhan pada wilayah perkotaan (metropolitan) dan desentralisasi yang menekankan penyebaran investasi dan sumberdaya pembangunan pada kota-kota kecil dan pedesaan (Rondinelli, D, 1985). Pendekatan alternatif ini didasari pemikiran bahwa dengan adanya integrasi sistem pusat-pusat pertumbuhan yang berjenjang dan berbeda karakteristik fungsionalnya, maka pusat-pusat tersebut akan dapat memacu penyebaran pembangunan wilayah.

Menurut (Rondinelli, D, 1985), ada beberapa kunci dalam strategi integrasi spasial ini di antaranya :

1. Adanya hirarki dan keterkaitan (linkages) antar kelompok masyarakat atau organisasi yang berlokasi pada komunitas yang tersebar;
2. Terciptanya transformasi struktur ruang, organisasi, tingkah laku, kelembagaan sosial ekonomi dan kultur sehingga elemen-elemen tersebut menjadi suatu instrumen yang produktif dalam proses pertumbuhan dan perubahan;
3. Perbaikan sistem administrasi dan keberpihakan dari pemerintah terutama bagi wilayah-wilayah yang belum berkembang, serta koordinasi antar lembaga.

Namun demikian, konsep ini mempunyai beberapa kelemahan (Rondinelli, D, 1985), di antaranya :

1. Pendekatan ini terlalu ideal sehingga jauh dari kenyataan. Pengembangan sektor secara serentak pada kenyataannya sulit dilakukan karena keterbatasan sumberdaya;
2. Sistem permukiman sebagai pembentuk integrasi spasial sering tidak dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan. Kegagalan permukiman untuk mendukung terbentuknya integrasi spasial ini di antaranya disebabkan:
 - a. Jumlah pusat-pusat dan permukiman yang skalanya lebih kecil tidak memadai sehingga tidak terbentuk hirarki permukiman. Keadaan ini disebabkan oleh dua kondisi, yakni:
 - jumlah penduduk terlalu sedikit sehingga penyediaan prasarana menjadi tidak efisien;
 - secara spasial letak (lokasi) permukiman-permukiman tersebut berjauhan sehingga tidak dapat membentuk suatu sistem pelayanan.
 - b. Distribusi fasilitas dan pelayanan di antara permukiman-permukiman tidak memadai, bahkan untuk fasilitas pelayanan dan infrastruktur “dasar” seperti kesehatan dan pendidikan.
 - c. tidak terdapat keterkaitan (interaksi) antar pusat permukiman maupun antar permukiman dengan wilayah pelayanannya.

Menganalisa konsep-konsep pengembangan wilayah di atas, kita mendapatkan beberapa pembelajaran dan inspirasi yang bermanfaat dalam membangun

konsep keterkaitan desa-kota dalam perencanaan wilayah. Dalam konteks perencanaan wilayah, Konsep *growth pole* (centralized-regional models), konsep agropolitan (decentralized-regional model) serta konsep integrasi ruang merupakan suatu rangkaian dan pecahan pecahan puzzle yang dapat diadopsi dan disusun menjadi sebuah konsep yang mampu menjawab kesenjangan yang terjadi khususnya antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Indonesia.

Dalam rangka pengembangan masyarakat perdesaan, baik melalui pendekatan peningkatan kemampuan masyarakat dan keterkaitan desa kota, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa suksesnya pelaksanaan pendekatan ini tergantung pada keterlibatan berbagai pihak di tingkat pemerintah, swasta, lembaga masyarakat dan kelompok masyarakat yang menjadi sasarannya. Pengembangan kelembagaan yang efektif sangat diperlukan, baik di tingkat pemerintah dan di masyarakat, ketersediaan dana, kemudahan akses, penyiapan masyarakat dan petunjuk teknis harus efektif. Proses peningkatan kemampuan masyarakat dan penguatan keterkaitan desa kota memerlukan proses desentralisasi dan otonomi kepada daerah dan partisipasi masyarakat.

Bab 10

Manajemen Perkotaan

Lingkungan

10.1 Pendahuluan

Membahas dan mendiskusikan fenomena kemasyarakatan dan lingkungan perkotaan sangat menarik karena daya tarik atau daya dorongan masyarakat bermigrasi ke kota. Kompleksitas permasalahan lingkungan perkotaan menuntut masyarakat perkotaan harus menampilkan kinerja maksimal dalam setiap kegiatan mereka. Permasalahan lingkungan perkotaan sangat beraneka ragam, misalnya masalah persampahan, perparkiran, pengelolaan wilayah perkotaan dan masalah lainnya. Perpindahan masyarakat dan barang membutuhkan ruang atau wilayah baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Pengelolaan wilayah perkotaan membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat karena struktur ruang wilayah, pola ruang wilayah dan pemanfaatan ruang wilayah berhadapan langsung dengan kehidupan masyarakat. Kemampuan partisipasi masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat madani lainnya menjadi pilar utama bagi pemanfaatan ruang wilayah perkotaan.

Partisipasi dapat berupa memberikan saran dan masukan serta ide pemikiran termasuk mematuhi peraturan perundangan yang berkaitan rencana tata ruang

wilayah dan rencana detail wilayah yang ditetapkan pemerintah. Dalam praktek masih ditemukan misalnya pemanfaatan badan jalan untuk berjualan, parkir tidak tertib, mendirikan tempat usaha dengan tidak memperhatikan tempat parkir pelanggan dan sebagainya. Ruang wilayah perkotaan tidak mungkin bertambah bila tidak ada penambahan wilayah yang diperoleh dari daerah tetangga. Pengalihan fungsi ruang wilayah akan bertambah besar jumlahnya yaitu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan wilayah perkotaan. Lingkungan perkotaan akan berhadapan langsung dengan berbagai kegiatan masyarakat yang menggunakan ruang wilayah perkotaan. Adanya pasar tradisional di wilayah perkotaan adalah contoh kecil yang memberikan dampak bagi lingkungan perkotaan baik dari sisi dari keberhasilan lingkungan, tempat parkir kendaraan pembeli, kemacetan lalu lintas, maupun kegiatan lainnya. Hampir semua kegiatan atau aktivitas masyarakat perkotaan memiliki hubungan dengan keberadaan ruang wilayah perkotaan. Kegiatan sosial budaya, kegiatan olah raga, kegiatan pemerintahan, kegiatan pendidikan, kegiatan usaha dan kegiatan lainnya membutuhkan keberadaan dan keberdayaan lingkungan perkotaan.

Pembangunan daerah khususnya sumber daya lingkungan fisik dan lingkungan non fisik merupakan bahan penyusunan rencana kerja perangkat daerah yang berhubungan dengan keberadaan lingkungan. Berkaitan dengan rencana pembangunan daerah, Sjafrizal (2015) yang menyatakan bahwa “Untuk tingkat daerah, penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) atau Rencana Strategis Daerah (Renstrada) yang disusun sekali 5 tahun. Karena rencana pembangunan adalah untuk 5 tahun, maka sifatnya menjadi lebih umum, sedangkan anggaran yang bersifat tahunan memerlukan program dan kegiatan yang lebih rinci.” Merencanakan pembangunan daerah harus memperhatikan aspek lingkungan sehingga keberlangsungan dan kelestarian lingkungan menjadi faktor penting dalam konsep struktur ruang, pola ruang, dan kemanfaatan ruang wilayah. Mengelola dan memanfaatkan ruang kewilayahan perkotaan harus memperhatikan berbagai aspek kelestarian lingkungan seperti aspek daya tampung wilayah, kepadatan penduduk, kuantitas dan kualitas pemanfaatan ruang kewilayahan dan aspek kehidupan lainnya. Dampak nyata dari ketidakpedulian aspek lingkungan fisik dan non fisik ruang wilayah dapat memberikan pengaruh bagi kerusakan lingkungan seperti bencana alam (banjir, longsor), bencana non alam (seperti penyakit tertentu sebagai akibat sampah yang bertumpuk) maupun bencana sosial (seperti kemacetan lalu lintas, terjadi kawasan kumuh) dan bencana lainnya. Keterbatasan ruang wilayah perkotaan akan memberikan

dorongan dan masukan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, partisipasi dan dukungan bagi kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan integratif.

Permasalahan umum yang dihadapi pemerintah daerah (termasuk perkotaan) adalah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan daerah yang bersendikan struktur ruang, rencana detail ruang, dan pemanfaatan ruang yang mendasari kebijakan yang memanfaatkan ruang kewilayahan. Sebagai contohnya, pada hakekatnya terdapat kebijakan pemanfaatan ruang hijau yang menjadi paru paru kota, ruang publik berolah raga dan kegiatan lainnya. Pemanfaatan ruang kewilayahan menjadi barometer keberhasilan pengelolaan lingkungan perkotaan. Fenomena alih fungsi lahan kewilayahan adalah permasalahan perkotaan yang dihadapi dan terus diperjuangkan mencari solusi pemecahannya. Salah satu fenomena yang membutuhkan alih fungsi ruang kewilayahan itu adalah pembangunan pemukiman penduduk di wilayah perkotaan. Pembangunan pemukiman penduduk membutuhkan strategi dan kebijakan yang komprehensif karena disatu sisi dapat mengurangi kawasan pemukiman kumuh, tapi disisi lain pembangunan pemukiman membutuhkan luas lahan yang tidak sedikit dan dampak lainnya seperti ketersediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya (seperti moda transportasi, tempat pembuangan sampah sementara/akhir dan sebagainya).

10.2 Pengertian Manajemen Lingkungan Perkotaan

Membahas lingkungan perkotaan memiliki berbagai dimensi seperti dimensi lingkungan fisik/alam, lingkungan sosial budaya, lingkungan perkantoran, lingkungan pemukiman, lingkungan pertanian, lingkungan industri dan jasa atau lingkungan lainnya. Membahas dan menganalisa keberadaan dan daya dukung lingkungan perkotaan tidak bisa parsial tapi harus komprehensif dan integratif karena semua aspek kehidupan manusia, makhluk hidup, kehidupan organisasi dan hal yang terpenting adalah aspek kelestarian dan langsung lingkungan yang terjaga dan terawat. Pada Hakekatnya, menata kelola lingkungan perkotaan adalah mengelola dan memanfaatkan lingkungan perkotaan menjadi sumber daya yang dapat mendukung keberhasilan program dan kegiatan pemerintah dan organisasi lainnya. Visi dan misi organisasi pemerintah (publik)

dan organisasi privat (dunia usaha, dunia industri, dunia pendidikan dan lainnya) harus saling melengkapi dan saling mendukung.

Ruang wilayah perkotaan adalah lahan yang digunakan berbagai organisasi, manusia, tumbuhan, hewan dan pengguna lainnya. Keseimbangan dan kelestarian alam dan lingkungan menjadi elemen utama dalam pemanfaatan lahan yang tersedia. Lingkungan alam (termasuk lahan di dalamnya) sangat perlu diperhatikan semua pengguna dan penerima manfaat dari menggunakan lahan itu. Mengelola lahan untuk berbagai peruntukan organisasi publik dan organisasi privat perlu memperhatikan norma perundangan yang mengatur yang terdapat rencana tata ruang dan kewilayahan. Komitmen dan konsisten pemangku kepentingan pengelolaan dan pemanfaatan ruang wilayah menjadi sendi utama sehingga kelestarian dan daya dukung lahan atau ruang wilayah dapat memberikan sumbangan berartinya dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Perkembangan organisasi publik dan privat serta kebutuhan lahan bagi manusia menjadi dasar pengatur dan strategi pengelolaan pemanfaatan lingkungan lahan atau ruang wilayah perkotaan itu sendiri. Komitmen dan konsistensi menaati norma perundangan tentang rencana tata ruang dan wilayah adalah fondasi utama dalam manajemen pengelolaan lingkungan perkotaan. Namun demikian, tahapan perumusan kebijakan tata ruang, pemanfaatan dan pengawasan serta umpan balik dari pengelolaan lingkungan perkotaan juga bersinergi dengan pemanfaatan lingkungan lahan atau ruang wilayah itu sendiri.

Pada tahapan perumusan pembangunan daerah termasuk pembahasan rencana tata ruang dan wilayah diharapkan mendapatkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan lingkungan perkotaan itu. Masukan, kritik, saran dan ide pemikiran tentang tata ruang lingkungan perkotaan menjadi bangun dasar untuk memperkuat kegunaan lingkungan bagi semua warga perkotaan. Sebagaimana dikatakan Marto Silalahi, dkk (2020) bahwa “Kebutuhan masyarakat dibahas didiskusikan Mulai kegiatan musyawarah pembangunan tingkat rukun tetangga, tingkatan rukun warga, tingkatan lingkungan dan akhirnya menjadi satu kesatuan dibahas dalam musyawarah tingkat desa dan tingkat pemerintah Kecamatan.” Lahan atau ruang wilayah perkotaan adalah rumah tempat semua warga kota yang bermukim dan berusaha di wilayah perkotaan itu. Ketidakseimbangan atau kerusakan lingkungan wilayah akan memberikan dampak besar dari semua warga perkotaan baik berdampak langsung maupun tidak langsung. Bersahabat dengan ruang wilayah atau lahan lingkungan perkotaan harus terus dikomunikasikan sehingga timbul kesadaran kolektif

bahwa semua warga kota menjaga kelestarian dan kelangsungan hidup lingkungan alam dan sosial perkotaan.

Kesadaran kolektif warga kota menjadi modal dasar kelestarian lingkungan alam dan lingkungan sosial sehingga pemanfaatan ruang wilayah memberikan manfaat besar bagi kegiatan semua warga kota. Untuk organisasi privat dan individual, kesadaran atau kepedulian dilakukan secara mandiri yang berfokus pada kelestarian lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk organisasi publik (pemerintahan), kepedulian atau kesadaran itu dilakukan melalui menyusun rencana pembangunan daerah dengan memperhatikan sumber daya alam dan lingkungan perkotaan dengan komprehensif. Sinergisasi kegiatan berbagai organisasi tersebut menjadi kegiatan bersama dalam menjaga dan melestarikan alam dan lingkungan sehingga berbagai kegiatan yang dilakukan dapat terpenuhi dengan memperhatikan lingkungan dengan maksimal. Komunikasi antar organisasi dan komunikasi sosial dengan organisasi pemerintahan akan menghasilkan peta jalan bersama untuk melestarikan lingkungan dan pemanfaatan lingkungan secara serasi, selaras dan seimbang. Mengelola sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang berada di wilayah perkotaan diupayakan memberikan manfaat maksimal bagi semua warga perkotaan dan tetap menjaga kelestarian alam atau ruang wilayah (lahan yang ada). Faktor kelestarian alam dan lingkungan harus diperjuangkan sejalan dengan kemanfaatan penggunaan alam dan lingkungan bagi semua masyarakat perkotaan. Keselarasan dan keseimbangan lingkungan wilayah perkotaan membutuhkan komitmen dan konsistensi semua warga masyarakat perkotaan. Dengan demikian, dampak kerusakan lingkungan alam dan lingkungan lainnya dapat dijaga dan masyarakat perkotaan pun dapat mendapatkan manfaat dari penggunaan lingkungan alam (lahan) dan lingkungan lainnya.

10.3 Keberadaan Manajemen Lingkungan Perkotaan

Dalam pembangunan daerah, kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memperbaiki adalah kegiatan satu kesatuan yang saling melengkapi dan saling mendukung keberhasilan pencapaian rencana kerja pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan sarana mendekatkan

dan memberhasilkan visi dan misi pemerintah daerah yang telah disusun dalam peraturan daerah. Untuk mengujudnyatakan visi dan misi daerah maka perangkat daerah menyusun rencana kerja pembangunan daerah dengan memperhatikan berbagai faktor pendukung dan faktor lainnya. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah adalah kelestarian dan keberlangsungan sumber daya alam dengan tetap terjaga dengan baik. Menguatamakan faktor kelestarian lingkungan menjadi dasar utama bagi penyusunan rencana kerja pembangunan daerah. Membangun kelestarian dan keseimbangan lingkungan, dapat diibaratkan dengan membangun rumah dan keluarga. Lingkungan wilayah perkotaan menjadi suatu rumah bagi warga masyarakat bermukim dan istirahat di rumah besar lingkungan itu. Keberhasilan pembangunan lingkungan wilayah perkotaan membutuhkan dukungan dan partisipasi semua warga masyarakat yang berada di lingkungan itu. Menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan wilayah perkotaan menjadi sumber daya perkotaan dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan.

Pemanfaatan lingkungan alam dan sosial menjadi faktor penentu keberhasilan rencana pembangunan sektor lainnya. Sebagai contoh, hampir tidak mungkin dilakukan pembangunan pemukiman/perumahan masyarakat apabila lahan atau tanahnya tidak ada lagi. Alih fungsi lahan dapat dijadikan sarana membangun pemukiman/perumahan masyarakat itu. Namun alih fungsi lahan itu harus dilakukan analisa dan kajian komprehensif baik untung maupun ruginya. Lingkungan alam dan sosial memiliki keseimbangannya sendiri dan apabila keseimbangan itu sudah tidak terganggu misalnya, maka ditunggu saja kapan akan terjadi banjir, longsor atau dampak negatif lainnya.

Masukan dan ide pemikiran dari semua masyarakat dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan berbagai sektor yang diamanatkan perundangan yang berlaku. Sebagaimana pendapat Safi'i (2009) yang menyatakan bahwa "Sebenarnya partisipasi masyarakat merupakan input utama dalam merumuskan berbagai agenda kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah." Mengelola lingkungan kewilayahan khususnya perkotaan sejatinya dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor secara komprehensif. Pertambahan atau menambah wilayah perkotaan hampir tidak mungkin dilakukan apabila daerah atau wilayah tetangga tidak bersedia memberikan wilayahnya dibeli. Penambahan hanya mungkin bila pemerintah kota dapat melakukan reklamasi pantai atau daerah pesisirnya. Membiayai

kegiatan reklamasi harus diperhitungkan dengan seksama karena membutuhkan berbagai banyak pertimbangan baik ekologi dan ekosistem lingkungan alam.

Pengelolaan lahan perkotaan menjadi pilihan terbaik yang dapat dilakukan pemerintah kota. Manajemen pengelolaan sumber lahan perkotaan harus memperhatikan berbagai faktor sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dikemudian hari. Manajemen pengelolaan lahan merupakan bagian dari manajemen pembangunan daerah yang bertujuan mensejahterakan atau memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagaimana amanat konstitusi bahwa tanah, air dan kekayaan alam dikuasai dan dimanfaatkan sebesar-besarnya kepada kepentingan rakyat, sehingga pemerintah kota juga harus mengelola sumber daya lahan sebesar-besarnya bagi kebutuhan dan kepentingan rakyat banyak. Manajemen pembangunan daerah berbasis sumber daya daerah menjadi kebijakan dasar dan utama bagi mewujudkan kebutuhan pemangku kepentingan sesuai dengan visi dan misi yang telah disusun sebelumnya. Soetomo (2010) menyatakan bahwa “Perkembangan peradaban manusia memengaruhi hadirnya masalah lingkungan hidup berkaitan dengan perubahan cara manusia dalam memanfaatkan alam.” Faktor struktur ruang kewilayahan, pola ruang, dan kemanfaatan ruang kewilayahan menjadi sendi utama bagi manajemen pengelola sumber daya kewilayahan. Seluruh wilayah perkotaan dibagi habis ke dalam berbagai kebutuhan misalnya kebutuhan permukiman/perumahan, perkantoran, pertanian, sentra dunia usaha atau bisnis, pusat pendidikan, lahan resapan, ruang bermain publik dan sebagainya. Seluruh kebutuhan itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian sinergisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan ruang wilayah kewilayahan itu menjadi suatu kebutuhan dalam pembangunan perkotaan.

Tantangan terbesar dan terberat yang dihadapi manajemen pembangunan daerah adalah penambahan penduduk, penambahan perumahan, ruang publik, lokasi usaha, lokasi pendidikan, dan sebagainya. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sangat menjadi energi besar mendorong keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sebagaimana dikatakan Bastian (2006) yang menyatakan bahwa “Pendekatan partisipasi menjadi alternatif pilihan yang mengemuka untuk lebih memberikan peran serta aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan di berbagai tahapan pembangunan (perencanaan, perancangan, pelaksanaan sampai pada pemeliharaan).” Pertambahan penduduk sebagai contohnya akan menuntut pertambahan perumahan, pertambahan sarana

pendidikan dan kesehatan, ruang terbuka hijau dan sebagainya. Pertambahan penduduk dan pertambahan kebutuhan lainnya akan menuntut kepedulian dan kepekaan kebijakan dan strategi pembangunan daerah perkotaan.

Rencana tata ruang dan wilayah disusun berdasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan dari pemangku kepentingan daerah khususnya masyarakat. Sebagaimana pendapat Mahmudi (2005) mengatakan bahwa “Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konsitusen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholder).” Komitmen dan konsistensi pemangku kepentingan daerah adalah barometer keberhasilan manajemen pembangunan daerah berbasiskan sumber daya wilayah (misalnya lahan yang ada). Keterbatasan sumber daya lahan akan menuntut kreativitas dan inovasi pemerintahan daerah sehingga kebutuhan dasar dan kebutuhan masyarakat lainnya dapat dipenuhi secara maksimal. Sebagai contohnya pengelolaan lingkungan perkotaan adalah pengelolaan sampah baik pembuangan sampah sementara (TPS) maupun tempat pembuangan sampah akhir (TPA). Manusia (atau individu), dunia perkantoran, sektor pendidikan, sektor usaha, sektor kuliner dan berbagai sektor lainnya akan menghasilkan berbagai sampah yang harus dikelola. Pertambahan sampah berhubungan dengan kegiatan organisasi dan kegiatan manusia. Mengelola sampah di wilayah perkotaan menjadi bagian integral dari manajemen pembangunan daerah karena kebutuhan lahan untuk tempat pembuangan sampah. Pada organisasi pemerintah daerah, terdapat perangkat daerah (misalnya dinas pasar) yang mengurus dan bertanggungjawab namun dunia privat dapat saja membantu kegiatan pemerintah dan pembangunan. Dunia privat atau lembaga kemasyarakatan dapat memberikan bantuannya baik bersifat fisik (tempat sampah), non fisik (mengedukasi masyarakat), dan sebagainya. Partisipasi pemangku kepentingan lingkungan perkotaan mendorong dan mempercepat manajemen pengelolaan lingkungan perkotaan. Keberadaan partisipasi itu memberikan kekuatan atau masukan dalam merencanakan kegiatan pembangunan perkotaan termasuk mengelola lingkungan perkotaan.

Pemanfaatan wilayah lingkungan perkotaan dapat mendorong penguatan perekonomian daerah namun bila tidak dikelola dengan mempertimbangkan berbagai faktor maka kerusakan lingkungan sangat mungkin dapat terjadi. Kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat akan mendorong pertumbuhan

perekonomian daerah. Sebagai contohnya, kegiatan pasar tradisional atau kegiatan usaha kecil dan menengah lainnya akan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Kegiatan dunia usaha seperti pusat perbelanjaan akan mendorong atau memperkuat pertumbuhan perekonomian daerah. Pembangunan perekonomian daerah harus direncanakan dengan komprehensif karena ketersediaan lahan menjadi faktor penting dalam tempat usaha yang dilakukan masyarakat atau dunia usaha. Perencanaan pembangunan daerah sektor ekonomi membutuhkan masukan dan partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya masukan dan partisipasi itu diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan atau ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan.

10.4 Tujuan dan Manfaat Manajemen Lingkungan Perkotaan

Pembangunan daerah merupakan jalan pendekat bagi mengujudkan visi dan misi pemerintahan daerah yang telah diamanatkan peraturan daerah. Berbagai sektor pembangunan daerah merupakan satu kesatuan untuk mensukseskan pemenuhan berbagai kebutuhan atau mensejahterakan masyarakat. Salah satu sektor pembangunan daerah yang perlu diperhatikan adalah pembangunan sarana dan prasarana fisik (misalnya infrastruktur jembatan, listrik, telekomunikasi, pasar, sekolah, kesehatan dan sebagainya). Merencanakan kebutuhan masyarakat dan berbagai kebutuhan pemangku kepentingan perkotaan menjadi elemen dasar dalam kegiatan pembangunan daerah secara keseluruhan. Mendokumentasikan berbagai kebutuhan dan kegiatan yang diperlukan membutuhkan data dan informasi sumber daya daerah. Kompleksitas kegiatan pembangunan daerah membutuhkan kinerja maksimal organisasi perangkat, partisipasi dunia usaha, organisasi pendidikan, organisasi kesehatan dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

Faktor keseimbangan ekosistem dan ekologi lingkungan alam (misalnya kelestarian tumbuhan, daya tampung lahan atau tanah) sangat perlu diperhatikan dalam kegiatan merencanakan pembangunan daerah perkotaan. Kelestarian ruang publik, kesegaran udara, ketertiban lalu lintas adalah contoh kecil bagian yang harus diperhatikan penyusun rencana pembangunan wilayah perkotaan. Pertumbuhan ekonomi, penambahan penduduk, penambahan kebutuhan, dan

faktor pendorong lainnya memberikan masukan penting dalam merencanakan pembangunan daerah secara komprehensif dan integralistik. Kemampuan menyusun rencana besar pembangunan daerah atau dikenal dengan istilah manajemen pembangunan daerah. Program dan kegiatan pemerintah daerah yang disusun dan dibahas bersama pemerintah daerah, lembaga perwakilan rakyat, pemangku kepentingan dan berbagai pihak lainnya. Pembangunan daerah merupakan suatu sistem yang saling mengikat dan saling mendukung karena ego sektoral, ego kelompok, ego organisasi diupayakan seminimal mungkin karena apabila suatu sub sistem terganggu akan memberikan dampak negatif bagi sub sistem lainnya. Misalnya pembangunan fisik bangunan tanpa memperhatikan ruang terbuka hijau wilayah sekitarnya akan menimbulkan udara yang tidak segar, kemacetan lalu lintas dan sebagainya. Sinergisasi sub sistem akan mempermudah dan memperlancar keberhasilan seluruh sub sistem manajemen pembangunan daerah. Keberadaan sumber daya lingkungan memiliki sumbangan dalam keberhasilan perencanaan pembangunan wilayah perkotaan. Dalam dinamika pelaksanaan pembangunan daerah, penggunaan lahan atau wilayah untuk berbagai kegiatan manusia dan organisasi menjadi perebutan berbagai kepentingan. Keterbatasan ruang atau wilayah akan mendorong untuk mengadakan perubahan tata ruang wilayah menjadi alternatif kebijakan yang disarankan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Sumber daya lingkungan memiliki berbagai manfaat dan kegunaan baik sebagai bahan masukan dalam merencanakan pembangunan daerah, menyediakan lahan bagi kebutuhan manusia dan organisasi, maupun memberikan dampak positif atau negatif dari berbagai kegiatan manusia dan organisasi. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya lingkungan perkotaan harus disinkronisasikan dengan kegiatan pemerintahan, organisasi privat ataupun kegiatan pemangku kepentingan lainnya. Komitmen dan konsistensi pemangku kepentingan menjadi sendi utama dalam manajemen lingkungan perkotaan baik kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengawasi maupun umpan balik. Pembangunan daerah membutuhkan berbagai sumber daya daerah termasuk sumber daya lingkungan. Keberhasilan pencapaian visi dan misi pemerintahan daerah dioperasionisasikan dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah memiliki nilai dan peranan penting dalam mengujudkan visi dan misi pemerintah sebagaimana diamanatkan norma perundangan yang berlaku, misalnya peraturan daerah. Kinerja maksimal pemerintahan daerah akan memberikan nilai tambah dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan

harapan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Mengadministrasikan kebutuhan dan harapan itu menjadi kegiatan utama dalam musyawarah pembangunan yang dilakukan baik tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun tingkat daerah kabupaten/kota. Kegiatan mengadministrasikan kebutuhan dan harapan itu harus mendapat masukan dan ide pemikiran yang konstruktif dan saran pendapat aplikatif dari masyarakat dan organisasi yang lainnya.

Pembangunan daerah harus dimulai dari membangun data dan informasi apa saja yang dibutuhkan, sumber daya apa yang dimiliki, bagaimana mekanisme dan prosedural pelaksanaan dan pengawasan serta kegiatan memperbaiki kekurangan atau kesalahan yang mungkin terjadi. Membangun data dan informasi kebutuhan semua pemangku kepentingan itu diperoleh dari komunikasi pembangunan yang terjadi dalam masyarakat dan organisasi pemerintahan daerah. Kebutuhan dan harapan itu menjadi dasar menyusun rencana strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk satu tahun anggaran pembangunan daerah. Keterbatasan sumber dana pembangunan daerah mendorong partisipasi berbagai organisasi privat dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Partisipasi dalam pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik apabila komunikasi sinergis pembangunan pemangku keberhasilan pembangunan itu berjalan dengan baik. Komunikasi sinergi pembangunan daerah dapat berjalan baik melalui keberadaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pembangunan daerah. Pada kegiatan musyawarah pembangunan daerah, berbagai organisasi dapat memberikan masukan dan ide pemikiran yang komprehensif ataupun memberikan bantuan material dan dana.

Pembangunan wilayah perkotaan didasarkan kepada sumber wilayah perkotaan. Efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah dan efisiensi penggunaan sumber daya daerah menjadi faktor penting dalam menyusun rencana kerja pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan adanya partisipasi dan bantuan dari berbagai organisasi maka keterbatasan sumber daya daerah dapat diatasi. Untuk itu diperlukan manajemen pembangunan daerah khususnya tata kelola sumber daya daerah. Manajemen pengelolaan sumber daya daerah dilakukan organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan norma perundangan yang berlaku. Sumber daya lingkungan adalah salah satu sumber daya daerah yang harus dikelola dengan maksimal. Lingkungan alam, sosial budaya dan lingkungan lainnya menjadi satu kesatuan dengan sumber daya daerah. Keberadaan tanah, air, udara dan sinar matahari memiliki peranan dan sumbangan besar untuk kegiatan mengelola lingkungan wilayah atau daerah perkotaan. Fenomena pembangunan wilayah perkotaan sangat komplek

baik dari sisi pertumbuhan penduduk, pertumbuhan perekonomian, maupun ketersediaan sumber daya wilayah perkotaan. Fenomena tersebut dikelola melalui penyusunan rencana kerja pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan kepada efektivitas dan efesiensi penggunaan sumber daya perkotaan.

Kehadiran manajemen pembangunan daerah khususnya manajemen lingkungan perkotaan menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, pengawasan yang dilakukan aparatur daerah dan perangkat daerah. Profesionalitas aparatur daerah, akuntabilitas dan responsibilitas pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan menjadi pendorong kinerja pembangunan daerah mencapai visi dan misi daerah sebagaimana diamanatkan norma perundangan yang berlaku. Mengadministrasikan kebutuhan pemangku kepentingan dan sumber daya lingkungan perkotaan menjadi barometer keberhasilan pembangunan daerah. Keberadaan kebutuhan pemangku kepentingan dan sumber daya lingkungan merupakan sumber data dan informasi yang sangat dibutuhkan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan data dan informasi itu, maka sumber dana yang membiayainya akan direncanakan dengan maksimal.

Bab 11

Strategi Pembangunan Pesisir Mandiri

11.1 Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mencantumkan secara jelas tujuan dan arah kehidupan berbangsa. Pada alinea ke 4 disebutkan bahwa salah satu tujuan berdirinya bangsa Indonesia adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Proses pencapaian masyarakat yang sejahtera dibarengi dengan adil dan makmur maka dibutuhkan proses yang dinamakan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang paling sering digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat (Huang and Ho, 2017).

Pembangunan tersebut dapat dilihat dari berbagai sektor dan aspek yang ada dalam negara Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi geografis Indonesia bahwa 2/3 luas wilayah didominasi oleh lautan dan 1/3 merupakan daratan. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia adalah negara kepulauan dan pesisir dengan total pulau sebesar 17.499 pulau. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara dengan kepulauan dan pesisir terbesar di dunia (Pratama, 2020). Kondisi geografis dan karakteristik wilayah yang dikelilingi

oleh pulau, pesisir dan lautan merupakan kekayaan alam sendiri yang dapat menjadi modal dalam proses pembangunan nasional.

Terlebih dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang meliputi dimensi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait antara satu dengan yang lain menyebutkan bahwa salah satu tujuan dalam ke 14 menyebutkan bahwa pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan ditetapkan oleh Pemerintah (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal ini berarti bahwa pengelolaan dalam pembangunan juga harus memperhatikan aspek sumber daya kelautan termasuk wilayah pesisir yang ada di Indonesia.

Namun di tengah tingginya potensi sumber daya di daerah pesisir namun terdapat beberapa ancaman perubahan iklim terhadap wilayah pesisir yang membawa konsekuensi buruk. Berubahnya morfologi pantai, kemudian ancaman terancam-Nya banyak pulau-pulau kecil, intrusi air laut pada sumber daya air, memanasnya tingkat suhu di laut dan gelombang ekstrem yang terjadi membawa dampak nyata terhadap pembangunan berkelanjutan yang ada di wilayah pesisir. Wilayah pesisir juga mengalaih ancaman perubahan iklim yang berasal dari kenaikan muka air laut yang berdampak terhadap ekologi pesisir dan lautan. Permasalahan ini diperburuk dengan pola dan tren pembangunan manusia di wilayah pesisir yang berdampak terhadap terancamnya kesinambungan pembangunan di wilayah pesisir.

Pada Bab ini akan dijelaskan konsep, teori dan praktik empiris terkait dengan strategi pembangunan yang mandiri dan berkesinambungan di daerah pesisir. Lebih lanjut dalam bab ini lebih lanjut akan dilakukan telaah berbagai macam alternatif kebijakan yang dapat ditempuh untuk mendukung pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir demi terciptanya pembangunan yang mandiri dan berkesinambungan. Hal ini semoga dapat menambah khazanah keilmuan yang dapat digunakan oleh praktisi, akademisi dan berbagai pihak terkait dengan strategi pembangunan wilayah pesisir yang mandiri.

11.2 Kendala Pembangunan di Wilayah Pesisir

Karakteristik daerah pesisir merupakan wilayah peralihan antara wilayah darat dan wilayah laut yang hampir sebagian wilayah lautnya masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan, seperti adanya sedimentasi dan adanya aliran air tawar dan pada bagian wilayah darat dipengaruhi oleh kegiatan lautan, seperti pasang dan surut, angin dari laut dan proses filtrasi air laut (Ketchum, 1972). Lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2007 menjelaskan definisi terkait wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem daratan dan lautan yang ditentukan dengan 12 mil batas wilayah ke arah perairan dan dengan batas kabupaten/kota ke arah pedalaman (Undang-Undang No. 27 tahun 2007).

Menurut Dahuri (2001) terdapat empat permasalahan yang dihadapi oleh wilayah pesisir di Indonesia. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapatnya kerusakan habitat ekosistem pesisir
Tidak dapat dipungkiri bahwa kerusakan ekosistem di wilayah pesisir di Indonesia terjadi khususnya pada ekosistem Mangrove, terumbu karang dan juga rumput laut
2. Permasalahan kedua adalah eksploitasi yang berlebihan pada sumber daya laut
Secara umum sumber daya yang berasal dari laut khususnya perikanan berdasarkan data baru sekitar 58,5 % yang telah digunakan dari total potensi yang ada, namun dalam beberapa kawasan perairan di Indonesia terungkap bahwa beberapa wilayah tangkap terjadi over Fishing khususnya di Selat Malaka sekitar 112,38%, Laut Jawa sekitar 88,98% dan Selat Makassar serta Laut Flores
3. Terjadinya pencemaran lingkungan
Pencemaran yang terjadi di beberapa kawasan pesisir dan lautan sudah pada tahapan yang mengkhawatirkan. Kawasan tersebut berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, Lampung, dan Sulawesi Selatan. Sumber utama pencemaran tersebut terdiri dari kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, kegiatan pertanian, perhubungan laut dan kapal pengangkut minyak, kegiatan pertambangan dan energi lepas pantai.

4. Munculnya konflik dalam memanfaatkan ruang
Permasalahan ketidakterpaduan dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dalam memanfaatkan sumber daya di wilayah pesisir telah menimbulkan konflik kepentingan antara sektor swasta dengan masyarakat.
5. Permasalahan klasik seperti keterbatasan anggaran dan dana dalam pembiayaan pembangunan di daerah pesisir. Dampaknya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, kemiskinan masyarakat di daerah pesisir.

Kendala lain yang dialami oleh masyarakat di wilayah pesisir adalah fakta bahwa tingkat kemiskinan yang tinggi di masyarakat wilayah pesisir. Tingkat kemiskinan yang tinggi tersebut disebabkan oleh ketergantungan sumber daya terhadap pesisir dan laut. Masyarakat di wilayah pesisir justru banyak melakukan kegiatan perekonomian yang mendorong kualitas sumber daya yang dapat menurunkan sumber daya dan menangkap ikan dengan cara yang dapat menghancurkan ekosistem itu sendiri. Permasalahan lain adalah konflik dalam penataan dan penggunaan ruang di wilayah pesisir. Konflik tersebut terjadi karena belum adanya jelas pengaturan ataupun peraturan yang dapat dijadikan benchmark terhadap berbagai sektor yang berada di wilayah pesisir. Penurunan kualitas lingkungan yang terjadi secara merata di ekosistem di wilayah pesisir juga menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan pembangunan di wilayah pesisir. Di samping adanya faktor eksternal seperti perubahan iklim secara global juga menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan pembangunan di wilayah pesisir (Lasabuda, 2013).

Kendala lain yang menurut penulis menjadi suatu permasalahan yang pelik dalam pembangunan wilayah di daerah pesisir adalah persinggungan pengelolaan sumber daya hanya terjadi antara pemerintah daerah, namun hal tersebut terjadi juga antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Friksi tersebut juga terjadi antara pemerintah daerah dengan pihak swasta atau pihak lain terutama dalam pengelolaan sumber daya yang ada di wilayah pesisir. Contoh kongkret persinggungan antara kepentingan tersebut adalah pemanfaatan sumber daya di pesisir terkait pengelolaan sumber daya kelautan dalam hal penangkapan ikan yang ada di wilayah pesisir (Ginting, 2013).

11.3 Strategi Pembangunan di Wilayah Pesisir

Pengelolaan dan pembangunan di wilayah pesisir tidak dapat disamaratakan dengan pembangunan yang berbasis daratan atau model lainnya. Hal ini dikarenakan karakteristik geografis dan wilayah di daerah pesisir yang berbeda dengan daratan. Konsepsi pembangunan di wilayah pesisir harus berbasis kepada pelestarian lingkungan dan bukan sebaliknya. Pertumbuhan dan pembangunan di wilayah pesisir harus diarahkan kepada kegiatan ekonomi dan pembangunan yang berbasis kepada meminimumkan dampak negatif terhadap lingkungan akibat kegiatan perekonomian dan pembangunan yang ada di wilayah tersebut. Pemanfaatan dan pembangunan di wilayah pesisir juga harus dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal yang ada di wilayah pesisir namun tetap menggunakan ruang dan wilayah di daerah pesisir dengan beroperintasi kepada pelestarian lingkungan (Trinanda, 2017).

Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 1 tahun 2014 menjelaskan bahwa pendekatan yang dilakukan dalam pembangunan wilayah pesisir adalah dengan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan rencana pembangunan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi dengan berbagai program dan rencana pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan. Eksploitasi yang berlebihan terhadap wilayah pesisir yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pembangunan yang tidak terintegrasi dapat berdampak terhadap penurunan daya dukung sumber daya di wilayah pesisir terhadap pembangunan itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliadi pada tahun 2014 menemukan bahwa strategi pembangunan ekonomi yang tepat berdasarkan sampel yang digunakan yaitu daerah pesisir Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa strategi dan pengembangan pembangunan yang tepat adalah dengan menggunakan sistem pembangunan yang terpadu dan komprehensif. Diperlukan suatu roadmap terkait pengembangan di wilayah pesisir untuk memetakan potensi dan mengembangkan kontribusi bagi perekonomian daerah.

Lebih lanjut Effendy (2009) pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dapat didasarkan kepada pilihan antara lain: (1) wilayah pesisir yang merupakan

multiple use zone di mana dalam wilayah pesisir ini terdapat lebih dari dua jenis sumber daya alam dan jasa lingkungan serta dalam wilayah tersebut terdapat dua macam pemanfaatan kawasan; (2) karakteristik dan variasi dari sumber daya di wilayah pesisir secara ekologis yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya termasuk ekosistem dan lahan; dan (3) wilayah di pesisir yang merupakan tempat tinggal dari satu kelompok etnis masyarakat yang memiliki perbedaan pekerjaan atau mata pencaharian.

Perencanaan pembangunan wilayah pada prinsipnya adalah ditujukan untuk daerah atau wilayah tersebut dalam melaksanakan pembangunan wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Meskipun daerah pesisir memiliki karakteristik yang berbeda dengan kawasan daratan, namun landasan teoretis dalam hal pembangunan wilayah relatif sama.

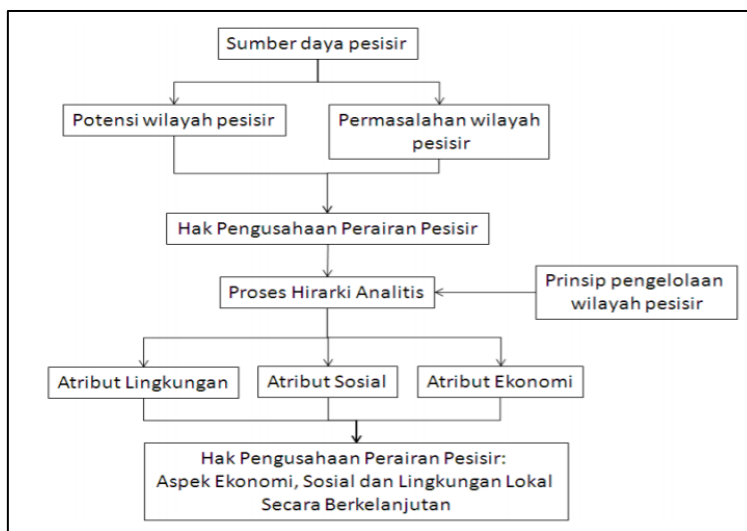
Ada beberapa komponen yang menjadi landasan teori dalam teori pembangunan yaitu (Presiden Republik Indonesia, 2011):

- a. Adanya pusat, wilayah pelayanan dan jaringan transportasi
- b. Secara hierarkis terdapat pusat besar, pusat menengah dan pusat kecil
- c. Timbulnya pusat ataupun sumber pertumbuhan sebagai penggerak pembangunan
- d. Terdapat mata rantai ke depan dan belakang
- e. Trickling down effect dan polarisasi.
- f. Penentuan kawasan
- g. Wilayah homogen dan perencanaan yang derivasi dan
- h. Fungsi pusat kota sebagai simpul jasa distribusi, sub koordinasi simpul jasa distribusi dan orientasi pemasaran secara geografis.

Lebih lanjut menurut Fabianto dan Berhita (2014) menegaskan bahwa strategi pengembangan dan pembangunan masyarakat di wilayah pesisir dapat dilakukan dengan melewati dua pendekatan yaitu pendekatan bersifat struktural dan non struktural. Pendekatan struktural dilakukan dengan melakukan pendekatan secara makro yang berfokus kepada penataan sistem dan struktur sosial politik. Pendekatan ini menggunakan peranan instansi yang berwenang untuk mengelola wilayah pesisir laut. Peranan masyarakat sangat penting namun kurang menjadi perhatian penting karena peranan institusi lebih menonjol. Sasaran utama pendekatan struktural terletak kepada tertatanya struktur dan sistem hubungan antara semua komponen di wilayah pesisir. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan

permasalahan sosial dan ekonomi yang dominan yang menjadi permasalahan selama ini di wilayah pesisir.

Pendekatan kedua adalah pendekatan non-struktural atau pendekatan subjektif. Pendekatan ini lebih menekankan kepada manusia sebagai subjek yang mempunyai kebebasan dalam berinisiatif dan menurut kehendak. Pendekatan ini berinisiatif melakukan asumsi bahwa keterampilan masyarakat di wilayah pesisir menjadi penting untuk melindungi sumber daya alam. Konsep pengelolaan wilayah di daerah pesisir terletak pada penekanan kepada karakteristik dari wilayah di daerah pesisir, di manah terdapat kombinasi dari pembangunan yang adaptif, integratif, lingkungan, sosial dan ekonomi. Kombinasi dari pembangunan tersebut yang menjadi alternatif kebijakan dalam menemukan pengelolaan pembangunan di wilayah pesisir yang tepat (Fabianto dan Berhиту, (2014; 5).

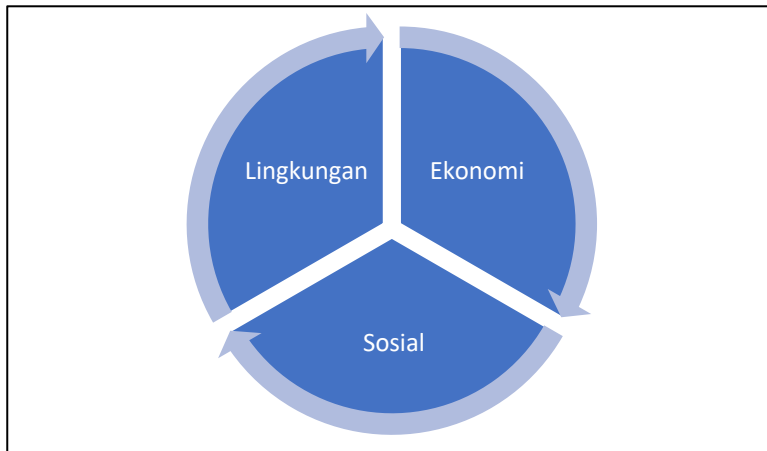


Gambar 11.1: Kerangka Hak Pengusahaan di Wilayah Pesisir,(Adam (2012).

Lebih lanjut menurut Mahkamah Konstitusi dalam Adam (2012) disebutkan bahwa pengelolaan dan pembangunan wilayah pesisir di Indonesia memiliki tujuan antara lain adalah untuk: (1) melindungi, observasi, rehabilitasi, pemanfaatan dan meningkatkan sumber daya di wilayah pesisir serta ekologis lingkungan yang berkelanjutan; (2) membentuk sinergi yang harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mengelola dan membangun sumber daya pesisir; dan (3) mendorong peran serta masyarakat dan lembaga di

luar pemerintah untuk mengelola sumber daya di wilayah pesisir agar tercipta keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan. Tujuan akhir yang hendak dicapai adalah pengelolaan dan pembangunan di wilayah pesisir termasuk pulau-pulau kecil dapat dikelola secara terintegrasi dengan berbagai jenis bentuk perencanaan sektoral, mengurangi tumpang tindih pengelolaan, menurunkan konflik dan kewenangan serta memberikan suatu bentuk kepastian hukum di wilayah pesisir.

Lebih menurut Adam (2012) proses pembangunan di wilayah pesisir harus memperhatikan 3 variabel yang penting yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Ketiga variabel ini harus menjadi faktor utama dalam melakukan pembangunan di wilayah pesisir. Aspek ekonomi, lingkungan dan sosial tidak dapat berdiri secara sendiri dan masing-masing. Wilayah pesisir harus dilakukan pembangunan secara terpadu dan menyeluruh disebabkan karena ketergantungan pembangunan di wilayah pesisir terhadap keberadaan sumber daya. Salah satu sumber daya dalam yang ada di wilayah pesisir hilang atau rusak dapat berdampak terhadap terganggunya stabilitas dan keberlanjutan pembangunan di wilayah pesisir. Sehingga pembangunan dan pengelolaan di wilayah pesisir harus memperhatikan variabel lingkungan, sosial dan ekonomi (Lihat Gambar 11.2).



Gambar 11.2: Keterpaduan Variabel Penting dalam Pembangunan dan Pengelolaan di Wilayah Pesisir, (Adam (2012;28).

Praktik empiris terkait strategi pengelolaan dan pembangunan yang mandiri dan berkesinambungan di dalam membangun daerah atau wilayah di pesisir menjadi hal penting. Hal ini disebabkan wilayah pesisir yang merupakan peralihan antara wilayah darat dan laut dalam konteks pembangunan dan pengelolaannya sangat bergantung terhadap kondisi sumber daya yang terdapat di wilayah pesisir. Berbagai problem muncul dalam pengelolaan dan pembangunan di wilayah pesisir antara lain kerusakan lingkungan, eksploitasi berlebihan, konflik dalam pemanfaatan ruang, tumpang tindih pengelolaan di wilayah pesisir dan lain sebagainya. Untuk itu dibutuhkan strategi pembangunan di wilayah pesisir agar tercipta pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan. Pembangunan dan pengelolaan di wilayah pesisir pada prinsipnya harus didekatkan dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut, lalu dilakukan pendekatan yang terintegratif antara variabel sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal ini harus ditekankan agar pembangunan dan pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir tetap memberikan dampak terhadap masyarakat, meningkatkan perekonomian di wilayah pesisir namun tetap menjaga pembangunan yang berkelanjutan di wilayah pesisir.

Bab 12

Manajemen dan Pelayanan Publik

12.1 Pendahuluan

Pelayanan publik adalah elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan wajib dilakukan pemerintah sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Pelayanan publik menjadi gambaran tugas penyelenggaraan pemerintah dimulai dari daerah sampai ke tingkat pusat. Pelayanan publik sebagai indikator kinerja pemerintah untuk melayani masyarakat (Revida et al., 2021).

Pemerintah sebagai penyedia layanan harus melayani masyarakat dengan baik dan optimal sehingga menghasilkan pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat. Pelayanan berupa barang, jasa, dan pelayanan administrasi kepada masyarakat yang merupakan hak dari setiap masyarakat. Pelayanan yang diberikan merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah. Pelayanan publik yang baik menjadi harapan masyarakat. Pelayanan yang diberikan menjadi patokan baik atau buruknya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Keberhasilan pelayanan publik akan menjadi citra positif bagi kinerja

pemerintah. Semakin baik pelayanan yang diberikan maka akan semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Tussholiqah, 2014;Simarmata, Simarmata and Saragih, 2018).

Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah harus mendahulukan kepentingan masyarakat terlebih dahulu dibandingkan kepentingan pribadi maupun golongan (Undang-Undang RI No.5, 2014). Undang-Undang No 25 Tahun 2009 pasal 5 dijelaskan bahwa standar pelayanan menjadi patokan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan sebagai acuan dalam menilai kualitas pelayanan yang merupakan kewajiban dan janji pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam pelayanan yang berkualitas, mudah, efektif, dan dapat diukur (Undang-Undang No.25, 2009).

Dalam melaksanakan pelayanan publik, pemerintah perlu menerapkan manajemen agar pelayanan yang diberikan lebih optimal dan sesuai dengan harapan masyarakat. Manajemen pelayanan publik dilakukan dengan cara menyusun rencana, mengarahkan, melakukan koordinasi serta menyelesaikan pelayanan sehingga tercapai tujuan pelayanan publik yang telah ditetapkan. Untuk mengoptimalkan pelayanan publik beberapa faktor yang harus diperhatikan seperti kepemimpinan, budaya organisasi, kelembagaan, tata kerja atau standar operasional prosedur, standar pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengendalian atau evaluasi, sarana dan prasarana pelayanan publik, dan penggunaan teknologi informasi. Beberapa aspek yang digunakan dalam pelayanan publik yang diterapkan pada instansi pemerintah seperti function, conformance, reliability, serviceability, dan assurance (Tussholiqah, 2014;Revida et al., 2021).

12.2 Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah elemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik yang dilakukan secara sederhana kepada masyarakat merupakan pelayanan yang memenuhi keperluan individu ataupun masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap pemerintah yang diatur dalam tata cara dan aturan pokok yang telah ditetapkan (Revida et al., 2021). Ciri dari pelayanan yaitu tidak kasat mata, melibatkan upaya manusia atau peralatan yang disediakan penyelenggara pelayanan. Pelayanan publik dilakukan oleh

pemerintah daerah sampai ke pemerintah pusat, BUMD, dan BUMN dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No.25, 2009).

Menurut Barata dalam Revida dkk konsep pelayanan terdiri dari dua yaitu penyedia layanan dan penerima layanan. Penyedia layanan merupakan pihak yang memberikan layanan baik dalam bentuk barang maupun jasa sedangkan penerima layanan merupakan masyarakat atau konsumen yang menerima layanan tersebut dari penyedia layanan (Revida et al., 2021).

Pelayanan publik merupakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan hak sipil atas jasa, barang dan pelayanan administrasi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik juga diartikan sebagai kegiatan pelayanan oleh lembaga pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Kepmenpan No 63/KEP/M.PAN/7/2003, 2003)

Menurut Mempan No 63 Tahun 2003 Pelayanan Publik dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat misalnya surat izin mendirikan bangunan, surat izin mengemudi, surat izin usaha, dan lainnya.
2. Pelayanan Barang, di mana pelayanan yang diberikan kepada publik yang menghasilkan bentuk atau jenis barang yang digunakan publik yang dianggap sebagai benda yang dimanfaatkan dan memberikan nilai tambah baik langsung maupun tidak langsung seperti air, listrik, infrastruktur dan lainnya.
3. Pelayanan Jasa, di mana pelayanan yang diberikan dalam bentuk jasa yang dibutuhkan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan lainnya.

Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dijelaskan Pelayanan Publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi seluruh warga Indonesia atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam undang-undang tentang pelayanan publik juga dijelaskan bahwa standar pelayanan publik menjadi tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan

pelayanan dan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan yang dijanjikan pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur (Undang-Undang No.25, 2009).

Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di mana aspek orientasi pelayanan berpusat pada kepentingan umum dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dijelaskan bahwa kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang RI No.5, 2014).

Pemerintah melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dalam hal pelayanan barang, jasa dan urusan administrasi pemerintahan. Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2009 penyelenggara dari pelayan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melakukan kegiatan pelayanan publik (Undang-Undang No.25, 2009).

Pelayanan publik harus terjalin integrasi dalam menjalankan aturan dan ketentuan sesuai dalam perundang-undangan yang berlaku. Pemberian pelayanan publik diharapkan juga berkesinambungan dengan cara memberikan pelayanan yang baik sehingga masyarakat puas. Pelayanan yang baik akan membuat masyarakat menjadi puas terhadap kinerja pemerintah. Kualitas kinerja pemerintah menjadi harapan bagi masyarakat. Pelayanan publik akan dianggap belum maksimal jika masih banyaknya aduan masyarakat, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, dan pelayanan yang diberikan berorientasi pada birokrasi tidak pada kepentingan masyarakat (Revida et al., 2021).

12.3 Prinsip Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraannya pelayanan publik perlu memperhatikan asas-asas dalam pelayanan seperti kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keterbukaan, partisipatif, keprofesionalan, akuntabilitas, keseimbangan hak dan kewajiban, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok

rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan serta keterjangkauan. Pelayanan publik memiliki prinsip sebagai landasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Heffy, 2009; Undang-Undang No.25, 2009; Tussholiqah, 2014).

1. Sederhana, artinya pelayanan publik memiliki standar pelayanan yang mudah diikuti, mudah dimengerti, mudah dilaksanakan, mudah diukur dengan menggunakan prosedur yang jelas serta biaya yang terjangkau bagi masyarakat maupun bagi penyelenggara pelayanan.
2. Partisipatif, artinya dalam penyusunan standar pelayanan pemerintah melibatkan masyarakat dan pihak terkait. Dengan pembahasan bersama diharapkan mendapatkan keselarasan dan komitmen atas hasil kesepakatan.
3. Akuntabel artinya bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pihak yang berkepentingan.
4. Berkelanjutan artinya bahwa standar dalam pelayanan harus mudah diakses masyarakat.
5. Keadilan artinya bahwa pelayanan harus memberikan jaminan dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat baik dari segi status sosial ekonomi, lokasi.

Sedangkan menurut Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dalam Kebijakan No.81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana pelayanan umum dalam birokrasi berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut (KEPMENPAN 81, 1993) :

1. Kesederhanaan yang artinya pelayanan yang diberikan mudah, cepat, tepat, lancar, dan tidak berbelit-belit sehingga mudah dilaksanakan untuk masyarakat dalam mendapatkan layanan.
2. Kejelasan dan kepastian, adanya kejelasan dan kepastian dalam prosedur dan tata cara pelayanan seperti tahapan pelayanan, persyaratan secara teknis maupun administratif, rincian biaya, tata cara pembayaran, dan waktu pelayanan.
3. Keamanan, artinya dalam proses pembelian layanan pemerintah memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum kepada masyarakat.

4. Keterbukaan, artinya prosedur dan tata cara pelayanan diinformasikan secara terbuka sehingga masyarakat mengetahui dan memahami bagaimana prosedur dan tata cara mendapatkan pelayanan.
5. Efisiensi, artinya bahwa persyaratan dalam pelayanan hanya dibatasi pada hal yang berkaitan langsung pada sasaran pelayanan dan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dan produk pelayanan.
6. Ekonomis, artinya biaya dan tarif yang dikenakan wajar dan memperhatikan kemampuan masyarakat untuk membayar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Keadilan dan pemerataan, artinya layanan harus dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan didistribusikan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
8. Ketepatan waktu artinya pelayanan yang diberikan harus selesai pada waktu yang telah dijanjikan .

Sedangkan menurut Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara No.63/ KEP/M.PAN/7/2003 di mana prinsip-prinsip dalam pelayanan publik adalah (a) Kesederhanaan, (b) Kejelasan, (c) Kepastian waktu, (d) Akurasi, (e) Keamanan, (f) Tanggung jawab, (g) Kelengkapan sarana dan prasarana, (h) Kemudahan akses, (i) Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, (j) Kenyamanan (Kepmenpan No 63/KEP/M.PAN/7/2003, 2003).

Berkenaan dengan prinsip pelayanan di atas pejabat publik seharusnya menciptakan transparansi dalam memberikan pelayanan yang baik dan benar kepada masyarakat, pelayan publik juga perlu memberikan informasi yang berkesinambungan dan menyediakan pelayanan yang cepat, tepat, prima dengan biaya yang terjangkau (Heffy, 2009).

12.4 Manajemen Pelayanan Publik

Manajemen merupakan alat pelaksana dalam administrasi. Manajemen menjadi inti dari suatu pelayanan administrasi. Manajemen diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas sehingga mencapai hasil yang telah ditetapkan. Gabungan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, evaluasi terhadap sumber daya manusia, keuangan, informasi, dan politik. Pelayanan diartikan sebagai sebuah proses. Pelayanan publik dilakukan pada organisasi yang memiliki

sistem manajemen untuk mengatur jalannya pelayanan agar tercapainya tujuan bersama (Riyaldi, 2010; Tahir, 2019).

Manajemen pelayanan diartikan sebagai penerapan ilmu untuk menyusun rencana, mengimplementasikan, mengkoordinasikan, dan menyelesaikan berbagai aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan pelayanan yang ramah dan tegas kepada masyarakat dan terciptanya interaksi dan kontrol kualitas dengan masyarakat. Manajemen pelayanan publik dilakukan sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat sebagai bentuk kewajiban pemerintah sebagai abdi masyarakat .

Manajemen pelayanan publik juga diartikan sebagai tata kelola berbagai aspek pelayanan yang bersumber dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi mekanisme umpan balik pelayanan yang dilakukan guna menyediakan pelayanan barang, jasa dan administrasi kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, harkat dan martabat, dan kemandirian dari masyarakat Indonesia.

Beberapa ciri dari pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah adalah (a) Kegiatan dilakukan oleh pemerintah, (b) Bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia, (c) Berbentuk barang atau jasa dan pelayanan administratif, (d) Berhubungan dengan kepentingan publik.

Manajemen publik sering diartikan sebagai manajemen instansi pemerintah. Manajemen pelayanan publik juga sering disebut sebagai manajemen proses karena terhadap sisi manajemen yang mengatur mengendalikan agar semua kegiatan pelayanan dapat berjalan dengan lancar, tertib, tepat sasaran dan memuaskan masyarakat (Tri, 2001; Akib, 2009).

Nilai akuntabilitas dari pelayanan harus mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pelayanan yang diterima masyarakat. Pelayanan publik yang baik akan berpengaruh terhadap pelayanan yang berkualitas, jika pelayanan yang diberikan buruk maka akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Kepercayaan masyarakat menjadi dasar dalam mewujudkan tercapainya pemerintahan yang baik. Pelayanan publik menjadi tolak ukur kinerja pemerintah di mana kualitas pelayanan publik yang diterima dan dirasakan masyarakat akan secara langsung dinilai oleh masyarakat Masyarakat sebagai pemakai layanan publik memiliki kebutuhan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu pemerintah perlu memperhatikan standar pelayanan sesuai dengan amanat undang-undang (Tahir, 2019).

Pelayanan publik juga dianggap sebagai gambaran dari terselenggaranya kepemimpinan yang baik. Pelayanan publik akan berpengaruh terhadap citra dari pemerintah, kebijakan yang dilakukan pemerintah tentang pelayanan publik secara langsung akan membentuk citra pemerintah di masyarakat.

12.5 Konsep Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang tentang pelayanan publik dijelaskan bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan dijalankan sesuai dengan undang-undang dan tanpa memandang perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Pelayanan publik dilakukan dengan melayani, menyiapkan dan ikut membantu urusan masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Adapun standar dalam melakukan pelayanan adalah (a) Waktu penyelesaian layanan yang dimulai dari pengajuan layanan sampai pada penyelesaian, (b) Prosedur layanan berupa rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses layanan, (c) Biaya pelayanan yaitu tarif yang ditetapkan untuk mendapatkan layanan, (d) Produk layanan yaitu hasil dari layanan yang diterima, (e) Sarana dan prasarana yaitu alat pendukung dari penyelenggaraan layanan, (f) Kompetensi petugas dalam memberikan layanan kepada masyarakat berupa keahlian, pengetahuan, sikap, keterampilan. (Revida et al., 2021).

Optimalisasi pelayanan publik perlu dilakukan dan merupakan harapan dari masyarakat. Dengan terciptanya pelayanan yang baik dan good governance menjadi salah satu indikator dari kualitas pelayanan yang dilakukan secara maksimal. Untuk mengoptimalkan pelayanan publik maka perlu memperhatikan faktor berikut ini

1. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam penggerak organisasi. Seorang pemimpin menjadi penggerak sebuah organisasi sehingga maju atau tidaknya sebuah organisasi tergantung oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu pemimpin harus memiliki keterampilan, konseptual, keterampilan administrasi, kemampuan teknis dan rasa kemanusiaan. Pemimpin akan mampu menjalankan organisasi dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengkonsolidasi organisasi dalam mencapai tujuannya. Seorang pemimpin harus mampu mengatur bawahannya dan mengambil keputusan yang tepat dalam organisasi. Pemimpin juga harus

mampu mengontrol dan mengawasi kinerja dari organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin mampu menggerakkan bawahan dan menjadi motivator bagi bawahannya dalam bekerja. Kepemimpinan yang baik akan menjadi ujung tombak keberhasilan dari penyelenggaraan pelayanan publik. Reformasi dalam pelayanan publik ditentukan oleh peran pemimpin. Disamping itu pemimpin menjadi *agent of change* dalam organisasi. Dibutuhkan pemimpin yang bertanggung jawab yang memiliki sikap adil, bijaksana, bertanggung jawab.

2. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan kebiasaan yang sering dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Budaya organisasi juga dijelaskan sebagai karakter di mana setiap perilaku dalam organisasi mencerminkan moral dan etika yang baik.

3. Kelembagaan

Kelembagaan merupakan cara pengaturan organisasi, Kelembagaan memengaruhi aspek dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Lembaga memiliki peran penting dalam pelaksanaan aturan dan sistem tata kelola dari kebijakan pelayanan. Kelembagaan menyangkut wewenang dalam organisasi, kewenangan dalam mengambil kebijakan dan keputusan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

4. Tata Kerja

Tata kerja atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan menjadi media utama dalam organisasi. Tata kerja menjalankan seluruh kegiatan dalam organisasi agar teratur dan terarah. Dengan adanya standar operasional diharapkan organisasi mampu mengukur kinerja dari pegawainya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

5. Standar Pelayanan

Standar pelayanan yang dilakukan dengan mengoptimalkan cara kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal biaya dan waktu. Semakin cepat pelayanan yang diberikan akan memengaruhi pendapat masyarakat dan dianggap semakin baik.

6. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan untuk mengevaluasi kinerja aparatur negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara langsung maupun dengan media online melalui SMS maupun Website.

7. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk memperbaiki kinerja pelayanan sehingga pemerintah mampu melakukan perbaikan dalam proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

8. Sarana dan Prasarana

Dalam pelayanan publik, sarana dan prasarana sangat penting untuk mendukung terlaksananya pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sarana dan prasarana yang baik akan membantu pelayanan publik dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

9. Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi akan memudahkan pelayanan masyarakat. Dengan teknologi informasi akan mempercepat proses pelayanan dan adanya konektivitas antar instansi pemerintah sehingga mempercepat proses pelayanan.

10. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Pengelolaan sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam pelayanan yang berkualitas.

12.6 Indikator Kualitas Pelayanan Publik

Dalam pelayanan publik indikator kinerja menjadi bagian yang penting dalam mengukur kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Peran aparatur pemerintah dianggap memberikan pengaruh yang besar agar tercapainya pelayanan yang sangat baik dan memberikan citra yang positif kepada masyarakat.

Pelayanan publik memiliki indikator sebagai berikut (Revida et al., 2021):

1. Responsiveness yaitu adanya daya tanggap penyedia layanan terhadap keinginan, harapan dan aspirasi dari pengguna layanan
2. Responsibility yaitu adanya ukuran seberapa jauh proses dalam pemberian layanan yang dilakukan sesuai dengan prinsip dan ketentuan administrasi dan organisasi yang baik dan benar
3. Accountability yaitu adanya ukuran dari penyelenggara pelayanan yang sesuai dengan kepentingan stakeholders dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Mengukur kualitas pelayanan dengan menggunakan dimensi tangible, reliable, responsiveness, competence, courtesy, Credibility, Security, Acces, Communication, Understanding the customer. Dalam penelitian yang dilakukan Heffy, indeks kepuasan masyarakat indonesia terhadap pelayanan pemerintah diukur dengan (Heffy, 2009):

1. Kesederhanaan prosedur pelayanan.
2. Kesesuaian persyaratan pelayanan.
3. Kejelasan petugas pelayanan.
4. Kedisiplinan petugas pelayanan.
5. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas pelayanan.
6. Keahlian dan keterampilan petugas pelayanan.
7. Kecepatan pelayanan.
8. Keadilan mendapatkan pelayanan.
9. Kesopanan dan keramahtamahan petugas.
10. Kewajaran biaya pelayanan.
11. Kepastian biaya pelayanan.
12. Kepastian Jadwal pelayanan.
13. Kenyamanan Lingkungan.
14. Keamanan pelayanan.

Menurut Parasuraman dkk yang dikutip oleh beberapa ahli bahwa kualitas layanan terdiri dari 10 dimensi. Di mana kesepuluh dimensi tersebut adalah (Hosseini, Zadeh and Bideh, 2013; Simarmata, 2017; Halim et al., 2021; Sahir et al., 2021).

1. Access, kemudahan pegawai untuk dihubungi atau ditemui, lokasi fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu antri yang tidak terlalu

- lama, saluran komunikasi pemerintah seperti telepon, surat, email yang mudah dan jam operasional yang nyaman.
2. Reliability, kehandalan memiliki dua aspek utama yaitu kinerja dan sifat dapat dipercaya. Pemerintah mampu menyampaikan jasa secara benar dari awal, memenuhi janjinya secara tepat dan mengirimkan tagihan secara akurat.
 3. Competence, penguasaan keterampilan atau pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat menyampaikan jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 4. Communication, menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam bahasa yang mudah dipahami, mendengarkan saran dan keluhan masyarakat, proses penanganan masalah potensial yang mungkin timbul.
 5. Responsiveness, kesiapan dan kesediaan pegawai membantu masyarakat, pegawai menyampaikan jasa secara tepat contohnya ketepatan waktu pelayanan, kecepatan menghubungi kembali masyarakat dan penyampaian layanan secara cepat.
 6. Credibility, sikap jujur dan dapat dipercaya yang mencakup nama pemerintah, reputasi, karakter pegawai.
 7. Courtesy, merupakan sikap santun, respek, atensi dan keramahan dari pegawai.
 8. Security, bebas dari risiko, bahaya dan keragu-raguan. Termasuk di dalamnya keamanan secara fisik, keamanan financial, keamanan data pribadi, dan kerahasiaan.
 9. Tangibles, penampilan fisik, peralatan, personil dan bahan komunikasi pemerintah.
 10. Understanding, kemampuan untuk memahami masyarakat, kemampuan untuk mengetahui kebutuhan fisik masyarakat dan memberikan perhatian individu kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik maka pemerintah perlu memperhatikan point berikut seperti (a) Excellent yaitu standar kinerja untuk menghasilkan produk jasa yang berkualitas, (b) Masyarakat baik perorangan, kelompok, maupun organisasi, (c) Servis yaitu kegiatan utama atau pelengkap dalam proses pembuatan dan penyampaian layanan ke tangan masyarakat, (c) Quality yaitu kualitas dari produk dan layanan yang dihasilkan, (d) Consistency yaitu memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, (e) Delivery yaitu penyampaian layanan secara benar, dan tepat waktu. (Shinta, 2011; Nurbaity L, 2014; Wirapraja et al., 2021). Strategi yang digunakan oleh

pemerintah dalam meningkatkan kualitas jasa adalah dengan melakukan strategi sebagai berikut:

1. Customer Focus Strategy di mana pemerintah akan memusatkan perhatian pada kepuasan masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan kepuasan dari pemerintah sebagai titik akhir dari manajemen kualitas. Jika masyarakat tidak puas maka pemerintah dianggap gagal atau tidak efektif dalam mencapai tujuannya.
2. Quality Culture Establishment Strategy, merupakan strategi yang dilakukan pemerintah untuk menginternalisasikan budaya kualitas ke semua bagian di pemerintah. Pemerintah akan menanamkan nilai, norma, dan budaya kualitas kepada seluruh sumber daya manusia yang ada di pemerintah. Budaya kualitas dianggap penting karena akan memengaruhi sikap dan perilaku individu yang ada di pemerintah. Tanpa adanya budaya kualitas maka perilaku individu tidak akan mendorong dihasilkannya produk jasa yang memuaskan keinginan masyarakat. Budaya kualitas yang baik akan menghasilkan kebiasaan dan perilaku yang baik dalam memasarkan produk dan jasa pemerintah.
3. Quality Control Strategi. Merupakan strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengukur seberapa besar pencapaian yang ditargetkan pemerintah untuk memuaskan masyarakat dan dibandingkan dengan realisasi target. Jika realisasi dianggap masih di bawah target maka pemerintah perlu melakukan perbaikan-perbaikan di mana yang akan datang.
4. Continuous Improvement Strategi, merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses produksi secara terusmenerus. Kegiatan penyempurnaan dilakukan secara bertahap dan tanpa batas waktu yang ditetapkan.

Bab 13

RPJM Dalam Sistem Pembangunan Nasional

13.1 Pendahuluan

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik, serta keadaan yang baik menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang tersedia secara maksimal, efisien, dan efektif dengan tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana ini tentu berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, karena masing-masing negara memiliki usia kedaulatan, sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) andalan yang di milikinya dan tantangan yang berbeda-beda.

Bangsa Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan pembangunannya sangat jelas terlihat dari isi UUD 1945

tersebut bahwa pemerintah akan berupaya membangun masyarakat kecil dari Sabang hingga ke Merauke, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna memajukan kesejahteraan umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

13.2 Konsep Dasar Pembangunan

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan di sini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya, untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Hadiwijoyo dan Anisa, 2019).

Pembangunan dalam sejarah dan strateginya telah mengalami evolusi perubahan, mulai dari strategi pembangunan yang menekankan kepada pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan dan kesempatan kerja, pertumbuhan dan pemerataan, penekanan kepada kebutuhan dasar (basic need approach), pertumbuhan dan lingkungan hidup, dan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Pembangunan juga mengandung nilai-nilai hakiki yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat yang paling mendasar, yang terdapat hampir di semua masyarakat/kultur di segala zaman. Nilai-nilai tersebut adalah kebutuhan hidup, harga diri dan kebebasan.

Oleh karena itu, sasaran pembangunan mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. Meningkatkan persediaan dan memperluas distribusi bahan-bahan pokok seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan perlindungan;
2. Meningkatkan taraf hidup termasuk menambah penghasilan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang besar terhadap nilai-nilai budaya dan manusiawi, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi semata, melainkan juga untuk meningkatkan kesadaran dan harga diri; dan

3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi sosial bagi setiap individu dengan cara membebaskan masyarakat dari sikap perbudakan dan ketergantungan. (Mahi, 2016).

Pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya dan politik yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (community/group). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi. Istilah pembangunan diartikan secara berbeda sesuai dengan perspektifnya masing-masing para ahli, sehingga definisi tentang pembangunan menjadi beragam. Namun istilah pembangunan sesungguhnya dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian berdasarkan periode waktunya yaitu pandangan lama berdasarkan ukuran-ukuran ekonomi tradisional dan pandangan baru ekonomi pembangunan. (Nurman, 2015).

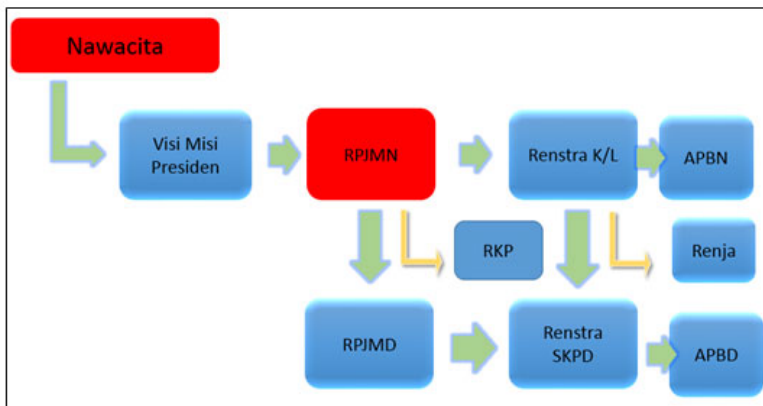
Pembangunan (development) merupakan proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Pembangunan merupakan suatu proses tindakan untuk mengubah kehidupan sumber daya manusia (SDM) dan penghidupan penduduk, sehingga dapat memenuhi segala macam dan bentuk kebutuhan penduduk tersebut secara layak, bahkan mampu memenuhi peningkatan kebutuhan perkembangan penduduknya serta sesuai ilmu teknologi yang semakin maju.

Proses perencanaan pembangunan saat ini juga dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta proses bottom-up dan top-down. Proses ini menunjukkan bahwa perencanaan daerah selain diharapkan dapat memenuhi prinsip perencanaan yang sistematis, transparan, partisipatif, dan akuntabel, juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Di dalam proses perencanaan pembangunan ini keterlibatan stakeholders dan anggota DPRD sangat di perlukan dalam proses perencanaan dan penganggaran menjadi hal yang sangat penting untuk mendapatkan dukungan optimal dalam implementasi proses perencanaan pembangunan.

13.3 RPJM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2015- 2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025.

Tahun 2015, Indonesia memasuki tahap ketiga dalam rencana menengahnya yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Bertepatan dengan ini juga, Indonesia memiliki presiden baru Ir. H. Joko Widodo sebagai presiden Republik Indonesia dan kemudian memiliki rumusan kerja untuk masa kerjanya yang tertuang dalam Nawa Cita, sehingga RPJMN 2015-2019 dapat dijabarkan dalam gambar Kerangka Kebijakan Pembangunan 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 14.1 sebagai berikut:



Gambar 13.1: Kerangka Kebijakan Pembangunan 2015-2019 (Kebijakan Kesehatan Indonesia 2019).

RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005–2025.

Praturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah/RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Menteri adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencangkup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

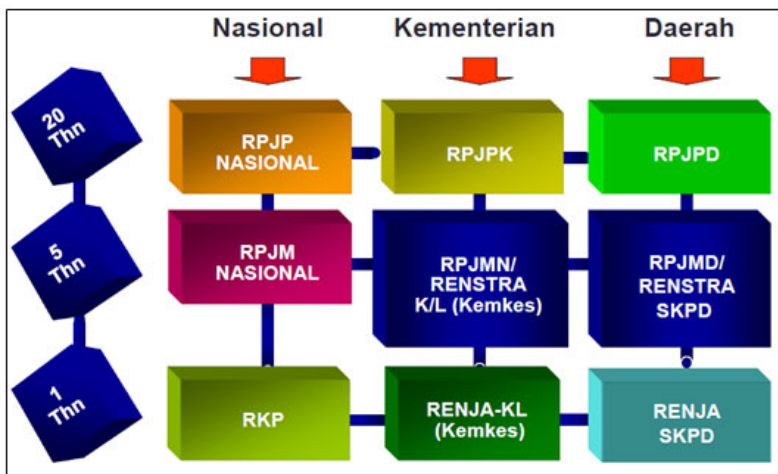
Untuk menuju sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam sistem pembangunan nasional dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya alam. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan daerah maupun nasional, kesejahteraan warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial antar etnis dan budaya, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan

yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia (SDM) serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah di Tanah Air Indonesia, serta semakin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan dimana manusia tersebut berada.

13.4 RPJM Dalam Sistem Pembangunan Nasional

13.4.1 Sistem Pembangunan Nasional

Sistem Pembangunan Nasional merupakan suatu tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang di laksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Contoh gambar Sistem Pembangunan Nasional dapat kita lihat pada gambar 14.2 di bawah ini:



Gambar 13.2: Sistem Pembangunan Nasional. (Kebijakan Kesehatan Indonesia 2019).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional digunakan selama 20 tahun dan diterjemahkan oleh kementerian atau lembaga terkait hingga ketingkat daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) kemudian dibagi menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik di tingkat nasional, tingkat pusat/kementerian atau lembaga, hingga ke daerah.

13.4.2 RPJM Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan pada intinya yaitu melihat dunia sebagai suatu sistem, yaitu sistem yang menghubungkan ruang udara, dari waktu. Pada saat kita memahami bahwa dunia ini merupakan suatu sistem yang saling berhubungan dengan ruang udara, kita akan memahami bahwa polusi udara yang berasal dari Amerika Utara akan memengaruhi kualitas udara di Asia, dan pestisida yang disemprotkan di Argentina dapat merusak atau meracuni stok ikan yang berada di lepas pantai Australia, sedangkan pada saat kita memahami dunia sebagai suatu sistem antar waktu, kita akan mulai menyadari bahwa cara bertani pada masa lalu di sebidang tanah akan terus memengaruhi praktek pertanian hingga sekarang dan kebijakan ekonomi yang kita dorong sekarang akan memiliki akibat terhadap kemiskinan kota pada saat anak-anak kita dewasa.(Rinanti, 2017).

Pembangunan berkelanjutan dapat dilihat sebagai suatu gerakan secara bersama-sama mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan umum sosial yaitu suatu kelompok masyarakat dengan ideologi yang sama yang tertentu. Hal yang mendasari partisipasi ini dalam acara formal internasional mengenai pembangunan berkelanjutan adalah sejumlah gerakan sosial yang berjuang untuk mengidentifikasi arti dari pembangunan berkelanjutan berkelanjutan itu sendiri. Pembangunan berkelanjutan dalam konteks tempat dan masyarakat yang spesifik. Gerakan pembangunan berkelanjutan merupakan usaha dari beberapa komunitas, daerah, provinsi, atau bahkan Negara untuk menciptakan masa depan yang lebih baik yang diinginkan dari komunitas, daerah, provinsi bahkan Negara tersebut.

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Untuk mencapai gerakan pembangunan berkelanjutan tersebut di dalam buku ini membahas empat upaya yang harus dilakukan dalam pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan aparatur Pemda/pemkot dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Memantapkan prosedur perencanaan pembangunan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif disertai pengembangan pemahaman mengenai pembangunan berwawasan lingkungan termasuk melalui LSM.
3. Menyelesaikan setiap permasalahan lingkungan hidup dengan cara-cara bijaksana.
4. Melengkapi peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di daerah sampai ke tingkat desa.

13.4.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dalam Sistem Pembangunan Nasional

(Sukirno, 2006) Menyatakan Pada masa yang lalu sangat sedikit sekali perhatian ditumpahkan dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah.

Terdapat tiga alasan penting yang menimbulkan keadaan tersebut.

1. Pertama, terdapatnya keyakinan bahwa perencanaan pembangunan nasional sudah akan mampu untuk menggerakkan ekonomi sesuatu negara dan berbagai daerah sehingga tidak memerlukan lagi adanya perencanaan pembangunan daerah.
2. Kedua, terdapat anggapan bahwa rencana dan strategi pembangunan daerah walaupun ingin dilakukan tidak berbeda dengan perencanaan dan strategi pembangunan nasional dan oleh karena itu tidak memerlukan teori serta analisa yang baru mengenai masalah tersebut.
3. Berdasarkan pada pandangan ini maka selanjutnya beberapa kalangan berpendapat bahwa rencana dan strategi pembangunan daerah dapat mencontoh apa yang telah dilakukan untuk tingkat nasional. Dengan perkataan lain, pandangan kedua ini menganggap rencana pembangunan daerah itu sebagai mini rencana pembangunan nasional.

Selain dari kedua alasan tersebut, perhatian yang sangat terbatas dalam menyusun strategi dan perencanaan pembangunan daerah diperkuat pula oleh adanya kekurangan tenaga ahli yang diperlukan untuk menjalankan usaha tersebut.

Makin lama makin disadari bahwa dua alasan yang pertama yang dikemukakan di atas adalah kurang tepat karena ternyata (i) adanya perencanaan pembangunan negara belum menjamin akan wujudnya pembangunan yang seimbang dan optimal diberbagai daerah dan (ii) rencana pembangunan daerah bukanlah ukuran mini dari rencana pembangunan nasional. Pengalaman program pembangunan di berbagai negara menunjukkan bahwa rencana pembangunan nasional belum dapat menciptakan proses regionalisasi pembangunan yang efisien ke berbagai daerah. Bahkan di beberapa negara usaha tersebut telah menciptakan ketidak seimbangan pembangunan yang bertambah serius di antara berbagai daerah. Oleh sebab itu makin lama makin banyak orang yang berkeyakinan akan pentingnya program pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah. Kesadaran ini merupakan salah satu faktor yang meningkatkan kepopuleran dari pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. (Sukirno, 2006).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam system nasional tidak terlepas dari yang namanya pembangunan infrastruktur di mana pembangunan infrastruktur di bagi menjadi pembangunan infrastruktur fisik dan sosial.

Infrastruktur fisik dan sosial adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengelolaan limbah, perlistrikan, telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional, infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat. (Putra, 2018).

13.4.4 RPJM Memberdayakan SDM Dalam Sistem Pembangunan Nasional

Pembangunan wilayah merupakan upaya mencapai pembangunan berimbang (balance development). Pembangunan yang berimbang juga merupakan terpenuhinya potensi-potensi pembangunan sesuai dengan kapasitas Pembangunan setiap wilayah atau daerah yang beragam dan kaya akan etnis dan budaya seperti Negara Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Pemberdayaan dalam sumber daya manusia (SDM) di dalam lingkungan pembangunan dan pengembangan wilayah merupakan upaya menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi semua elemen masyarakat, untuk dapat terlibat dalam pembangunan daerah, provinsi maupun nasional dalam sistem pembangunan nasional yang sudah di rencanakan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun daerah guna mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang efektif dan Efisien.

Jika sudah terlaksana pembangunan yang efektif dan efisien dengan adanya campur tangan masyarakat sekitar maka DPRD atau pemerintah daerah wajib memberikan penghargaan kepada kelompok masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tersebut, itu bentuk pemberdayaan SDM di lingkungan atau daerah tersebut.

Daftar Pustaka

- Abbas, A. H. (2020) 'Model Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan', *Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA*, 28(1), pp. 30–41.
- Abd Rahman, Erika, R. T. S. et all (2020) *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Yayasan Kita Menulis.
- Abe, A. (2001). *Perencanaan Daerah: Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Adam, C, B., D., & Gollin, D., (2018). Rurban linkages, Public Investment, and Transport Costs: the case of Tanzania. *World Development* 109, 497–510.
- Adam, L. (2012) 'Hak Pengusahaan Perairan Pesisir: Tinjauan Aspek Ekonomi, Lingkungan dan Sosial', in Phil., Dr. Nainggolan, Partogi Poltak, M. (ed.) *Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Idonesia*. Jakarta: P3DI dan Azza Grafika, pp. 1–188.
- Adisasmita, R. (2013) 'Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah, cetakan pertama', *Graha Ilmu*, Yogyakarta.
- Akib, H. (2009) 'Perkembangan Ilmu Administrasi Publik', *Manajemen Publik*, 1(1), pp. 1–11.
- Alisjahbana, A. S. and Murniningtyas, E. (2018) *Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia: konsep, target, dan strategi implementasi*. Unpad Press.
- Alkadri et al, (1999). *Manajemen Teknologi untuk Pengembangan Wilayah*, Edisi Pertama. Direktorat Kebijaksanaan Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah- BPPT, Jakarta.

- Amsler, G. M., Findley, H. M., & Ingram, E. (2009). "Performance Monitoring: Guidance for The Modern Workplace". *Journal International of Economics and Business* Vol. 70, 12-19.
- Arif, A. Z. I. (2015) 'Mengukur Tingkat Perencanaan Partisipatif dalam Penyusunan RPJMD Kota Mojokerto', *Humaniora*.
- Arikunto, S. (2010). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arsyad L. (2016) "'Ekonomi Pembangunan Edisi 5'". Yogyakarta: Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Arsyad, L. (2001). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Astirin, O. P. (2016) 'Penguatan Kapasitas Masyarakat Di Era Revolusi Industri 4.0 Pada Masa Pandemi Covid 19', (*HAPEMAS 2*), p. 12.
- Badan Pusat Statistik (2020) *Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir*, Badan Pusat Statistik.
- Basri, H. (2013) "Landasan pendidikan", Bandung: Pustaka Setia.
- Bastian, Indra. (2006). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Berdegue, J., A., Carriazo, F., Jara, B., Modrego, F., & Soloaga, I., (2015). *Cities, Territories, and Inclusive Growth: Unraveling Urban–Rural Linkages in Chile, Colombia, and Mexico*. *World Development* 73, 56–71. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.12.013>
- Bintarto, (1989). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Gramedia.
- BPKAD Banjar. (2018). *Monitoring dan Evaluasi*. Tersedia [online]. <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2018/03/19/monitoring-evaluasi/> Diakses 19 Maret 2018.
- BPS (2015) "'Indeks Pembangunan Manusia'". Jakarta. BPS - RI.
- BPS (2019) "'Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan'".
- BPS (2020) "'Berita Resmi Statistik: Indikator Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020'". Jakarta. BPS – RI.

- Cahyandito, M. F. (2016) 'Pembangunan berkelanjutan, ekonomi dan ekologi', pp. 1–12.
- Dahuri, R. (2001) 'Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah', *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 17(2), pp. 139–171. Available at: <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/38/pdf>.
- Daman. (2012). *Monitoring dan Supervisi Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*. Semarang: Unnes Press.
- Damanik, Darwin., Pawan Darasa Panjaitan., Anita Florence Pardede., Akhmad Muhammadin., Ince Weya., Edwin Basmar., Arfandi SN., Bonaraja Purba., Wasrob Nasruddin. (2021) "Sistem Ekonomi Indonesia," Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Das, I., Dutta, M.K., & Borbora, S., (2013). Rurban linkages for development of rural economy in Assam: a social accounting matrix approach. *International Journal of Rural Management* 9, 183–208. <https://doi.org/10.1177/0973005213499222>
- Deptan. (1989). *Sistem Monitoring dan Evaluasi Proyek-Proyek Pembangunan, Pertanian dan Pedesaan*. Jakarta: Departemen Pertanian Badan Pendidikan,
- Digdownseiso, K. (2019) *Teori pembangunan*. Penerbit: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Dissanayake, W. (1983) 'The communication significance of the Buddhist concept of dependent co-origination.', *Communication*, 8(1), pp. 29–45.
- Djakapermana R. D., (2003). *Pengembangan Wilayah Dan Penataan Ruang di Indonesia: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Presented at the Studium General Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STTNAS), Departemen Pekerjaan Umum, Yogyakarta.
- Drajat Kartono and Hanif Nurcholis (2016) 'Konsep dan Teori Pembangunan', *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*, IP4542/M, pp. 1–52.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Economics, T. (2020) "'GDP Growth Annual'."

- Effendi, B. (2002) *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*. Yogyakarta: Uhaiindo dan Offset.
- Effendy, M. (2009) 'Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya dan Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir Yang Optimal dan Berkelanjutan', *Jurnal Kelautan*, 2(1), pp. 81–86.
- Elfindri, E. (2011). Beberapa Teknik Monitoring dan Evaluasi (MONEV). *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 1(3), 106-128.
- Esman, M. (1991) *Management Dimensions of Development : Perspective and Strategies*. Connecticut : Kumarian Press.
- Fabianto, M. D. and Berhitsu, P. T. (2014) 'Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat', *Jurnal TEKNOLOGI*, 11(2).
- Fahmi, A. (2020). Teori Monitoring dan Evaluasi. Tersedia [online].: <https://www.slideshare.net/arfanfahmi/teori-monitoring-dan-evaluasi> Diakses 18 September 2020.
- Fattah, N. (1996). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- Friedmann, J. D., M., (1975). *Pengembangan Agropolitan : Menuju Siasat Baru Perencanaan Regional Di Asia*. Lembaga penerbit fakultas ekonomi. Universitas Indonesia, Jakarta.
- G20 (2009) "'G20 Leaders Statement: The Pittsburgh Summit'". <http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925.html>. Diakses pada 17 Mei 2021.
- Gamaliel Hirung Ding, DB. Paranoan, A. D. (2014) 'Implementasi Perencanaan Partisipatif Melalui Musrenbangdes Dalam Mewujudkan Program Gerdema Di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Gamaliel Hirung Ding 1 , DB. Paranoan 2 , Achmad Djumliani 3', *Jurnal Administrative Reform*.
- Gatra (2020) "'Peringkat Indeks SDGs 2020 di Indonesia Meningkat'". Available at: <https://www.gatra.com/detail/news/485592/ekonomi/peringkat-indeks-sdgs-2020-di-indonesia-meningkat>.

- Ginanjjar, K. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Cides.
- Ginting, A. M. (2013) 'Kendala pembangunan provinsi Kepulauan Riau: Studi kasus provinsi Kepulauan Riau', *Politica*, 4(1), pp. 49–75. Available at: <http://bakohumas.kominfo.go.id/news.php?id=1000>,.
- Green, L. W. and Kreuter, M. W. (1993) *Health promotion planning: An educational and ecological approach*. McGraw-Hill.
- Gudban, Ya'qud Ananda. (2017) "Konsep Penyusunan Anggaran Publik Daerah: Perspektif Teori dan Perilaku Principal-Agent antara Eksekutif dan Legislatif," Malang: Intrans Publishing.
- Hadiwijoyo.S.S dan Anisa. D.F. (2019) "Perencanaan Pembangunan Daerah Suatu Pengantar", Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. (2019) "Pengelolaan Keuangan Daerah". Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, F. et al. (2021) *Manajemen Pemasaran Jasa*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Hani, H.T. (2001). *Manajemen*. Edisi Kedua. Cetakan Ketujuh belas. Yogyakarta: BPFE.
- Haryanto. (2008) "Perencanaan dan Penganggaran Daerah Pendekataan Kinerja,"Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hasibuan, M.S.P. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Heffy, M. (2009) 'Reformasi Manajemen Pelayanan Publik Menuju Good Governance', *Jurnal Borneo Administrator*, 5(2), pp. 1–16.
- Hirschman, A. O. and Lindblom, C. E. (1962) 'Economic development, research and development, policy making: some converging views', *Behavioral science*. Wiley Online Library, 7(2), pp. 211–222.
- Holis Y.M, (2017). *Local Economic Linkages Pada Kota Kecil/Menengah Sebagai Instrumen Konsep Keterkaitan Desa-Kota (Rural-Urban Linkage)*, in: *Prosiding Seminar Nasional Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa Kota*. Presented at the seminar nasional perencanaan pembangunan inklusif desa kota, Pascasarjana Universitas Andalas, Padang, pp. 817–826.

- Hosseini, S. Y., Zadeh, M. B. and Bideh, A. Z. (2013) 'Providing a Multidimensional Measurement Model for Assessing Mobile Telecommunication Service Quality (MS-Qual)', *Iranian Journal of Management Studies*, 6(2), pp. 7–29. doi: 10.22059/ijms.2013.32062.
- Huang, C. J. and Ho, Y. H. (2017) 'Governance and economic growth in Asia', *North American Journal of Economics and Finance*. Elsevier Inc., 39(100), pp. 260–272. doi: 10.1016/j.najef.2016.10.010.
- Inayatullah (1979) *Conceptional Framework for the Country Studies of Rural Development*. in Inayatullah (ed.). *Approaches to Rural Development: Some Asian Experiences*. Asian and Pacific Development Administration Center. Kualalumpur.
- Indonesian Bank (2015) 'menyebabkan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi justru pertumbuhan human capital yang bertumpu pada pendidikan sebagai sumber penting dari kemajuan ekonomi negara-negara maju. Studi empiris yang menjustifikasi temuan ini akhirnya mendorong lahirnya paradigma', *Jurnal Maritime Economy*, 52, pp. 1–52.
- Ismail, F. (2014). "Model-model Evaluasi Kurikulum". Lentera STKIP-PGRI Bandar Lampung, 2
- Juhanis (2012) 'Pengaruh Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan', *Jurnal Plano Madani*, I(1), pp. 16–28.
- Kaffah, M. S. and Syaodih, E. (2018) 'Kajian Manajemen Pembangunan Tata Ruang dan Infrastruktur di Kota Bandung', in *Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota*, pp. 342–350.
- Kakazu, H., n.d. *Sustainable Development of Small Island Economic*. Westview Press, San Fransisco.
- Kartasmita G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan)*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Kartasmita, G. (1997) 'Menuju Masyarakat Yang Adil dan Makmur Melalui Pemerataan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan', *Dokumentasi Bappenas*, Jakarta.
- Kartasmita, G. (1997) *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Yogyakarta : UGM.

- Kemenperin (2013) “Ketika Swasta Mendominasi”.
- Kemenperin (2017) “Pengelola Kawasan Industri Didominasi Swasta”. Available at: <https://www.kemenperin.go.id/artikel/11614/Pengelola-Kawasan-Industri-Didominasi-Swasta>. Diakses 17 Mei 2021.
- KEPMENPAN 81 (1993) ‘MENPAN No.81/1993 Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum’.
- Kepmenpan No 63/KEP/M.PAN/7/2003 (2003) ‘Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Vol Kepmenpan No 63/KEP/M.PAN/7/2003)’.
- Ketchum, B. H. (1972) *The Water’s Edge. Critical Problems of Coastal Zone*. London: MIT Press.
- Kim, S. M, (2015). An Empirical Analysis on Urban-Rural Linkage in Mumbai Metropolitan Area. *The Journal of Development Practice* 2, 20–25.
- Korua, F. S., Rumat, V. A. and Siwu, H. F. D. (2016) ‘Pengaruh Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Tenaga Kerja Sebagai Intervening Variabel Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2003-2013’, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(1), pp. 410–417.
- Kuncoro, M. (1919) *Otonomi dan pembangunan daerah: reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang*. -.
- Kuncoro, M. and Idris, A. N. (2015) ‘Mengapa Terjadi Growth Without Development Di Provinsi Kalimantan Timur?’, *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 11(2), p. 172. doi: 10.23917/jep.v11i2.323.
- Lasabuda, R. (2013) ‘TINJAUAN TEORITIS DALAM PERSPEKTIF NEGARA KEPULAUAN REPUBLIK INDONESIA’, *Jurnal Ilmiah Platax*, I(2), pp. 92–101.
- Lasmarita Nugra Gesty*, E. S. P. A. S. (2016) ‘PELAKSANAAN TUGAS BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA JAMBU KECAMATAN MLONGGO KABUPATEN JEPARA’.
- Lewis, W.A. (1994). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lincoln, A. (1999) ‘Ekonomi pembangunan’, Yogyakarta: Penerbit STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.

- Listyaningsih, 2014. Administrasi Pembangunan. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mahayanti Fitriandari and Winata, H. (2021) 'Manajemen Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia', *Competence: Journal of Management Studies*, 15(1).
- Mahi, K. (2016) "Pengembangan Wilayah", Jakarta: Kencana Raya.
- Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jogjakarta : UPP AMP YKPN.
- Manik, R. R. (2011). "Beberapa Permasalahan dalam Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Pemerintah Daerah". Tersedia [online]. <https://swamandiri.wordpress.com/2011/07/08/beberapa-permasalahan-dalam-monitoring-dan-evaluasi-di-lingkungan-pemerintah-daerah/> Diakses, 8 Juli 2011.
- Mardiani, G. T. (2013). Sistem Monitoring Data Aset dan Inventaris PT Telkom Cianjur Berbasis Web. *KOMPUTA: Jurnal Komputer dan Informatika*, 2(1), 35-40.
- Marfiani, T., Hartoyo, S. and Manuwoto, M. (2018) 'Analisis Potensi Ekonomi Dan Strategi Pembangunan Ekonomi Di Bogor Barat', *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 1(1), pp. 1-16. doi: 10.29244/jurnal_mpd.v1i1.23999.
- Marit, E. L., Revida, E., et al. (2021) Pengantar Otonomi Daerah dan Desa. Yayasan Kita Menulis.
- Marto Silalahi, dkk. (2020). BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa. Medan : Yayasan Kita Menulis
- Maryono (2015) 'The Implementation Of Character Education Policy At Junior High Schools And Islamic Junior High Schools In Pacitan', *Education and Research* Vol. 3 No. 5 May 2015.
- Meadows, P. (1987) *Motivation for Change and Development Administration*. Prentice-Hall Englewood Cliffs.
- Mercy. C. (2005). *Design, Monitoring and Evaluation Guidebook*. USA: Portland.
- Moerdiyanto. (2009). Teknik Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam Rangka Memperoleh Informasi untuk Pengambilan Keputusan Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Morris, M. D. (1978) 'A physical quality of life index', *Urban Ecology*. Elsevier, 3(3), pp. 225–240.
- Muhi, A. H. (2011) 'Fenomena pembangunan desa', *Institute Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Munthe, R. N. et al. (2021) *Sistem Perekonomian Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- Muta'ali, L. (2019) *Dinamika peran sektor pertanian dalam pembangunan wilayah di Indonesia*. UGM PRESS.
- Muta'ali, L., Marwast, D. and Christanto, J. (2018) *Pengelolaan wilayah perbatasan NKRI*. UGM PRESS.
- Myrdal, G. (1957) 'Economic nationalism and internationalism: The Dyason lectures, 1957', *Australian Outlook*. Taylor & Francis, 11(4), pp. 3–50.
- Nainggolan, L. E. et al. (2021) *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yayasan Kita Menulis.
- News, A. (2019) "'Indonesia poised to become Southeast Asian giant in digital economy"'. Available at: <https://en.antaranews.com/news/135802/indonesia-poised-to-become-southeast-asian-giant-in-digital-economy>, .
- News., T. (2020) '80 Persen Industri Indonesia Disebut Dikuasai Swasta'.
- Ni Luh Putu Wiagustini et al. (2017) 'Potensi Pengembangan Investasi Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Denpasar', *Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2), pp. 155–173.
- Nitisastro, W. (2010). *Pengalaman Pembangunan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Nugroho, I. & Dahuri, R., (2004). *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Nugroho, I. and Dahuri, R. (2004) 'Pembangunan wilayah: perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan . Jakarta: LP3ES Jakarta'.
- Nurbaity L, A. (2014) 'Strategi Pemasaran dalam Persaingan Bisnis', *Universitas Sumatra Utara*, 1(1), pp. 1–7. Available at: [file:///C:/Users/Watashi/Downloads/buku ajar manajemen dan strategi komunikasi pemasaran \(PDFDrive.com \).pdf](file:///C:/Users/Watashi/Downloads/buku%20ajar%20manajemen%20dan%20strategi%20komunikasi%20pemasaran%20(PDFDrive.com).pdf).

- Nurman. (2015) "Strategi Pembangunan Daerah", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nurmawati. (2016). Evaluasi Pendidikan. Medan: Cipta Pustaka Media.
- Nursetiawan, I. (2018) 'Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes', MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.
- Nursini (2010) 'PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH TEORI DAN APLIKASI'. Jakarta: Jakarta.
- Ojha, D. (1998). Impact Monitoring Approaches and Indicators. GTZ: Eschborn.
- Oktaviana Putri, A., Sirojuzilam, S. and Kadir, A. (2018) 'Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan', Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 6(1), pp. 58–71. doi: 10.31289/publika.v6i1.1527.
- Organization, W. H. (1981) Development of indicators for monitoring progress towards health for all by the year 2000. World Health Organization.
- Pasaribu, B. F. R. (2012) "Literatur Pengajaran Ekonomi Pembangunan". Depok: Universitas Gunadarma.
- Pasaribu, R. B. F. (2009) 'Pembangunan Daerah'. Depok Jawa Barat: Gunadarma.
- Pemerintah Republik Indonesia (2007) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang No. 27 Tahun 2007. Pemerintah Republik Indonesia.
- Pontoh, N. A dan Kustiwan, I, (2009). Pengantar Perencanaan Perkotaan. ITB Press, Bandung, Indonesia.
- Prameswara, A. (2020) 'Kunci Kesuksesan Pembangunan Daerah: Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran'. Available at: <https://dprd.talaudkab.go.id/baca-berita-197-kunci-kesuksesan-pembangunan-daerah-konsistensi-perencanaan-dan-penganggaran.html>.
- Pratama, O. (2020) Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia. Available at: <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya>

- menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia (Accessed: 8 June 2021).
- Presiden Republik Indonesia (2011) 'Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan'. Jakarta: Republik Indonesia.
- Pudjianto, Widodo Sigit (2019) "Pendekatan Baru Perencanaan Pembangunan Daerah," Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Purba, B. (2013) 'Analisis Pengaruh Pertumbuhan PDB, Suku Bunga SBI, IHK, Cadangan Devisa, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar di Indonesia', Jurnal Saintech Universitas Negeri Medan, 5(01).
- Purba, B. (2019a) 'Analysis of Human Development Index in the Highlands Region of North Sumatera Province Indonesia', in Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan.
- Purba, Bonaraja et al. (2019) 'Regional Disparity in Economic Development: The Case of Agropolitan Cities in North Sumatera, Indonesia', in. doi: 10.2991/agc-18.2019.53.
- Putra, W. (2018) "Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia", Depok: Rajawali Pers.
- PWc. (2017) 'Indonesia Akan Menjadi Negara Dengan Perekonomian Terbesar ke-4 di 2050'. Available at: <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2017/indonesian/pwc--indonesia-akan-menjadi-Negara-dengan-perekonomian-terbesar-.html>. Diakses 17 mei 2021.
- Rahajeng, Anggi. (2016) "Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah," Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahayu, M. and Budi, A. (2013) 'Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa', Jakarta, www. kelembagaandas. wordpress.
- Randy R. Wrihatnolo and Riant Nugroho Dwidjowijoto (2013) Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar Dan Panduan, Journal of Chemical Information and Modeling. Penerbit PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia-Jakarta.

- Ranupandojo, H. (1986) 'PERANAN MANAJEMEN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 1.
- Rasidi, D. (2011). "Monitoring Dan Evaluasi". Tersedia [online]. <http://perencanaan.ipdn.ac.id/kajian-perencanaan/kajian-perencanaan/monitoringdanevaluasi> Diiakses 11 Agustus 2011.
- Redjo, S. I. (2009) 'Transformasi Manajemen Pemerintahan: Kasus di Pemerintah Kota Bandung', *Sosiohumaniora*, 11(3), pp. 25–35. Available at: <http://journal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5423>.
- Revida, E. et al. (2021) Pengantar Ilmu Administrasi Publik, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Edited by J. Simarmata. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- RICAS EKA MUKTI (2019) ANALISIS POTENSI OBYEK DAN PENGEMBANGAN WISATA PANTAI LAUT SELATAN BANYUWANGI SERTA KETERSEDIAAN HOTEL UNTUK MEDIA PUBLIKASI PARIWISATA MENGGUNAKAN WEB MAP, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Available at: <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017>
- Rigg, J. (1998). *Rurban Interactions, Agriculture and Wealth: a Southeast Asian Perspective*. *Progress in Human Geography* 22, 497–522.
- Rinanti, A. (2017) " Konsep Ekologi dalam Pembangunan Berkelanjutan", Yogyakarta: Mobius.
- Riyadi & Bratakusumah, D.S. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Riyaldi, R. (2010) 'Manajemen Pelayanan Inklusif', *Jurnal Wacana Kinerja*, 13(14–31).
- Robert Tua Siregar Et All (2020) *Ekonomi Makro*. Yayasan Kita Menulis. Available at: <https://kitamenulis.id/2020/07/23/ekonomi-makro/>.
- Rogers, E. M. (1995) *Diffusions of Innovations*. Forth Edit. New York: Tree Press.
- Rondinelli, D. (1985). *Applied Methods of Regional Analysis: The Spatial Dimensions of Development Policy*. Westview Press, Boulder, Colorado.

- Rondinelli, D. and Puma, M. (1995) 'Decentralizing the governance of education', in Workshop materials prepared for the Advancing Basic Education and Literacy (ABEL) Project. Washington DC: Academy for Educational Development and Washington DC: Abt Associates.
- Roupp, P. (1983). Approach to Community Development. The Hague.
- Rustiadi, E. (2018) Perencanaan dan pengembangan wilayah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- S, P. (2019) "Ekonomi Pembangunan".' Tangerang Selatan. Unpam Pers.
- Safi'i, M. (2009) Manajemen pembangunan daerah: teori dan aplikasi. Averroes Press.
- Safi'i, (2009). Perencanaan Pembangunan Daerah. Kajian dan Aplikasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Malang : Averroes Press.
- Sahir, H. S. et al. (2021) Dasar-Dasar Pemasaran. Edited by A. Karim and J. Simarmata. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Saksono, H. (2019) 'Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Penelitian dan Pengembangan dan Desain & Inovasi', Jurnal Kebijakan Pembangunan, 14(2), pp. 213–226.
- Sanjaya, W. (2015). Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: Kencana.
- Sarbian, D. (2017). "Monitoring dan Evaluasi" Tersedia. [online]. <https://donisarbian22.wordpress.com/2017/03/16/monitoring-dan-evaluasi/> Diakses, 16 Maret 201.
- Sari, D. C. et al. (2020) MANAJEMEN PEMERINTAHAN. Ideas Publishing. doi: 10.13140/RG.2.2.21080.52486.
- Savira, F. and Suharsono, Y. (2013) 'Manajemen Pemerintahan Daerah', Journal of Chemical Information and Modeling, 01(01), pp. 1689–1699.
- Sawitri, D. (2006). Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengembangan Lokal (Studi Kasus: Pengembangan Desa di Jawa Barat). Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota 17, 39–60.

- SDR (2020) 'Rankings The overall performance of all 193 UN Member States'. Available at: <https://dashboards.sdgindex.org/rankings>, diakses 30 Juni 2021.
- Seers, D. (1977) *The Meaning of Development* dalam Charles K. Wilbar (ed.), *The Political Economy of Development and Under Development*. New York: Random House.
- Setianingsih, B. (2015) 'Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda) (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang)', *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(11), pp. 1930–1936.
- Setiawan, F. (2019) 'Pengaruh Teori Pembangunan Dunia Ke -3 Dalam', *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan pemerintahan*, 8(2), pp. 59–69.
- Shinta, A. (2011) *Manajemen pemasaran*. Malang: UB Press.
- Siagian, S. P. (2005) *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung.
- Siagian, S. P. (2005). *Administrasi Pembangunan (Konsep, Teori, dan Strateginya)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S.P., (2003). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sietchiping, R, K., J., Zhang, X.Q., Augustinus, C., & Raf Tuts, 2014. Role of Urban–Rural Linkages in Promoting Sustainable Urbanization. *Environment and Urbanization Asia* 5, 219–234.
- Simarmata, H. M. P. (2017) 'Pengaruh Kualitas Jasa, Citra Perusahaan dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Mikro', *Murni Sadar*, 7(1), pp. 16–31.
- Simarmata, H. M. P., Simarmata, P. P. and Saragih, D. Y. (2018) 'Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kantor Wali kota Pematangsiantar', *Jurnal EK&BI*, 1(2), pp. 69–75.
- Siradjuddin, Z. (2021) *Program Reformasi, Jawaban Tuntutan Pembangunan?* Available at: <http://kotaku.pu.go.id/view/2511/program-reformasi-jawaban-tuntutan-pembangunan?> (Accessed: 15 June 2021).
- Sjafrizal and Elfindri (2008) *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Baduose Media.

- Sjafrizal. (2015). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Soekartawi. (1990). *Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soetomo. (2010). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sofi, I. (2020) 'ANALISIS KELAYAKAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN DAERAH', *Irfan Sofi*, 4(2), pp. 1–15.
- Sudarmanto, E. et al. (2021) *Good Corporate Governance (GCG)*. Yayasan Kita Menulis.
- Sukirno, S. (2006) "Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan", Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sukirno, S. (2006) *Makroekonomi: Teori Pengantar* (edisi ke tiga). Jakarta: Rajawali Press.
- Supardi, I. (1994). *Pembangunan Yang Memanfaatkan Sumber Daya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suparmini, (2007). *Keterkaitan Desa-Kota: Sebagai Alternatif Pembangunan Perdesaan*. Geomedia 5, 193–206.
- Suyono, A. (2001) *Teori dan Isu Pembangunan*. Jakarta: UM-Press.
- Syahza, A. and Suarman, S. (2013) 'Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan', *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 14(1), p. 126. doi: 10.23917/jep.v14i1.166.
- Syukur, M., (2018). *Dasar-Dasar Teori Sosiologi*. PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- T, T. D. (2015) "'Administrasi Pembangunan"'. Makasar. Gemilang Persada.
- Tacoli, C, (2003). *The links between urban and rural development*. *Environment and Urbanization* 15, 3–12.
- Tahir, A. (2019) *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, *Journal of Chemical Information and Modeling*.

- Bandung: Alfabeta. Available at:
<https://kominfo.kotabogor.go.id/asset/images/web/files/buku-2.-masterplan-smart-city-kota-bogor.pdf>.
- Tarigan, R. (2018) 'Perencanaan Pembangunan Wilayah'. Bumi Aksara.
- Terry, G. R (2009). Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Tjokroamidjojo, B. (1995). Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
- Todaro, M. P. and Smith, S. C. (2014) Economic development: The Addison-Wesley series in economics.
- Todaro, M. P. and Smith, S. C. (2020) Economic development. Pearson UK.
- Todaro, M.P. & Smith S. C. (2006). Pembangunan Ekonomi. Edisi kesembilan. Jakarta: Erlangga
- Tri, K. (2001) Perbandingan Administrasi Negara. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Trinanda, T. C. (2017) 'Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan', *Matra Pembaruan*, pp. 75–84. doi: 10.21787/mp.1.2.2017.75-84.
- Tripathi, P. C. (2006) 'PN REDDY (2006), Principles of Management'. New Delhi: Tata McGraw-Hill.
- Tussholiqah, A. B. (2014) 'Kualitas Manajemen Pelayanan Publik', *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 2(1), pp. 1–6.
- Umar, H. (2002). Evaluasi Kinerja Perusahaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang No.25 (2009) 'UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik', pp. 1–77. Available at:
<http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/undang-undang-nomor-25-tahun-2009-tentang-pelayanan-publik.pdf>.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang RI No.5 (2014) 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara', pp. 1–104. Available at:

sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_(ASN).pdf%5Cn.

UNDP (2020) “Human Development Report 2020”.

UNESCO. (1982). “Asia and Pacific Programme of Education Innovation Development Coping with Drop Out: A Handbook”. Bangkok: UNESCO Regional Offices for Education in Asia and Pacific.

Uno, B. H. (2006). Perencanaan Pemberian Pembelajaran. Jakarta: Aksara.

Wasono, Agung dan Muhammad Maulana. (2018). "Tinjauan Kritis Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan di Indonesia," Working Paper 27, Kementerian PPN/ Bappenas, Australian Government, dan Knowledge Sector Initiative

White, B. (1987) ‘Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang, Cetakan Pertama, Alih Bahasa Rusyanto L’, Simatupang, LP3ES, Jakarta.

Wibowo, E. (2008) ‘PERENCANAAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA’, Ekonomi dan Kewirausahaan Vol., 8(1), pp. 16–24.

Wikipedia (2020) “Economic of Indonesia”.

Wirapraja, A. et al. (2021) Manajemen Pemasaran Perusahaan. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Wirawan. (2012). Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi, Jakarta: Rajawali Pers.

Wrihatnolo, R Randy, dan Riant Nugroho Dwidjowijoto (2005) “Manajemen Pembangunan Indonesia,” Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Yuliadi, I. (2014) ‘Potensi Pembangunan Masyarakat Pesisir Selatan Diy Masalah Dan Tantangannya’, Inferensi, 6(2), p. 479. doi: 10.18326/infsl3.v8i2.479-500.

Zubaedi (2013) ‘PENGEMBANGAN MASYARAKAT; WACANA DAN PRAKTI’. PT. Fajar Interpratama Mandiri, p. 270.

Biodata Penulis



Iskandar Kato, S.T.P., M.Si, lahir di Bulucenrana, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan 30 September 1969. Anak pertama dari tiga bersaudara, menamatkan pendidikan pada Sekolah Menengah Negeri 2 Kota Pare-Pare tahun 1988. Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Jurusan Teknologi Pertanian Bidang Mekanisasi Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1994. Menyelesaikan program magister pada Bidang Administrasi Pembangunan, Konsentrasi Manajemen

Perencanaan pada Pascasarjana Universitas Hasanuddin tahun 2011. Pernah bekerja pada Yayasan Taufik Makassar (1994-1996), pernah bekerja di Cordova Computer (1996-1997), pernah bekerja pada Penerbit GenMirqat (2007-2009). Penulis menyelesaikan program Magister bidang Manajemen Perencanaan Universitas Hasanuddin (2009-2011). Sekarang sebagai Ketua Pengawas pada Yayasan Pendidikan Al-Bashirah Makassar dan Yayasan Pendidikan Al-Liwa' Gowa. Sebagai dosen tamu pengampu mata kuliah Konservasi Lahan, Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan mata kuliah Klimatologi pada Jurusan Teknik Lingkungan STITEK Nusindo. Saat ini beliau bekerja sebagai peneliti dan dosen di STIBA Makassar dengan mengampu mata kuliah Manajemen Organisasi, Metodologi Penelitian, Pengantar Hukum Islam, dan Manajemen Komunikasi.



Ahmad Faridi, SP, MKM lahir di Jakarta, pada 7 Juli 1971. Ia tercatat sebagai lulusan Akademi Gizi Depkes (Diploma III Gizi), Institut Pertanian Bogor (Sarjana Pertanian), PPs Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Magister Kesehatan) dan Sedang mengikuti Program Doktorat Manajemen di Universitas Mercubuana. Bapak yang kerap disapa Ahmad ini memiliki Istri bernama Winny Puspita, S.Gz, M.Si, RD dengan 2 orang anak Amalia Hasnah, S.H dan Rafi Ramahurmuzy, S.T. Ahmad Faridi bukanlah orang baru di dalam penulisan buku ajar.

Ada beberapa buku yang telah diterbitkan seperti Ekonomi Pangan dan Gizi, Ilmu Gizi Dasar dan Gizi Dalam Daur Kehidupan. Pada 2014, Ahmad berhasil meraih Hibah Buku Ajar Kemenristek Dikti. Ahmad juga saat ini menjadi Asesor Akreditasi Mandiri Kesehatan di LAMPTKes serta terlibat dalam penelitian-penelitian Nasional di Badan Litbangkes Kemenkes RI.



Prof. Dr. Erika Revida, MS, lahir di Simalungun, 21 Agustus 1962. Menyelesaikan pendidikan Doktor (S3) Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung bidang Ilmu Administrasi Publik pada tahun 2005. Pada tahun 1991 menyelesaikan pendidikan Magister (S2) Ilmu Administrasi Publik pada Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, dan menempuh pendidikan Sarjana (S1) bidang Ilmu Administrasi Publik pada tahun 1996 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara.

Menjadi dosen tetap program studi Ilmu Administrasi Publik FISIP USU Sejak 1 Januari 1987, dan sejak tanggal 1 April 2007 menjadi Guru Besar Ilmu Administrasi Publik FISIP USU Medan. Penulis banyak menulis artikel pada jurnal nasional dan internasional dalam bidang pemberdayaan birokrasi, pemberdayaan masyarakat, modal sosial, manajemen perubahan, e-government, manajemen sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pelayanan pariwisata Email : erikarevida@yahoo.com.



Darwin Damanik, SE, MSE lahir di Jakarta, 28 Desember 1981. Ia menyelesaikan studi S1 – Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung (UNILA) dengan konsentrasi Ekonomi Moneter dan Perbankan pada tahun 2005. Selanjutnya, Ia merampungkan studi S2 - Ilmu Ekonomi di Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia (PPIE UI) dengan konsentrasi Ekonomi Moneter pada tahun 2008. Saat ini, ia tengah menyelesaikan studi S3 - Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Ekonomi Perencanaan Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU). Aktivitasnya sebagai Dosen Tetap dan Ketua Prodi Program Studi Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun. serta pernah menjabat tenaga ahli di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar. Mata kuliah yang diampunya adalah Ekonomi Makro, Ekonomi Pembangunan, Metode Penelitian, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, dan Perekonomian Indonesia. Beberapa buku yang pernah ditulisnya yaitu Pengantar Ekonomi Makro (Citapustaka Media, 2014), Sistem Perekonomian Indonesia, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Internasional, Perekonomian Indonesia, Perekonomian dan Bisnis Indonesia, Ekonomi Demografi, Ekonomi Manajerial, Ekonomi Bisnis Indonesia, Sistem Ekonomi, Ekonomi Sumber Daya Manusia, Metode Penelitian Ekonomi (Kita Menulis, 2021). Penulis dapat dihubungi melalui email: darwin.damanik@gmail.com.



Robert Tua Siregar, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 18 November 1967. Merupakan alumnus Jurusan Teknik Manajemen Industri Fakultas Teknik Universitas Sisingamangaraja XII Medan dan Sosiologi Fakultas Sospol Univ. Sumatera Utara Indonesia Medan. Pada tahun 1998 mengikuti Program Tugas Belajar pada Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan dan lulus pada tahun 2001 dari Universitas Sumatera Utara Indonesia Medan. Pada tahun 2007 menjalani Tugas Belajar Doktor Falsafah Bidang Urban & Regional Planning pada University Of Malaya. Sejak tahun 1994 menjadi dosen pada perguruan tinggi swasta di Pematangsiantar, dan pada tahun 2012 beralih fungsi

status dari Pegawai Pemerintahan menjadi Dosen DpK di Lldikti Medan ditempatkan di Program Pascasarjana Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota dan Fakultas Ekonomi bidang Perencanaan pembangunan. Saat ini Dosen di STIE Sultan Agung Pematangsiantar. Tulisan buku referensi kolaborasi telah di terbitkan pada beberapa penerbit, alamat surel tuasir@gmail.com



Dr. Sukarman Purba, ST, M.Pd, dilahirkan di Kota Pematang Siantar pada tanggal 23 Mei 1962. Lulus dari pendidikan S1 Jurusan Pendidikan Teknik Elektro IKIP Medan Tahun 1986, S1 Teknik Elektro UISU Medan Tahun 2000, pendidikan S2 dari IKIP Jakarta Jurusan Pendidikan Teknologi Kejuruan Tahun 1992, dan pendidikan S3 dari Universitas Negeri Jakarta Jurusan Manajemen Pendidikan Tahun 2008. Saat ini aktif sebagai Tenaga Pengajar di Universitas Negeri Medan. Aktif menulis di Medsos, Buku Referensi yang telah dihasilkan

sebanyak 64 buku secara kolaboratif dan melakukan penelitian dan menulis pada jurnal nasional maupun internasional dalam bidang pendidikan, manajemen, sosial, dan pariwisata. Kegiatan lainnya, aktif sebagai pengurus Asosiasi Profesi Ikatan Sarjana Manajemen dan Administrasi Pendidikan Indonesia (ISMAPI) Pusat dan Daerah Sumut, Organisasi kemasyarakatan HMSI Sumatera Utara dan PMS Kota Medan. Email: arman_prb@yahoo.com



Unang Toto Handiman lahir di Bandung, pada 30 September 1965. Ia tercatat sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada (S1), Universitas Mercu Buana (S2), sedang menempuh Program Doktorat di Universitas Mercu Buana. Pria yang kerap disapa Unang ini adalah suami dari Tri Meyliana Sadewi dan ayah dari Nida Khairani. Unang Toto Handiman sebelum memasuki dunia akademisi berkiprah sebagai tenaga profesional dibidang keuangan dan marekting. Ia kerap mewakili perusahaan untuk menerima penghargaan Top Brand.



Dr. Drs. Bonaraja Purba, M.Si Lulus Sarjana (Drs.) dari Universitas Negeri Medan (UNIMED), Magister Sains (M.Si.) Bidang Ilmu Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala (USK) dan Doktor (Dr.) Bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis Konsentrasi Ilmu Ekonomi Perencanaan dan Regional juga dari Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. Sejak tahun 1987 hingga saat ini berkarir sebagai Dosen PNS di Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan (UNIMED).

Author dari 80 judul Buku Referensi Ilmiah dan Buku Ajar Akademik ber-ISBN/HKI Bidang Ilmu Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan yang sudah diterbitkan oleh beberapa Penerbit dan juga Editor Ahli dari beberapa Buku Ekonomi dan Bisnis.

Email bonarajapurba@gmail.com dan bonarajapurba@unimed.ac.id



Ir. Firdaus, ST., M.Si, lahir di Samarinda, pada tanggal 27 November 1987. Menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2010, program magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Universitas Hasanuddin Tahun 2016 dan program profesi insinyur di Universitas Muslim Indonesia pada Tahun 2019, serta telah mengikuti berbagai pelatihan di bidang tata ruang antara lain Pelatihan Dasar Sertifikasi Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota, Pelatihan Manajemen Pendampingan Teknis

Penyusunan dan Pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, Pelatihan Dasar Peraturan Zonasi dan pemegang sertifikat ahli Utama Perencanaan Wilayah dan Kota dari Ikatan Ahli Perencanaan (IAP). Ia saat ini bekerja sebagai dosen pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan kota Universitas Muhammadiyah Makassar dengan kemampuan di bidang pengembangan wilayah, pengelolaan lingkungan dan perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, selain sebagai dosen ia juga bekerja sebagai seorang konsultan profesional pada

proyek-proyek pemerintah dan swasta di bidang penataan ruang, pengembangan kebijakan dan pengelolaan lingkungan.



Dr. Drs. Marto Silalahi, M.Si, dilahirkan di Pematangsiantar, 23 Maret 1970, anak ketiga dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Drs.P.C.Silalahi (almarhum) dan Ibu Donnaria Manurung. Pendidikan dasar ditempuh SD RK No. 4 Pematangsiantar, lulus tahun 1983, SMP Negeri 1 Pematangsiantar, lulus tahun 1986, SMA Negeri 2 Pematangsiantar, lulus tahun 1989, melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi.pada Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan (STPDN), di Jatingor Bandung Jawa Barat, tamat tahun 1992, melanjutkan

pendidikan strata satu (S1) di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), jurusan manajemen pemerintahan di Jakarta, tamat tahun 1998, melanjutkan strata dua (S2) di Universitas Padjadjaran (UNPAD), jurusan Ilmu-ilmu Sosial, di Bandung Jawa Barat, tamat pada tahun 2001, dan melanjutkan strata tiga (S3) di Universitas Padjadjaran (UNPAD) jurusan Ilmu ilmu sosial, di Bandung Jawa Barat, tamat tahun 2007.

Pada tahun 1-2-1991, diterima CPNS pada Kantor Gubernur Sumatera Utara dengan pendidikan tugas belajar pada STPDN jatinangor Jawa Barat dan pada tanggal 1-1-2012 pindah alih jenis kepegawaian menjadi dosen dpk Kopertis wilayah I Sumatera Utara. Saat ini dosen dpk STIE Sultan Agung Pematangsiantar.



Dr. Ari Mulianta Ginting, SE., MSE, adalah Peneliti Muda bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan bidang konsentrasi Ekonomi Terapan. Lahir di Jakarta, 2 Mei 1981. Pendidikan Sarjana Manajemen Keuangan diselesaikan di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2006. Magister Ilmu Ekonomi diperoleh dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2008 dengan kekhususan Ilmu Ekonomi dengan

konsentrasi Ilmu Ekonomi Moneter. Penulis pada tahun 2020 menyelesaikan

Program Doktor Ilmu Ekonomi dengan Konsentrasi Public Policy di Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti. Bekerja di Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Madya Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan konsentrasi kepakaran Kebijakan Ekonomi pada Pusat Penelitian, Setjen DPR RI. Penulis juga bekerja sebagai Dosen Honorer untuk Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta. Serta Penulis juga menjadi dosen tidak tetap untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Harapan (UPH), dan Dosen Pascasarjana Magister Ekonomi, di Universitas Trisakti. Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail : ari.ginting@dpr.go.id.



Hengki Mangiring Parulian Simarmata, S.Si., M.M., lahir di Pematangsiantar Sumatera Utara. Penulis menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen pada tahun 2014 dari Universitas Padjadjaran Bandung. Pada tahun 2015 diangkat menjadi Dosen Tetap di Politeknik Bisnis Indonesia Murni Sadar Pematangsiantar di Jurusan Administrasi Perkantoran dan dosen tidak tetap di Sekolah Tinggi Manajemen dan Akuntansi

Indonesia. Penulis pernah menjadi dosen di Universitas Prima Indonesia Medan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mars dan AMIK. Fokus pengajaran pada mata kuliah Manajemen Pemasaran, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Risiko Bank, Komunikasi Bisnis, Etika Bisnis, Public Relation, dan Administrasi Perkantoran. Fokus penelitian pada bidang Manajemen dan Pariwisata yang di terbitkan di jurnal nasional dan internasional dengan Author Sinta : 5998993 dan ID Scopus : 57215917254. Editor on Board di Journal MISSY (Management and Business Strategy), Reviewer di Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK&BI). Fokus pengabdian masyarakat pada bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat petani, pelaku usaha mikro dan kecil. Dosen bersertifikat pendidik (Sertifikasi Dosen) tahun 2018 dan memiliki Sertifikat Kompetensi tahun 2019 dan 2020 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Peraih hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) tahun 2019 dan tahun 2020 bidang Manajemen dan Pariwisata. Buku yang telah terbit hasil kolaborasi dibidang Manajemen, Marketing, Manajemen Sumber Daya Manusia, Pariwisata, Kewirausahaan, Ekonomi dan Bisnis sebanyak 43 Buku.

Penulis pernah bekerja di Bank selama 7 tahun, Garuda Indonesia Airlines Medan, dan PT ISS Bandung. Aktif dalam berbagai organisasi profesi Dosen Indonesia sejak tahun 2018. Penulis juga merupakan Tim Diklat dan Penelitian di Pusat Pelatihan dan Pedesaan Swadaya (P4S) Pematangsiantar. Pemilik dan pengelola usaha mikro. Email : hengkisimarmata.mm@gmail.com. Google scholar : Hengki Mangiring Parulian Simarmata.



Ince Weya, S.Pd, M.Si lahir di Wunin, 24 November 1994. Ia menyelesaikan studi S-1 (Sarjana) di Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial (FIS UNIMED) dengan konsentrasi pendidikan pada tahun 2018. Selanjutnya, Ia merampungkan studi S-2 (Magister) di Jurusan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD Sekolah Pasca Sarjana USU). Dengan konsentrasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Wilayah tahun 2020. Saat ini, ia tengah menempuh studi S-3 (Doktor) di Jurusan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (FEB USU). Aktivitasnya sebagai Guru IPS

mengajar di SMPTK Kasih Karunia Helvetia Medan serta Aktivis pemuda di organisasi (IMP SUMUT). Penulis dapat di hubungi melalui email : inceweya@gmail.com

Manajemen PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan penulisan buku untuk memberikan wawasan kepada para pembaca yang dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dan pengetahuan bagi civitas akademik serta menjadi bekal stakeholder dalam bidang pembangunan. Buku ini bisa menjadi referensi bagi para praktisi, akademisi dan para jajaran pemerintah kabupaten/kota.

Buku ini terdiri dari 13 bab yang menjelaskan tentang:

- Bab 1 Pengertian Manajemen Pembangunan
- Bab 2 Siklus Manajemen Pembangunan
- Bab 3 Perencanaan Pembangunan
- Bab 4 Penganggaran Dalam Pembangunan
- Bab 5 Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia
- Bab 6 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
- Bab 7 Indikator Pembangunan
- Bab 8 Pembangunan Antarwilayah Secara Berimbang
- Bab 9 Keterkaitan Desa Kota
- Bab 10 Manajemen Lingkungan Perkotaan
- Bab 11 Strategi Pembangunan Pesisir Mandiri
- Bab 12 Manajemen dan Pelayanan Publik
- Bab 13 RPJM Dalam Sistem Pembangunan Nasional



YAYASAN KITA MENULIS
press@kitamenulis.id
www.kitamenulis.id

ISBN 978-623-342-132-4



9 786233 421324